LAPORAN KAJIAN AKHIR

MODEL PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Kerja Sama

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

Dengan

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

2021

bappelitbangda

PRAKATA

Setinggi puji sedalam syukur sesungguhnya kita panjatkan ke hadirat Allah SWT. Berkat rahmat dan berkah-Nya, laporan kajian akhir ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam senantiasa kita hadiahkan untuk Rosul-Nya, pembawa petunjuk (*huda*) kebenaran bagi manusia.

Kajian ini terselenggara atas kerja sama antara Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat dengan Lembaga Penelitian Universitas Pasundan Bandung untuk tahun anggaran 2021.

Demikian, laporan kajian akhir ini disampaikan. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, kami menerima saran dan masukan untuk penyempurnaan laporan kajian ini.

Bandung, Juli 2021
Tim Penyusun & Narasumber:

Dr. Abu Huraerah, M.Si.
Dr. Dindin Abdurohim, M.M., M.Si.
Aswin Palls, S.Sos., MAP.

bappelitbangda

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kajian ini berjudul "**Model Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Bandung Barat"**. Tujuan kajian ini adalah: (1). Mengumpulkan dan mendeskripsikan data yang diperoleh dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Kabupaten Bandung Barat yang terkait; (2) Melakukan pemetaan kemiskinan, koperasi, dan UMKM di Kabupaten Bandung Barat; dan (3) Menyusun model penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan koperasi dan UMKM di Kabupaten Bandung Barat. Kajian ini menggunakan **Metode Exploratif Survey.** Kegiatan ini menggunakan 3 (tiga) teknik pendekatan, yaitu (1) Studi pustaka (*Desk Study*), (2) Survey (wawancara, observasi, studi dokumen), dan (3) FGD (*Focus Group Discussion*). Pelaksanaan kajian ini menggunakan beberapa tahap, mulai dari tahap penyusunan desain studi, penyusunan pedoman wawancara, pengumpulan data lapangan, analisis dan intrepretasi data. Jenis data yang dikumpulkan untuk dianalisis terdiri atas data primer dan data sekunder. Sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan informan yang menggunakan pedoman wawancara, observasi lapangan, dan FGD (*Focus Group Discussion*). Sementara, sumber data sekunder diperoleh dari hasil studi pustaka dan studi dokumen.

Sumber data diperoleh dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di wilayah kerja Kabupaten Bandung Barat, yaitu: (1) Dinas Sosial; (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; (3) Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistika; (4) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, (5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; (6) Perindustrian dan Perdagangan; (7) Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah; (8) Bagian Perkonomian dan Sekretariat Daerah; (9) Sekretaris Bappelitbangda; (10) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bappelitbangda; (11) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappelitbangda; (12) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Bappelitbangda; (13) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappelitbangda; (14) Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappelitbangda; (15) Fungsional Perencana pada Bappelitbangda; (16) Analis Kebijakan Ahli Madya pada Bappelitbangda; (17) Dekopinda; dan (18) Perwakilan UMKM.

Hasil kajian ini dapat disimpulkan bahwa (1) Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat perlu mempertimbangkan berbagai dimensi, baik dimensi ekonomi, budaya, maupun struktural; (2) Koperasi dan UMKM memiliki peran dan kontribusi yang besar. Namun, masih dihadapkan pada permasalahan, baik internal maupun eksternal. Di sisi lain, adanya peluang dan potensi untuk berkembang; dan (3) Model Penanggulangan Kemiskinan melalui pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil hendaknya menjadi pedoman, untuk Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, dapat direkomendasikan sebagai berikut: (1) Penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan koperasi dan UMKM telah menjadi komitmen dan *political will* Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan dan mengembangkan usaha di sektor koperasi dan UMKM; (2) Diperlukan suatu Model Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Bandung Barat; (3) Rencana Aksi Daerah (RAD) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tentang Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil diprioritaskan dalam bentuk bantuan modal usaha bidang kuliner, warungan, fashion, *handicraf*, dan jasa; (4) Diperlukannya kajian pemetaan (*mapping*) produk unggulan UMKM untuk memberikan informasi yang jelas mengenai potensi prioritas pengembangan UMKM di Kabupaten Bandung Barat; (5) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat diperlukan Peraturan Daerah tentang Penanganan Fakir Miskin; (6) Pengembangan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Bandung Barat diperlukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan, Kemudahan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM; dan (7) Pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Bandung Barat perlu sinergitas dan kolaborasi dari unsur *Academic*, *Business*, *Community*, *Government*, *Media*, dan *Financial* (*ABCGMF*) melalui Sosialisasi, Fasilitasi,Penerapan TTG, Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan.

DAFTAR ISI

PRAKATA ..... **ii**

RINGKASAN EKSEKUTIF ..... **iii**

DAFTAR ISI ..... **iv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1. LATAR BELAKANG **1**

1.2. TUJUAN **4**

1.3. SASARAN **5**

1.4. DASAR HUKUM **5**

BAB II LANDASAN KONSEPTUAL **7**

2.1. KONSEP KEMISKINAN **7**

2.1.1. Pengertian Kemiskinan **7**

2.1.2. Indikator dan Indeks Kedalaman Kemiskinan **8**

2.1.3. Ukuran Kemiskinan **8**

2.1.4. Penyebab Kemiskinan **10**

2.1.5. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan **11**

2.1.6. Kekeliruan Paradigma Penanggulangan Kemiskinan **13**

2.1.7. Strategi Penanggulangan Kemiskinan **14**

2.2. KONSEP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT **15**

2.2.1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat **15**

2.2.2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat **17**

2.2.3. Aspek-aspek Pemberdayaan Masyarakat **19**

2.2.4. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat **20**

2.2.5. Strategi Pemberdayaan Masyarakat **23**

2.2.6. Mekanisme Pemberdayaan Masyarakat **25**

2.2.7. Model Pemberdayaan Masyarakat **27**

2.3. KONSEP KOPERASI DAN UMKM **29**

2.3.1. Ruang Lingkup Koperasi **29**

2.3.1.1. Pengertian dan Prinsip Koperasi **29**

2.3.1.2. Tujuan Koperasi **30**

bappelitbangda

2.3.1.3. Fungsi Koperasi 31
2.3.1.4. Pengelompokkan Koperasi 32
2.3.1.5. Sumber Modal Koperasi 34
2.3.1.6. Pemberdayaan Koperasi 35
2.3.2. Ruang Lingkup UMKM 36
2.3.2.1. Pengertian, Kriteria, dan Klasifikasi UMKM 36
2.3.2.2. Kriteria UMKM 37
2.3.2.3. Klasifikasi UMKM 40
2.3.2.4. Karakteristik UMKM 41
2.3.2.5. Kelebihan, Kekurangan dan Keunggulan UMKM 45
BAB III METODE PELAKSANAAN 47
3.1. RUANG LINGKUP PEKERJAAN 47
3.2. HASIL YANG DIHARAPKAN 47
3.3. PELAPORAN 47
3.4. JADWAL PELAKSANAAN 48
3.5. METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN 49
BAB IV ORGANISASI 51
4.1. PEMBERI TUGAS 51
4.2. SUMBER PENDANAAN 51
4.3. LOKASI PEKERJAAN 51
4.4. TENAGA AHLI DAN TENAGA PENDUKUNG YANG DIPERLUKAN 51
BAB V DESKRIPSI HASIL KAJIAN DAN MODEL 53
5.1. GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT 53
5.1.1. Geografi 53
5.1.2. Keuangan Pemerintah 53
5.1.3. Penduduk dan Ketenagakerjaan 56
5.1.4. Sosial dan Kesejahteraan Rakyat 59
5.1.5. Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan 60
5.1.6. Pariwisata 60
5.1.7. Transportasi dan Komunikasi 61
5.1.8. Pengeluaran Penduduk 62
5.1.9. Sistem Neraca Regional 64

bappelitbangda

5.1.10. Perbandingan Antar Kabupaten/Kota....72
5.2. GAMBARAN DTKS DAN PROKUS KABUPATEN BANDUNG BARAT....76
5.2.1. Gambaran Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat....76
5.2.2. Gambaran DTKS Kabupaten Bandung Barat....77
5.2.3. Gambaran ProKus Kabupaten Bandung Barat....81
5.3. PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM DI KABUPATEN BANDUNG BARAT....81
5.3.1. Pemberdayaan Koperasi di Kabupaten Bandung Barat 81
5.3.1.1. Gambaran Koperasi di Kabupaten Bandung Barat.... 81
5.3.1.2. Gambaran Pemberdayaan Koperasi di Kabupaten Bandung Barat.... 86
5.3.2. Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bandung Barat.... 87
5.3.2.1. Gambaran UMKM di Kabupaten Bandung Barat.... 87
5.3.2.2. Gambaran Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bandung Barat.... 90
5.4. RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT....92
5.5. MODEL PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM DI KABUAPTEN BANDUNG BARAT....93
5.5.1. MODEL UMUM 93
5.5.2. MODEL KHUSUS 95
5.5.2.1. Mode Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Warungan di Kabupaten Bandung Barat 95
5.5.2.2. Model Pemberdayaan Forum UMK Melalui Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi dan Digital Marketing Berbasis Creator dan Conten Lokal Kabupaten Bandung Barat 96
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 98
6.1. KESIMPULAN....98
6.2. REKOMENDASI....98
DAFTAR PUSTAKA.... 100

bappeltbangda

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan perekonomian suatu negara atau pemerintah adalah berkurangnya jumlah penduduk miskin karena pada hakekatnya suatu pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 27 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Di Indonesia, strategi pembangunan diprioritaskan pada pemerataan hasil-hasil pembangunan. Arah dan tujuan pembangunan nasional harus dapat dimamfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan hasil yang dicapai harus dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat. Tujuan pembangunan tersebut erat kaitannya dengan upaya mengurangi kemiskinan dan kesenjangan pendapatan.

Sejalan dengan pesan konstitusional di atas, pemerintah menegaskan bahwa salah satu prioritas pembangunan adalah penanggulangan kemiskinan dan memperbaiki distribusi pendapatan dengan perlindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah melalui pengembangan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Peran penting keberadaan UMKM di Indonesia semakin terasa dalam proses pembangunan ekonomi nasional di Indonesia. Pada awalnya, keberadaan UMKM dianggap sebagai sumber penting dalam penciptaan kesempatan kerja dan motor penggerak utama pembangunan ekonomi daerah di perdesaan. Namun, pada era globalisasi saat ini dan mendatang, peran keberadaan UMKM semakin penting yakni sebagai salah satu sumber devisa ekspor non-migas Indonesia, (Tambunan, 2002).

Peran UMKM juga telah teraktualisasi pada masa krisis hingga saat ini. Selama masa krisis ekonomi hingga kini keberadaan UMKM mampu sebagai faktor penggerak utama ekonomi Indonesia, terutama ketika krisis kegiatan investasi dan pengeluaran pemerintah sangat terbatas, maka pada saat itu peran UMKM sebagai bentuk ekonomi rakyat sangat besar. Selanjutnya, dari sisi sumbangannya terhadap PDRB hanya 56,7 persen dan ekspor non migas hanya sebesar 15 persen. Namun, UMKM tetap masih menyumbangkan 99 persen dalam jumlah pelaku usaha yang ada di Indonesia, serta mempunyai andil 99,6 persen dalam penyerapan tenaga kerja (BPS, 2001 dalam Prasetyo, 2008).

Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Indonesia merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan ekonomi nasional. Hal ini selain karena usaha tersebut

bappelitbangda

merupakan tulang punggung sistem ekonomi kerakyatan yang tidak hanya ditujukan untuk mengurangi masalah kesenjangan antar golongan pendapatan dan antar pelaku usaha, ataupun pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. Lebih dari itu, pengembangannya mampu memperluas basis ekonomi dan dapat memberikan konstribusi yang signifikan dalam mempercepat perubahan struktural, yaitu meningkatnya perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi nasional (Munizu, 2010).

Program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam upaya mengembangkan sektor Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil (UMKM) selama ini sungguh menggembirakan. Peningkatan peran dan kegiatan usaha sektor ini semakin nampak. Di tengahtengah proses restrukturisasi sektor korporat dan BUMN yang berlangsung lamban, sektor ini telah menunjukkan perkembangan yang terus meningkat dan bahkan mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Kondisi dan fakta tersebut sejalan dengan hasil penelitian empiris yang dilakukan Demirbag et al., (2006) yang menyimpulkan bahwa keberhasilan usaha kecil dan menengah (small-medium enterprises) memiliki dampak langsung terhadap pembangunan ekonomi baik pada negara maju maupun negara berkembang. Usaha kecil dan menengah memiliki kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja dengan biaya minimum, mereka adalah pelopor dalam dunia inovasi dan memiliki fleksibilitas tinggi yang memungkinkan usaha tersebut untuk memenuhi kebutuhan pelanggan (Brock dan Evans, 1986; ACS dan Audretsch, 1990).

Bukan karena jumlahnya yang besar saja usaha mikro, kecil dan menengah ini perlu mendapatkan perhatian. Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) memiliki posisi penting dalam perekonomian Indonesia, antara lain ditunjukkan dengan kontribusinya yang besar terhadap produk domestik bruto (PDB), yaitu sebesar 53,28 persen. Bahkan tidak kalah pentingnya dalam penyerapan tenaga kerja, yakni sebanyak 85,4 juta jiwa atau 96,18 persen dari total angkatan kerja yang ada. Demikian juga dari sebanyak 134.963 koperasi yang ada dengan mengatasi permasalahan yang dihadapi bangsa ini.

Keberadaan koperasi serta UMKM telah dirasakan ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi. Ketika itu, tatkala perbankan nasional dan pelaku usaha besar banyak yang gulung tikar, karena tingginya ketergatungan kepada pinjaman luar negeri, ekonomi nasional berhasil diselamatkan oleh kehadiran koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah. Usaha yang menghidupi bagian terbesar rakyat Indonesia ini tetap tegar menghadapi badai krisis ekonomi karena tidak banyak ketergatungan pada pinjaman luar negeri, dan bahkan justru sebagian dari mereka menikmati adanya dampak dari krisis ekonomi terutama yang berorientasi pada pasar luar negeri atau ekspor (Dipta, 2008).

Koperasi dan UMKM perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluasluasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi Koperasi dan UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan pekerjaan, dan pengentasan kemiskinan.

Koperasi dan UMKM telah diakui memiliki peranan penting tidak hanya bagi pertumbuhan ekonomi tetapi juga untuk pembagian pendapatan yang merata serta dapat mengentaskan kemiskinan masyarakat. Oleh karena peranannya yang sangat strategis dan penting, Indonesia memberikan perhatian khusus bagi perkembangan-perkembangan mereka, termasuk membina lingkungan dengan iklim usaha yang kondusif, memfasilitasi dan memberikan akses pada sumber daya produktif dan memperkuat kewirausahaan serta daya saingnya.

Hal tersebut sesuai dengan Visi Pembangunan Bandung Barat 2018-2023, yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, yaitu “Bandung Barat yang AKUR (Aspiratif, Kreatif, Unggul dan Religius), dan berbasis pada pengembangan ekonomi, optimalisasi sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia”.

Misi pembangunan Kabupaten Bandung Barat 2018-2023 disusun berdasarkan janji Bupati terpilih. Prinsip-prinsip sebagaimana janji Bupati terpilih yang digunakan sebagai dasar penyusunan misi ini adalah Kabupaten Bandung Barat yang mengarahkan pembangunan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut :

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas melalui jaminan akses dan pemerataan terhadap layanan dasar kesehatan, pendidikan, dankeagamaan
2. Memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar sebagai penunjang mobilitas masyarakat dan pengembangan ekonomi, sosial, dan budaya
3. Menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis kearifan lokal dan kreativitas
4. Melakukan optimalisasi potensi sumber daya alam dan budaya untuk pengembangan pariwisata ramah lingkungan
5. Menguatkan keunggulan pertanian, peternakan, dan industri yang merata melalui optimalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi
6. Mengurangi kesenjangan masyarakat dengan kebijakan yang pro-poor, pro- job, pro-growth, dan pro-environment

bappelitbangda

7. Mengembangkan sistem pemerintahan yang bersih, aspiratif, inovatif dan melayaniberbasis inovasi dan teknologi.

Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Bandung Barat, tahun 2018 sekitar 192.000 warga atau 11,49% dari jumlah penduduk di Kabupaten Bandung Barat hidup dalam kemiskinan (pikiran rakyat.com).

"Kabupaten Bandung Barat masuk dalam wilayah kemiskinan ekstrem," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tetinggal, dan Transmigrasi, Abdul dikutip priangantimurnews.pikiran-rakyat.com dari Instagram @kemendespdtt, Sabtu 2 September 2021. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tetinggal, dan Transmigrasi, Abdul menyebut, ada dua kategori warga miskin ekstrem, yaitu yang memiliki hampir seluruh kompleksitas multidimensi. "Multi dimensi kemiskinan dengan ciri ciri lansia, tinggal sendirian, tidak bekerja, difabel, memiliki penyakit kronis/menahun, rumah tidak layak huni, tidak memiliki fasilitas air bersih dan sanitasi yang memadai," kata, Abdul (pikiran rakyat.com).

Sejumlah model yang pernah diterapkan dalam penanggulangan kemiskinan tidak tepat. Pasalnya, model tersebut seolah-olah memanjakan masyarakat yang terkategorikan sebagai warga miskin dengan bantuan yang bersifat konsumtif. Dengan demikian, warga miskin tidak menjadi lebih berdaya (pikiran rakyat.com).

Berdasarkan uraian di atas, maka penting untuk dilakukan kajian tentang Model Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Bandung Barat. Kajian ini akan menghasilkan rekomendasi Model Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Bandung Barat, yang pada gilirannya dapat dijadikan sebagai rumusan kebijakan dan pedoman untuk wilayah kerja di Kabupaten Bandung Barat.

1.2. TUJUAN

Tujuan kajian Model Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Koperasi dan UMKM adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dan mendeskripsikan data yang diperoleh dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Kabupaten Bandung Barat yang terkait dan relevan dengan kebutuhan kajian ini.
2. Melakukan pemetaan kemiskinan, koperasi, dan UMKM di Kabupaten Bandung Barat.
3. Menyusun model penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan koperasi dan UMKM di Kabupaten Bandung Barat.

1.3. SASARAN

Pekerjaan penyusunan kajian Model Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Koperasi dan UMKM adalah sebagai rumusan kebijakan dan pedoman untuk wilayah kerja di Kabupaten Bandung Barat.

1.4. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang melandasi pelaksanaan kajian model penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Bandung Barat, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
15. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Mikro Kecil
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

bappelitbangda

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil
19. Peraturan Menko Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro
23. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 53 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro

bappelitbangda

BAB II
LANDASAN KONSEPTUAL

2.1. KONSEP KEMISKINAN

Salah satu permasalahan yang masih dihadapi oleh negara Indonesia yaitu masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional sehingga menjadi prioritas pembangunan. Selama ini, pemerintah Indonesia telah banyak memiliki program-program untuk pengentasan kemiskinan yang ada. Upaya pengentasan kemiskinan terdapat dua strategi yang harus di tempuh. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan mereka dari berbagai bidang. Kedua, melakukan pelatihan kepada mereka agar mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha pencegahan terjadinya kemiskinan baru. Upaya pengentasan kemiskinan dilakukan untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu, terciptanya masyarakat yang adil dan makmur (Royat, 2015).

Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat. Ketika data telah tersedia, maka pemerintah dapat mengambil keputusan apa saja yang harus dilakukan untuk penanggulangan tersebut. Selain itu, data yang tersedia dapat mebuat pemerintah membandingkan angka kemiskinan dari tahun ke tahun. Sejalan dengan penyajian data jumlah dan persentase penduduk miskin, informasi yang tidak kalah pentingnya adalah profil kemiskinan. Informasi mengenai profil kemiskinan sangat dibutuhkan oleh pengambil kebijakan untuk penangan masalah kemiskinan. Dengan demikian, upaya pemberdayan masyarakat miskin dapat berjalan efisien, efektif, dan juga tepat sasaran.

2.1.1. Pengertian Kemiskinan

Menurut (Yacoub, 2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar, karena kemiskinan menyangkut pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan dan kemiskinan merupakan masalah global karena kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi banyak negara. Menurut (World Bank, 2004) salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (*acceptable*). Di samping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang

dikategorikan miskin (*the poor*) tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai.

Secara etimologis, "kemiskinan" berasal dari kata "miskin" yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Badan Pusat Statistik mendefinisikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak lebih jauh disebutkan kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada dibawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan yang disebut garis kemiskinan (*proverty line*) atau disebut juga batas kemiskinan (*poverty treshold*).

2.1.2. Indikator dan Indeks Kedalaman Kemiskinan

Menurut Adisasmita, (2005) indikatorindikator kemiskinan yang digunakan secara umum adalah tingkat upah, pendapatan, konsumsi, mortalitas anak usia balita, imunisasi, kekurangan gizi anak, tingkat fertilitas, tingkat kematian ibu, harapan hidup rata-rata, tingkat penyerapan anak usia sekolah dasar, proporsi pengeluaran pemerintah untuk pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, pemenuhan bahan pangan (kalori/protein), air bersih, perkembangan penduduk, melek huruf, urbanisasi, pendapatan per kapita, dan distribusi pendapatan. Tolok ukur kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan pangan dan tingkat pendapatan yang rendah, akan tetapi melihat tingkat kesehatan, pendidikan dan perlakuan adil dimuka hukum dan sebagainya (Adisasmita,2015).

Sementara, Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index/P1*) adalah Ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Nilai agregat dari *poverty gap index* menunjukkan biaya mengentaskan kemiskinan dengan membuat target transfer yang sempurna terhadap penduduk miskin dalam hal tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat. Semakin kecil nilai *poverty gap index*, semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program. Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit (BPS, 2018).

2.1.3. Ukuran Kemiskinan

Kemiskinan memiliki banyak definisi, dan sebagian besar sering mengaitkan konsep kemiskinan dengan aspek ekonomi. Berbagai upaya untuk mendefinisikan kemiskinan dan mengidentifikasikan kemiskinan sebenarnya menghasilkan suatu konsep pemikiran yang dapat

bappelitbangda

disederhanakan. Pertama, dari sudut pandang pengukuran, kemiskinan dibedakan menjadi dua yaitu kemiskinan absolut dan relatif. Kedua dari sudut pandang penyebab, kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi kemiskinan alamiah dan struktural. Salah satu syarat penting agar suatu kebijakan pengentasan kemiskinan dapat tercapai maka harus ada kejelasan mengenai kriteria tentang siapa atau kelompok masyarakat mana yang masuk ke dalam kategori miskin dan menjadi sasaran program. Salain itu ada syarat yang juga harus dipenuhi yaitu harus dipamahi secara tepat mengenai penyebab kemiskinan itu sendiri di masing-masing komunitas dan daerah/wilayah. Karena penyebab ini tidak lepas dari adanya pengaruh nilai-nilai lokal yang melingkupi kehidupan masyarakatnya. Kemiskinan seringkali ditandai dengan tingginya tingkat pengangguran dan keterbelakangan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya terhadap kegiatan ekonomi sehingga akan tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi. Ukuran kemiskinan dilihat dari tingkat pendapatan dapat dikelompokkan menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif (Kartasamita, Ginandjar: 1996: 234-235).

Seseorang dikatakan miskin secara absolut apabila pendapatannya lebih rendah dari garis kemiskinan absolut atau dengan istilah lain jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Ukuran garis kemiskinan yang digunakan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) berdasarkan pendekatan kemiskinan absolut, dengan mengacu pada definisi kemiskinan oleh Sayogyo (2000). Diukur dengan menghitung jumlah penduduk yang memiliki pendapatan per kapita yang tidak mencukupi untuk mengkonsumsi barang dan jasa yang nilainya ekuivalen dengan 20 kg beras per kapita per bulan untuk daerah pedesaan, dan 30 kg beras untuk daerah perkotaan. Standar kecukupan pangan dihitung setara 2.100 kilo kalori per kapita per hari ditambah dengan pengeluaran untuk kebutuhan non makanan (perumahan, berbagai barang dan jasa, pakaian). Selama periode tahun 1970-an hingga awal tahun 1990-an Indonesia cukup berhasil menurunkan tingkat kemiskinan. Menurut World Bank (2006) tercatat pada periode tersebut *poverty head count rate* di Indonesia turun sampai dengan 28,6 persen. Ketika krisis ekonomi menimpa Indonesia pada pertengahan tahun 1997, angka kemiskinan kembali meningkat dan mencapai puncaknya pada tahun 1999 menjadi sebesar 23 persen, kemudian angka tersebut kembali turun menjadi 16 persen pada tahun 2005. Namun demikian tahun 2006 angka kemiskinan kembali meningkat sebesar 1,75 persen sehingga menjadi 17,75 persen. Salah satu pemicu kenaikan angka kemiskinan ini adalah naiknya harga beras sebagai akibat dari larangan impor beras (World Bank: 2006). Dampak dari adanya kenaikan harga beras dengan tingkat kemiskinan memang sangat erat karena beras

merupakan makanan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia terutama bagi mereka yang kurang mampu.

Kemiskinan relatif adalah keadaan perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat, yaitu antara kelompok yang mungkin tidak miskin karena mempunyai tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari garis kemiskinan, dan kelompok masyarakat yang relatif lebih kaya. Dengan menggunakan ukuran pendapatan, maka keadaan ini disebut sebagai ketimpangan distribusi pendapatan.

2.1.4. Penyebab Kemiskinan

Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan diantaranya; rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya derajat kesehatan, terbatasnya lapangan kerja, dan kondisi keterisolasian (Kartasasmita, Ginandjar: 1996: 240). Dalam laporan yang dikeluarkan dari World Bank (200) diketahui ada lima faktor yang dianggap dapat mempengaruhi terjadinya kemiskinan, yaitu; pendidikan, jenis pekerjaan, gender, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar dan infrastruktur dan lokasi geografis. Seperti yang dikemukakan oleh Nazara, Suahasil (2007:35) bahwa; Pertama, kemiskinan selalu dikaitkan dengan ketidakmampuan dalam mencapai pendidikan tinggi, hal ini berkaitan dengan mahalnya biaya pendidikan, walaupun pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan untuk membebaskan uang bayaran di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Menengah Pertama (SLTP), namun komponen biaya pendidikan lain yang harus dikeluarkan masih cukup tinggi, seperti uang buku dan seragam sekolah. Biaya yang harus di-keluarkan orang miskin untuk menyekolahkan anaknya juga harus termasuk biaya kehilangan dari pendapatan (apportunity cost) jika anak mereka bekerja (Nazara, Suahasil. Dalam Warta Demografi: 2007:35). Kedua, kemiskinan juga selalu dihubungkan dengan jenis pekerjaan tertentu. Di Indonesia kemiskinan selalu terkait dengan sektor pekerjaan di bidang pertanian untuk daerah pedesaan dan sektor informal di daerah perkotaan. Pada tahun 2004 terdapat 68,7 persen dari 36,10 juta orang miskin tinggal di daerah pedesaan dan 60 persen diantaranya memiliki kegiatan utama di sektor pertanian (Sudaryanto dan Rusastra: 2006), hal ini diperkuat dengan hasil studi yang dilakukan oleh Suryahadi et.al (2006), yang menemukan bahwa selama periode 1984 dan 2002, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan, sektor pertanian merupakan penyebab utama kemiskinan. Dalam studi tersebut juga ditemukan bahwa sektor pertanian menyumbang lebih dari 50 persen terhadap total kemiskinan di Indonesia dan ini sangat kontras jika dibandingkan dengan sektor jasa dan industri. Dengan demikian tingginya tingkat kemiskinan di sektor pertanian menyebabkan kemiskinan diantara kepala rumah tangga yang bekerja di sektor

pertanian menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang bekerja di sektor lainnya. Ketiga, hubungan antara kemiskinan dengan gender, di Indonesia sangat terasa sekali dimensi gender dalam kemiskinan, yaitu dari beberapa indikator kemiskinan seperti tingkat buta huruf, angka pengangguran, pekerja di sektor informal dan lain-lainnya, penduduk perempuan memiliki posisi yang lebih tidak menguntungkan daripada penduduk laki-laki (ILO : 2004). Keempat, hubungan antara kemiskinan dengan kurangnya akses terhadap berbagai pelayanan dasar infrastuktur, sistem infrastruktur yang baik akan meningkatkan pendapatan orang miskin secara langsung dan tidak langsung melalui penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, telekomunikasi, akses energi, air dan kondisi sanitasi yang lebih baik (Sida;1996). Kelima, lokasi geografis, ini berkaitan dengan kemiskinan karena ada dua hal. Pertama, kondisi alam yang terukur dalam potensi kesuburan tanah dan kekayaan alam. Kedua, pemerataan pembangunan, baik yang berhubungan dengan pembangunan desa dan kota, ataupun pembangunan antar povinsi di Indonesia. Selain itu dalam melihat kemiskinan ada dimensi lain yaitu dimensi bukan pendapatan, seperti rendahnya pencapain di bidang pendidikan dan penyediaan akses pada pelayanan dasar di berbagai daerah terutama di wilayah timur Indonesia, hal ini semakin mempertegas adanya kesenjangan berdasarkan lokasi geografis.

Faktor-faktor tersebut ada keterkaitan satu sama lainnya yang membentuk lingkaran kemiskinan. Rumah tangga miskin pada umumnya berpendidikan rendah dan terpusat di daerah pedesaan, karena berpendidikan rendah, maka produktivitasnyapun rendah sehingga imbalan yang akan diperoleh tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan. Akibatnya, rumah tangga miskin akan menghasilkan keluarga keluarga miskin pula pada generasi berikutnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa faktor penyebab kemiskinan sangat komplek dan saling mempengaruhi, artinya kemiskinan terjadi bukan disebabkan oleh satu faktor saja, tetapi multi faktor. Namun demikian secara garis besar faktor dominan yang mempengaruhi timbulnya kemiskinan diantaranya; pendidikan, pendapatan, lokasi, keterbatasan akses diantaranya akses ke kesehatan, keuangan dan pelayanan publik lainnya.

2.1.5. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Berbagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah yang diaplikasikan dalam wujud kebijakan dan program-program baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Kebijakan bersifat langsung yaitu berupa program yang langsung diberikan kepada penduduk miskin, contoh; bantuan tunai langsung (BLT), raskin, sedangkan kebijakan tidak langsung, contoh program Jamkesmas, program IDT, BOS. Walaupun telah

dilakukan berbagai upaya namun kemiskinan tidak dapat dihilangkan seluruhnya, artinya fenomena kemiskinan dengan mudah dapat dijumpai di hampir seluruh wilayah baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Program kemiskinan yang saat ini dilakukan baik yang berasal dari pemerintah maupun non pemerintah umumnya hanya sementara, artinya program tersebut akan berjalan selama masih ada anggaran (dana), setelah dana habis maka selesai pula kegiatan program. Dengan kata lain bahwa program-program kemiskinan yang selama ini dilaksanakan berdasarkan pada pendekatan projek dan bukan pendekatan program.Tidak heran jika program pengentasan kemiskinan tidak berkelanjutan, akhirnya angka kemiskinan secara absolut di Indonesia tetap saja tinggi.

Tampaknya dalam merumuskan sebuah kebijakan maupun program yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia perlu dilakukan beberapa tahapan kegiatan. Misalnya, diawali dengan assesment, dalam tahap ini dilakukan merumuskan atau mengkatagorikan dimensi-dimensi dan faktor penyebab kemiskinan, analisis kebutuhan dan potensi yang dapat dikembangkan, dan merumuskan bentuk-bentuk program yang diinginkan oleh penduduk miskin. Selain itu, dirumuskan pula pihakpihak yang dapat dilibatkan dalam kegiatan atau program kemiskinan, serta membuat jadwal pelaksanaannya. Setelah tahap ini selesai, maka dilanjutkan ke tahap pelaksanaan kegiatan dan diakhiri dengan tahap monitoring dan evaluasi. Seperti yang dikemukakan oleh Nazara, Suhasil (2007:37) menjelaskan tahapan-tahapan dalam merumuskan kebijakan sebagai berikut; Tahap pertama, melakukan diagnosis dan analisis tentang kemiskinan. Pada tahap ini dilakukan kegiatan melakukan pengukuran tingkat kemiskinan, penargetan dan penentuan jenis kebijakan atau program yang ingin dibuat. Tahap ke dua, adalah menentukan tujuan, target dan indikator yang ingin dicapai. Seperti yang dikemukakan, lebih lanjut oleh Suhasil Nazara (2007) ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan target, yaitu pertama; tujuan yang ingin dicapai harus menyesuaikan dengan standar internasional yaitu harus sesuai dengan tujuan MDGs. Kedua, dalam menentukan tujuan perlu memperhatikan distribusi pendapatan. Ketiga, tujuan ditentukan melalui proses partisipasi semua pihak. Keempat, tujuan ditentukan dengan menentukan ukuran pencapaian atau benchmark berdasarkan waktu yang tersedia. Kelima, dalam menetukan tujuan agar lebih tepat sasaran harus berdasarkan pada beberapa ukuran kemiskinan berbeda. Keenam, tujuan harus dibuat secara spesifik dengan program agar proses monitoring menjadi lebih mudah. Tahap ketiga, yaitu merancang dan meng-implementasikan program. Hasil dari tahap ini yaitu berupa peraturan, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis. Pada saat akan mengim-plementasikan program harus dimulai dengan kegiatan sosialisasi program pada tahap awal,

kemudian dilanjutkan dengan kegiatan monitoring selama program berlangsung, dan diakhiri dengan kegiatan evaluasi ketika program berakhir. Monitoring dilakukan untuk menyediakan informasi apakah kebijakan program diimplementasikan sesuai dengan rencana dalam upaya mencapai tujuan. Monitoring ini merupakan alat manajemen yang efektif, pada kegiatan ini jika implementasi program tidak sesuai dengan rencana maka dapat mengidentifikasi letak masalahnya kemudian dicari penyelesaiannya. Sedangkan evaluasi berfungsi untuk melihat dampak dengan mengisolasi efek suatu intervensi. Kebijakan dalam upaya pengentasan kemiskinan tentunya dalam implementasi melalui program-program yang berbasis pada penggalian potensi yang ada di masyarakat itu sendiri. Artinya perlu melibatkan peran serta masyarakat dalam melaksanakan program, dan pemerintah berperan sebagai fasilitator. Selain itu perlu juga dirumuskan strategi untuk keberlangsungan program (kegiatan) di masyarakat yang didukung dengan adanya koordinasi antara instansi terkait. Berbagai program telah banyak dilakukan, namun terkesan hanya dapat mengatasi masalah sesaat dan tidak mengatasi akar masalahnya, sehingga relatif lambat dalam upaya mengatasi kemiskinan. Mungkin perlu dirumuskan bentuk program yang lebih rasional dan efektif misalnya, dengan merumuskan model perlindungan sosial.

2.1.6. Kekeliruan Paradigma Penanggulangan Kemiskinan

Paradigma yang Keliru Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini hasilnya masih belum sesuai harapan semua pihak. Evaluasi penanganan tampaknya masih memperlihatkan beberapa kekeliruan paradigmatik (Huraerah, 2005):

1. Masih berorientasi pada aspek ekonomi daripada aspek multidimensional. Penanggulangan kemiskinan dengan fokus perhatian pada aspek ekonomi terbukti mengalami kegagalan, karena pengentasan kemiskinan yang direduksi dalam soal-soal ekonomi tidak akan mewakili persoalan kemiskinan yang sebenarnya. Dalam konteks budaya, orang miskin diindikasikan dengan terlembaganya nilai-nilai seperti apatis, apolitis, fatalistik, ketidakberdayaan, dsb. Sementara dalam konteks dimensi struktural atau politik, orang yang mengalami kemiskinan ekonomi pada hakekatnya karena mengalami kemiskinan struktural dan politis.
2. Lebih bernuansa karitatif (kemurahan hati) ketimbang produktivitas. Penanggulangan kemiskinan yang hanya didasarkan atas karitatif, tidak akan muncul dorongan dari masyarakat miskin sendiri untuk berupaya bagai- mana mengatasi kemiskinannya. Mereka akan selalu menggantungkan diri pada bantuan yang diberikan pihak lain. Padahal program penanggulangan kemiskinan seharusnya diarahkan supaya mereka menjadi produktif

3. Memosisikan masyarakat miskin sebagai objek daripada subjek. Seharusnya, mereka dijadikan sebagai subjek, yaitu sebagai pelaku perubahan yang aktif terlibat dalam aktivitas program penanggulangan kemiskinan.
4. Pemerintah masih sebagai penguasa daripada fasilitator. Dalam penanganan kemiskinan, pemerintah masih bertin- dak sebagai penguasa yang kerapkali turut campur tangan terlalu luas dalam kehidupan orang-orang miskin. Sebaliknya, pemerintah semestinya bertindak sebagai fasilitator, yang tugasnya mengembangkan potensi-potensi yang mereka miliki. Dalam hal ini, Suharto (2003) mengatakan bahwa paradigma baru menekankan "apa yang dimiliki orang miskin" ketimbang "apa yang tidak dimiliki orang miskin". Potensi orang miskin tersebut bisa berbentuk aset personal dan sosial, serta berbagai strategi penanganan masalah (*coping strategies*) yang telah dijalankannya secara lokal.

2.1.7. Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Mencermati beberapa kekeliruan paradigmatik penanggulangan kemiskinan tadi, ada strategi yang harus dilakukan untuk mengatasi kemiskinan (Huraerah, 2005):

1. Karena kemiskinan bersifat multi· dimensional, maka program pengentasan kemiskinan seyogyanya juga tidak hanya memprioritaskan aspek ekonomi tapi memperhatikan dimensi lain. Dengan kata lain, pemenuhan kebutuhan pokok memang perlu mendapat prioritas, namun juga harus mengejar target mengatasi kemiskinan nonekonomik. Strategi pengentasan kemiskinan hendaknya diarahkan untuk mengikis nilai-nilai budaya negatif seperti apatis, apolitis, fatalistik, ketidakberdayaan, dan sebagainya. Apabila budaya ini tidak dihilangkan, kemiskinan ekonomi akan sulit untuk ditanggulangi. Selain itu, langkah pengentasan kemiskinan yang efektif harus pula mengatasi hambatan - hambatan yang sifatnya struktural dan politis.
2. Untuk meningkatkan kemampuan dan mendorong produktivitas, strategi yang dipilih adalah peningkatan kemampuan dasar masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan melalui langkah perbaikan kesehatan dan pendidikan, peningkatan keterampilan usaha, teknologi, perluasan jaringan kerja (networking), serta informasi pasar.
3. Melibatkan masyarakat miskin dalam keseluruhan proses penanggulangan kemiskinan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi, bahkan pada proses pengambilan keputusan.
4. Strategi pemberdayaan. Kelompok agrarian populism yang dipelopori kelompok pakar dan aktivis LSM, menegaskan, masyarakat miskin adalah kelompok yang mampu membangun

dirinya sendiri jika pemerintah mau memberi kebebasan bagi kelompok itu untuk mengatur dirinya.

2.2. KONSEP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

2.2.1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*" (Chambers, 1995). Lahirnya konsep pemberdayaan sebagai antitesa terhadap model pembangunan yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut: *Pertama;* bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan kekuasaan faktor produksi; *kedua;* pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat pengusaha pinggiran; *ketiga* kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan sistem ideologi yang manipulatif untuk memperkuat legitimasi; dan *keempat* pelaksanaan sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan ideologi secara sistematik akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya.

Dalam konsep pemberdayaan, manusia adalah subyek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal. Menurut Sumodiningrat (1999), bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasamenyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Mubyarto (1998) menekankan bahwa terkait erat dengan pemberdayaan ekonomi rakyat. Dalam proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumberdaya manusia (di pedesaan), penciptaan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menentukan jenis usaha, kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan lembaga dan sistem pelayanan dari, oleh dan untuk masyarakat setempat.

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan

bappelitbangda

diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pekerjaan memberdayakan adalah memampukan serta memandirikan masyarakat. Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Dalam kerangka pikiran itu, upaya memberdayakan masyarakat, dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu:

Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang *(enabling).* Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang samasekali tanpa daya, karena, kalau demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong memotivasikan dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat *(empowering).* Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan *(input),* serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang *(opportunities)* yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar baik fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di perdesaan, di mana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat kurang. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku untuk semua, tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan

bappelitbangda

nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasiannya ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Sungguh penting di sini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan dan pengamalan demokrasi. Friedman (1992) menyatakan "*The empowerment approach, which is fundamental to an alternative development, places the emphasis on autonomy in the decision-marking of territorially organized communities, local self-reliance (but not autarchy), direct (participatory) democracy, and experiential social learning*".

Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian *(charity)*. Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati, harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain). Dengan demikian, tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara sinambung.

2.2.2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat yang efektif membuat masyarakat menjadi berdaya, yaitu masyarakat menjadi lebih dinamis, lebih adaptif terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya, lebih mampu akses teknologi tepat guna, luas wawasan, kosmopolit, dan empati terhadap pihak luar. Perubahan dari sistem sosial tradisional tersebut terjadi melalui proses penyadaran dan partisipatif (Sumardjo, 2010). Dalam pemberdayaan masyarakat perlu memperhatikan peluang, ancaman, permasalahan dan potensi sumberdaya lokal yang ada, seperti yang telah diuraikan pada pokok bahasan sebelumnya.

Peluang yang dapat dikembangkan, misalnya: (1) kerjasama dalam pemanfaatan kontribusi perusahaan dalam pembangunan masyarakat melalui alokasi dana CSR yang

bappelitbangda

terencana dalam jangka menengah maupun jangka panjang, (2) memanfaatkan dana APBD yang tersedia dengan mengoptimalkan peran penyuluh, dan (3) memanfaatkan keberadaan lembaga perguruan tinggi dan kelembagaan lembaga swadaya masyarakat melalui pengembangan kemitraan sinergis antara peran Pemerintah Daerah, Swasta, Masyarakat dan Perguruan Tinggi. Dalam hal pemberdayaan masyarakat ini penting kehadiran agen pemberdayaan seperti penyuluh atau fasilitator pemberdaya sangat diperlukan untuk berfungsi sebagai pendamping pengembangan masyarakat.

Bagaimana peran penyuluh sebagai pemberdaya bagi masyarakat tradisional adalah (Sumardjo, 2010):

1. Membangkitkan kebutuhan untuk berubah
2. Mengunakan hubungan untuk perubahan
3. Mendiagnosis masalah
4. Mendorong motivasi untuk berubah
5. Merencanakan tindakan pembaharuan
6. Memelihara program pembaharuan dan mencegah stagnasi
7. Mengembangkan kapasitas kelembagaan
8. Mencapai hubungan terminal untuk secara dinamis mengembangkan proses perubahan yang lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan.

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pengembangan kesempatan, kemauan/motivasi, dan kemampuan masyarakat untuk dapat lebih akses terhadap sumberdaya, sehingga meningkatkan kapasitasnya untuk menentukan masa depan sendiri dengan berpartisipasi dalam mempengaruhi dan mewujudkan kualitas kehidupan diri dan komunitasnya. Tujuan jangka pendek pemberdayaan sebaiknya jelas (*spesific*), terukur (*measurable*), sederhana (*relistic*), sehingga merupakan kondisi yang mendorong minat masyarakat untuk mewujudkannya (*achievable*) dalam waktu tertentu.

Tujuan pemberdayaan yang lebih kompleks perlu ada dan sebaiknya ditetapkan sebagai tujuan dalam jangka panjang (*vision*). Visi yang jelas berpotensi untuk menjadi pemandu kegiatan kerjasama diantara masyarakat untuk menetapkan tujuan-tujuan jangka pendek pemberdayaan, sehingga proses pemberdayaan menjadi lebih terarah, efektif dan efisien. Hal ini disebabkan setiap proses pemberdayaan menuju pada suatu kondisi kehidupan di masa yang akan datang yang lebih jelas (Sumardjo, 2009).

Tujuan pemberdayaan seyogyanya didasarkan pada kebutuhan riil (*real-needs*) masyarakat danbukan hanya sekedar kebutuhan yang dirasakan (*felt-need*). Idealnya kebutuhan yang dirasakan masyarakat adalah kebutuhan riilnya. Oleh karena itu, siapapun pelaku

bappelitbangda

pemberdaya semestinya mampu mengenali dengan baik kebutuhan riil masyarakat dan secara dialogis dikomunikasikan sedemikian rupa dengan masyarakat sehingga menjadi kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat. Dalam kontek penerapan tanggungjawab sosial perusahaan yang akhir-akhir ini cukup banyak dikembangkan, kebutuhan yang diangkat sebagai tujuan dalam pemberdayaan seyogyanya merupakan konsensus antara pihak-pihak yang mendefinisikan kebutuhan, misalnya pemerintah, perusahaan, masyarakat/LSM dan pemberdaya atau pemberi pelayanan serta akademisi/peneliti.

Peran pemberdaya mengupayakan dialog antara para pendefinisi kebutuhan sehingga diperoleh konsensus mengenai kebutuhan masyarakat secara partisipatif. Diutamakan, pendefinisian kebutuhan oleh masyarakat sendiri, dengan cara mengajak orang untuk berdialog dan mengembangkan kemampuan warga untuk mengartikulasikan kebutuhan mereka yang sesungguhnya (Sumardjo, 2009). Salah satu prinsip penting dalam pemberdayaan adalah menghargai lokal (*valuing the local*).

Prinsip-prinsip ini tersirat oleh gagasan pembangunan yang bersifat "bottom up". Prinsip-prinsip ini berpusat pada gagasan untuk menghargai pengetahuan lokal, nilai-nilai, keyakinan, ketrampilan, proses dan sumber daya suatu masyarakat. Dengan demikian lebih mudah meyakinkan masyarakat dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan tersebut (Sumardjo, 2007). Peran pemberdaya penting dalam proses pemberdayaan, yaitu melakukan hal-hal berikut: (1) analisis situasi, potensi, permasalahan dan kebutuhan, kini dan ke depan, (2) mengembangkan penyadaran kemungkinan timbulnya masalah (*realneeds*), (3) mengembangkan pengetahuan, (4) wawasan dan menyusun kerangka berfikir/ bertindak, (5) mengembangkan alternatif tindakan yang tepat bagi upaya peningkatan nilai tambah usaha tani, (6) mendampingi dalam proses pengambilan keputusan usahatani yang dikelola secara optimal, (7) mengembangkan motivasi pelaku utama dan pelaku usaha, (8) mengevaluasi dan mengembangkan kompetensi pelaku utama, dan (9) mengembangkan kemandirian melalui peningkatan perilaku dan peningkatan kapasitas kelembagaan sosial-ekonomi petani secara partisipatif (Sumardjo, 2007 diadaptasi dari Chambers).

2.2.3. Aspek-aspek Pemberdayaan Masyarakat

Dalam kerangka ini upaya untuk memberdayakan masyarakat (empowering) dapat dikaji dari 3 (tiga) aspek:

Pertama, ***ENABLING*** yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Asumsinya adalah pemahaman bahwa setiap orang, setiap masyarakat mempunyai potensi yang dapat dikembangkan artinya tidak ada orang atau

masyarakat tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat serta upaya untuk mengembangkannya.

Kedua, ***EMPOWERING*** yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya. Upaya yang paling pokok dalam empowerment ini adalah meningkatkan taraf pendidikan dan derajat kesehatan serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi (modal, teknologi, informasi, lapangan keja, pasar) termasuk pembangunan sarana dan prasarana dasar seperti (irigasi, jalan, listrik, sekolah, layanan kesehatan) yang dapat dijangkau lapisan masyarakat paling bawah yang keberdayaannya sangat kurang. Oleh karena itu diperlukan program khusus, karena program-program umum yang berlaku untuk semua tidak selalu menyentuh kepentingan lapisan masyarakat seperti ini.

Ketiga, ***PROTECTING*** yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya merupakan unsur penting, sehingga pemberdayaan masyarakat sangat erat hubungannya dengan pementapan, pembudayaan dan pengalaman demokrasi (Friedmann, 1994). Pendekatan pemberdayaan pada intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung, demokratis dan pembelajaran sosial. Dalam hal ini Friedmann (1994) menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak hanya sebatas bidang ekonomi saja tetapi juga secara politis, sehingga pada akhirnya masyarakat akan memiliki posisi tawar (*bargaining position*) baik secara nasional maupun internasional. Sebagai titik fokusnya adalah aspek lokalitas, karena *civil society* akan merasa lebih siap diberdayakan lewat isu-isu lokal.

2.2.4. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Ife (1995: 61-64), pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan di sini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas: 1) Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup: kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan; 2) Pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya; 3) Ide atau gagasan: kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan; 4) Lembaga-lembaga: kemampuan

bappelitbangda

menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan; 5) Sumber-sumber: kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan; 6) Aktivitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa; 7) Reproduksi: kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.

Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan di atas dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan. Parsons, et al., (1994) menyatakan, bahwa proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif. Menurutnya, tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu-lawan-satu antara pekerja sosial dan klien dalam setting pertolongan perseorangan. Meskipun pemberdayaan seperti ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan diri klien, hal ini bukanlah strategi utama pemberdayaan. Karenanya, dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan: mikro, mezzo, dan makro.

Pendekatan Mikro, pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, stress management. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai Pendekatan yang Berpusat pada Tugas. *Pendekatan Mezzo*, pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Dalam hal ini masyarakat tidak sekedar sebagai obyek melainkan masyarakat diberi ruang gerak yang sangat luas dalam menyampaikan segala permasalahan yang dihadapinya. *Pendekatan Makro*, pendekatan ini disebut juga sebagai Strategi Sistem Besar (*largesystem strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Pendekatan ini memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

Dubois dan Miley (1992) memberi beberapa cara atau teknik yang lebih spesifik yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat: *pertama*, membangun relasi pertolongan yang: (a) merefleksikan respon empati; (b) menghargai pilihan dan hak klien menentukan nasibnya sendiri (*self-determination*); (c) menghargai keberbedaan dan keunikan individu; (d)

menekankan kerjasama klien (*client partnerships*); *kedua*, membangun komunikasi yang: (a) menghormati martabat dan harga diri klien; (b) mempertimbangkan keragaman individu; (c) berfokus pada klien; (d) menjaga kerahasiaan klien; *ketiga*, terlibat dalam pemecahan masalah yang: (a) memperkuat partisipasi klien dalam semua aspek proses pemecahan masalah; (b) menghargai hak-hak klien; (c) merangkai tantangan-tantangan sebagai kesempatan belajar; (d) melibatkan klien dalam pembuatan keputusan dan evaluasi; *keempat*, mereflesikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial melalui: (a) ketaatan terhadap kode etik profesi; (b) keterlibatan dalam pengembangan profesional, riset, dan perumusan kebijakan; (c) penterjemahan kesulitan-kesulitan pribadi ke dalam isu-isu publik; (d) penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan.

Strategi pembangunan yang bertumpu pada pemihakan dan pemberdayaan dipahami sebagai suatu proses transformasi dalam hubungan sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat. Perubahan struktural yang diharapkan adalah proses yang berlangsung secara alamiah, yaitu yang menghasilkan harus menikmati. Begitu pula sebaliknya yang menikmati haruslah yang menghasilkan. Teori-teori ekonomi makro, yang umumnya bersandar pada peran pasar dalam alokasi sumber daya, serta dengan pra anggapan bahwa kebijaksanaan ekonomi makro yang tepat akan menguntungkan semua lapisan masyarakat, dalam kenyataannya tidak dapat menghasilkan jawaban yang memuaskan bagi masalah kesenjangan.

Kekuatan sosial yang tidak berimbang, menyebabkan kegagalan pasar untuk mewujudkan harapan itu (Brown, 1995). Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang tepat, agar kebijaksanaan pada tingkat makro mendukung upaya mengatasi kesenjangan yang harus dilakukan dengan kegiatan yang bersifat mikro dan langsung ditujukan pada lapisan masyarakat terbawah. Pemberdayaan masyarakat dapat dipandang sebagai jembatan bagi konsep-konsep pembangunan makro dan mikro. Dalam kerangka pemikiran itu berbagai *input* seperti dana, prasarana dan sarana yang dialokasikan kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan harus ditempatkan sebagai rangsangan untuk memacu percepatan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Proses ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat *(capacity building)* melalui pemupukan modal yang bersumber dari surplus yang dihasilkan dan pada gilirannya dapat menciptakan pendapatan yang dinikmati oleh rakyat. Proses transformasi itu harus digerakkan oleh masyarakat sendiri.

Pengertian pemupukan modal seperti itu menunjukkan bahwa bantuan dana, prasarana, dan sarana harus dikelola secara tertib dan transparan dengan berpegang pada lima prinsip pokok, yaitu: *Pertama*, mudah diterima dan didayagunakan oleh masyarakat sebagai pelaksana dan pengelola (*acceptable*); *kedua*, dapat dikelola oleh masyarakat secara terbuka dan dapat

dipertanggungjawabkan (*accountable*); *ketiga*, memberikan pendapatan yang memadai dan mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis (*profitable*); *keempat*, hasilnya dapat dilestarikan oleh masyarakat sendiri sehingga menciptakan pemupukan modal dalam wadah lembaga sosial ekonomi setempat (*sustainable*); dan *kelima*, pengelolaan dana dan pelestarian hasil dapat dengan mudah digulirkan dan dikembangkan oleh masyarakat dalam lingkup yang lebih luas (*replicable*).

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri.

Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut:

Pertama, upaya itu harus terarah (*targetted*). Ini yang secara populer disebut pemihakan. Ia ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya.

Kedua, program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni supaya bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu sekaligus meningkatkan keberdayaan *(empowering)* masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya.

Ketiga, menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas kalau penanganannya dilakukan secara individu. Karena itu seperti telah disinggung di muka, pendekatan kelompok adalah yang paling efektif, dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien. Di samping itu kemitraan usaha antara kelompok tersebut dengan kelompok yang lebih maju harus terus-menerus di bina dan dipelihara secara sating menguntungkan dan memajukan.

2.2.5. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Huraerah (2008:87) mengungkapkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim disebut *community self-reliance* atau kemandirian. Dalam proses ini masyarakat didampingi untuk membuat analisis masalah yang dihadapi, dibantu untuk menemukan alternatif solusi masalah tersebut, serta diperlihatkan strategi memanfaatkan berbagai kemampuan yang dimiliki.

Strategi pemberdayaan masyarakat menurut Suharto (2005:66-67) yaitu sebagai berikut:

1. Aras Mikro: pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*), yaitu pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu, bimbingan, konseling, *stress management*, dan *crisis intervention*.
2. Aras Mezzo, yaitu pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi: pendidikan dan latihan, dinamika kelompok.
3. Aras Makro: strategi sistem besar (*large-system strategy*), yaitu perubahan diarahkan pada linglungan yang lebih luas, perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksis sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik.

Bagaimana strategi atau kegiatan yang dapat diupayakan untuk mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat? Ada beberapa strategi yang dapat menjadi pertimbangan untuk dipilih dan kemudian diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat.

Pertama: menciptakan iklim, memperkuat daya, dan melindungi. Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu: pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di perdesaan, dimana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat kurang. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasiannya ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Yang terpenting disini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan

bappelitbangda

masyarakatnya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan, pengamalan demokrasi.

Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain). Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

2.2.6. Mekanisme Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat harus melibatkan segenap potensi yang ada dalam masyarakat. Beberapa aspek di antaranya dapat diketengahkan sebagai berikut:

Pertama, peranan pemerintah teramat penting. Berarti birokrasi pemerintah harus dapat menyesuaikan dengan misi ini. Dalam rangka ini ada beberapa upaya yang harus dilakukan:

1) Birokrasi harus memahami aspirasi rakyat dan harus peka terhadap masalah yang dihadapi oleh rakyat.
2) Birokrasi harus membangun partisipasi rakyat. Artinya, berilah sebanyak-banyaknya kepercayaan pada rakyat untuk memperbaiki dirinya sendiri. Aparat pemerintah membantu memecahkan masalah yang tidak dapat diatasi oleh masyarakat sendiri.
3) Untuk itu maka birokrasi harus menyiapkan masyarakat dengan sebaiknya, baik pengetahuannya maupun cara bekerjanya, agar upaya pemberdayaan masyarakat dapat efektif. Ini merupakan bagian dari upaya pendidikan sosial untuk memungkinkan rakyat membangun dengan kemandirian.
4) Birokrasi harus membuka dialog dengan masyarakat. Keterbukaan dan konsultasi ini amat perlu untuk meningkatkan kesadaran (*awareness*) masyarakat, dan agar aparat dapat segera membantu jika ada masalah yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh rakyat.

5) Birokrasi harus membuka jalur informasi dan akses yang diperlukan oleh masyarakat yang tidak dapat diperolehnya sendiri.
6) Birokrasi harus menciptakan instrumen peraturan dan pengaturan mekanisme pasar yang memihak golongan masyarakat yang lemah.

Untuk dapat menjalankan misinya, maka birokrasi harus: (1) ditingkatkan kewenangannya sampai di lapisan terendah, (2) ditingkatkan kualitasnya, agar benar -benar mampu memberikan bimbingan dan pemberdayaan masyarakat. Terutama titik berat harus diberikan kepada aparat pada tingkat yang langsung berhadapan dengan masyarakat.

Kedua, organisasi-organisasi kemasyarakatan di luar lingkungan masyarakat sendiri. Di sini yang mempunyai potensi berperan besar adalah lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM), di samping organisasi-organisasi kemasyarakatan yang bersifat nasional dan lokal. LSM dapat berfungsi sebagai pelaksana program pemerintah (mewakili pemerintah), dapat menjadi pembantu (konsultan) pemerintah, tetapi dapat juga menjadi pembantu rakyat dalam program pemerintah. Sebaliknya LSM, sesuai dengan namanya, dapat pula mengembangkan programnya sendiri. Dalam rangka ini, aparat setempat harus menjalin kerjasama erat dengan LSM, agar program LSM dapat bersinergi dengan program pemerintah, atau sekurang-kurangnya tidak terjadi kesimpangsiuran yang dapat mengakibatkan benturan yang hanya akan merugikan rakyat. LSM harus diperlakukan sebagai mitra pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Tentunya yang dimaksudkan di sini adalah LSM yang murni dan bukan kepanjangan tangan dari kepentingan politik yang hanya menggunakan rakyat sebagai alat politik.

Ketiga, lembaga masyarakat yang tumbuh dari dan di dalam masyarakat itu sendiri, atau sering disebut sebagai *local community organization*. Lembaga ini dapat bersifat semi atau kuasiformal seperti PKK atau Karang Taruna, atau yang benar-benar tumbuh dari masyarakat sendiri seperti kelompok arisan, kelompok sinoman, kelompok paketan dan sebagainya. Kelembagaan dalam masyarakat tersebut sebaiknya dikembangkan oleh masyarakat sendiri. Misalnya, kelompok-kelompok masyarakat (pokmas) yang terdiri dari atas 10 sampai 30 kepala keluarga. Kelompok-kelompok masyarakat serupa itu adalah yang paling efektif untuk upaya pemberdayaan masyarakat, oleh karena tumbuh dan berakar dari kalangan masyarakat sendiri. Secara sendiri-sendiri penduduk miskin sulit dapat mengatasi hambatan yang menyebabkan kemiskinannya. Secara bersama-sama, mereka dapat saling memperkuat dan saling menutupi kelemahan. Dinamika kelompok dan sinergi diharapkan dapat menghasilkan nilai dari upaya individual dalam kelompok.

Keempat, koperasi. Koperasi merupakan wadah ekonomi rakyat yang secara khusus dinyatakan dalam konstitusi sebagai bangun usaha yang paling sesuai untuk demokrasi ekonomi Indonesia. Koperasi dapat merupakan wahana yang efektif bagi upaya pemberdayaan masyarakat, dengan membangun manusia modern namun dengan dasar-dasar kekeluargaan dan kegotongroyongan yang menjadi ciri demokrasi Indonesia. Koperasi harus menjadi sasaran bagi pengembangan kelompok masyarakat yang sudah dapat melampaui tahap awal kerjasama dan kerja bersama dalam kelompok. Formalisasi kelompok sebagai badan *(entity)* ekonomi harus diarahkan ke dalam bentuk koperasi. Namun, untuk itu kelompok dan anggota-anggotanya harus benar-benar dipersiapkan, agar bentuk koperasi dapat sungguh-sungguh menunjang upaya meningkatkan kegiatan usaha para anggota yang dilakukan secara bersama.

Kelima, pendamping. Penduduk miskin pada umumnya mempunyai keterbatasan dalam mengembangkan dirinya. Oleh karena itu, diperlukan pendamping untuk membimbing penduduk miskin dalam upaya memperbaiki kesejahteraannya. Pendamping bertugas menyertai proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok masyarakat sebagai fasilitator, komunikator, ataupun dinamisator. Lingkup pembinaan yang dilakukan para pendamping meliputi upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, yakni kualitas para anggota dan pengurus kelompok serta peningkatan kemampuan usaha anggota. Untuk maksud tersebut, pendamping perlu mengenal dan mengadakan komunikasi yang intensif dengan kelompok. Pendamping yang paling efektif adalah dari anggota masyarakat itu sendiri, yaitu anggota masyarakat yang telah lebih sejahtera dan telah berhasil dalam kehidupan dan kegiatan ekonominya. Untuk dapat melaksanakan tugasnya secara efektif, pendamping harus siap bekerja setiap waktu, menghadiri pertemuan kelompok, mengorganisasikan program latihan, serta membantu kelompok dalam memperoleh akses terhadap berbagai pelayanan yang dibutuhkan.

Keenam, pemberdayaan masyarakat harus dicerminkan dalam proses perencanaan pembangunan nasional, sebagai aliran dari bawah ke atas.

Ketujuh, keikutsertaan masyarakat yang lebih mampu, khususnya dunia usaha dan swasta. Pemberdayaan masyarakat dapat lebih optimal jika terjadi keterkaitan dalam kemitraan usaha di antara yang telah mampu dengan yang masih tertinggal terutama melalui penyediaan modal usaha untuk pengembangan usaha penduduk miskin.

2.2.7. Model Pemberdayaan Masyarakat

Penelitian yang dilakukan oleh Pudji Muljono, Burhanuddin, dan Yannefri Bakhtiar (2009) yang berjudul *"Upaya Pemberdayaan masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan*

bappelitbangda

Melalui Model Posdaya (Pos Pemberdayaan Keluarga)" ini bertujuan untuk menerapkan konsep pemberdayaan masyarakat melalui model pos pemberdayaan keluarga (Posdaya) dalam upaya pembangunan sosial dan ekonomi keluarga untuk pengentasan kemiskinan secara sitematis. Lokasi penelitian ini adalah semua posdaya binaan IPB dengan cakupan wilayah Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan analisis kinerja dan identifikasi permasalahan dalam pengelolaan posdaya, maka dapat disusun berbagai rencana aksi pengembangan posdaya, antara lain: (1) perlunya pelatihan untuk meningkatkan kualitas pengurus/dan kader posdaya, (2) resosialisasi posdaya secara vertikal dan horisontal ke seluruh pihak, (3) membangun jejaring usaha produktif untuk lebih memacu pertumbuhan usaha ekonomi masyarakat, (4) pembelajaran dan pemotivasian pengurus/kader posdaya melalui kegiatan ***study*** banding dan ***bechmarking*** ke posdaya lain, (5) pengembangan koperasi posdaya sebagai wadah kegiatan ekonomi masyarakat.

Sementara, menurut Susi Ratnawati (2011) dalam tulisannya yang berjudul *"Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Perdesaan Melalui Pengembangan Kewirausahaan",* ada lima faktor yang saling berhubungan yang berpengaruh dalam pemberdayaan perempuan yaitu, *kesejahteraan, akses sumberdaya, partisipasi, kesadaran kritis dan kontrol.* Apapun upaya yang akan dilakukan dalam memberdayakan perempuan, sudah semestinya mencakup kelima hal diatas, termasuk dalam pengembangan lembaga keuangan mikro sebagai salah satu sumber daya ekonomi bagi mereka. Tujuan Pemberdayaan perempuan Miskin melalui kewirausahaan adalah untuk meningkatkan tarafhidup keluarga serta meningkatnya partisipasi termasuk kelompok perempuan dalam proses pembangunan. Melalui berbagai langkah antara lain:

1. Penyadaran kritis tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warganegara, dan peran perempuan dalam pembangunan.
2. Mencerdaskan perempuan perdesaan, agar menyadari potensi dan kelemahan mereka dan lingkungannya, menyangkut kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan serta kesehatan dan pendidikan) dan hak mereka dalam partisipasi pembangunan di daerahnya, serta menjadikan mereka mampu menemukan alternatif solusi yang dapat direalisasi.
3. Memberikan ruang dan kesempatan bagi partisipasi perempuan dalam setiap tahap pelaksanaan program (perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelestarian).
4. Menjadikan perempuan seorang wirausaha yang handal serta mandiri.

Selanjutnya, Susi Ratnawati (2011) mengungkapkan tentang model pemberdayaan perempuan miskin perdesaan melalui pengembangan kewirausahaan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga dan menyimpulkan bahwa upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan perempuan miskin perdesaan menyangkut pada persoalan bagaimana upaya pemberdayaan perempuan miskin perdesaan melalui kewirausahaan yang dilakukan dapat menjamin para pelaku ekonomi rakyat memperoleh apa yang menjadi hak mereka, khususnya kesejahteraan dan taraf kehidupan yang layak. Dengan model pemberdayaan kewirausahaan melalui pendekatan kelompok dan diversifikasi usaha diharapkan para perempuan miskin akan dapt meningkatkan kesejahteraan keluarganya dengan menjadi seorang wirausaha.

2.3. KONSEP KOPERASI DAN UMKM

2.3.1. Ruang Lingkup Koperasi

2.3.1.1. Pengertian dan Prinsip Koperasi

Menurut Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2021 tentang, Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, Koperasi adalah : Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasaikan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi-rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Menurut Kertasapoetra, dkk (2003:1), mendefinisikan secara umum yang dimaksud dengan koperasi adalah: “Suatu badan usaha berbidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berokonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, kewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.”

Ikatan Akuntan Indonesia wilayah Sumatera Selatan (2012:175) dalam bukunya berjudul “Pengantar Akuntansi Berbasis SAK ETAP” mengartikan koperasi merupakan: “Suatu usaha yang terdiri dari kumpulan orang-orang bukan modal, artinya aktivitas koperasi harus benar-benar mengutamakan kesejahteraan anggota.”

Jadi, dari beberapa pengertian diatas penulis dapat simpulkan bahwa koperasi merupakan badan usaha bergerak dalam bidang perekonomian untuk memperbaiki nasib penghidupan yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggota koperasi sebagai modal untuk menjalankan usaha yang berasaskan kekeluargaan.

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 04/PER/M.KUKM/VII/2012 Prinsip koperasi merupakan satu kesatuan sebagai landasan kehidupan koperasi, terdiri dari :

1. Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
5. Kemandirian.
6. Pendidikan perkoperasian.
7. Kerjasama antar koperasi.

Sedangkan menurut International Cooperative Alliance (ICA) dalam Kusnadi (2005:3-4), prinsip koperasi terbaru yang dikembangkan yaitu:

1. Keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela.
2. Pengelolaan secara demokratis.
3. Partisipasi anggota dalam ekonomi.
4. Kebebasan dan otonomi.
5. Mengembangkan pendidikan, pelatihan, dan informasi.
6. Kerjasama antarkoperasi.
7. Bekerja untuk kepentingan komunitas.

Berdasarkan prinsip-prinsip koperasi yang dijelaskan dari beberapa sumber, pada dasarnya sama saja isinya. Sehingga, keseluruhan prinsip koperasi tersebut merupakan esensi dan dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas koperasi yang membedakannya dari badan usaha lain.

2.3.1.2. Tujuan Koperasi

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 04/PER/M.KUKM/VII/2012, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Untuk itu koperasi mempunyai fungsi dan peran untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan usaha anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan usahanya.

Sementara, menurut Trisnawani (2009:1), menyatakan bahwa usaha koperasi mempunyai tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat di sekitar.

bapelitbangda

Hal ini berarti bahwa koperasi diharapkan dapat tumbuh menjadi lembaga yang kuat dan menjadi wadah untuk pembinaan kemampuan usaha golongan ekonomi lemah.

Berdasarkan pernyataan beberapa sumber mengenai tujuan koperasi, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar merupakan tujuan utama dari koperasi. Sehingga, kemampuan perekonomian anggota dan masyarakat sekitar dapat dikembangkan.

2.3.1.3. Fungsi Koperasi

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, fungsi dan peran koperasi adalah:

1. Membangun dan mengembangkan potesi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perkonomian nsional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perkonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Sedangkan menurut Kartasapoetra (2013:4), fungsi (peran dan tugas) Koperasi Indonesia tegasnya sebagai berikut:

1. Mempersatukan, mengarahkan dan mengembangkan daya kreasi, daya cipta, serta daya usaha rakyat, terutama mereka yang serba terbatas kemampuan ekonomminya agar mereka dapat turut serta dalam kegiatan perekonomian.
2. Koperasi bertugas meningkatkan pendapatan dan menimbulkan pembagian yang adil dan merata atas pendapatan tersebut.
3. Koperasi bertugas mempertinggi taraf hidup dan kecerdasan bangsa Indonesia
4. Koperasi berperan serta secara aktif dalam membina kelangsungan perkembangan demokrasi ekonomi.
5. Koperasi berperan serta secara aktif dalam menciptakan atau membuka lapangan kerja baru.

Berdasarkan beberapa fungsi tersebut pada dasarnya fungsi koperasi yaitu untuk meningkatakn perekonomian anggota dan masyarakat sekitar sehingga kualitas dan taraf hidup anggota koperasi semakin maju.

bappelitbangda

2.3.1.4. Pengelompokkan Koperasi

Menurut Subandi (2013:35), penggolongan koperasi ialah pengelompokkan kelompok-kelompok tertentu berdasarkan kriteria dan karakteristik yang tertentu pula.

1. Pengelompokkan koperasi berdasarkan bidang usaha, dapat digolongkan sebagai berikut:
   a. Koperasi konsumsi adalah koperasi yang berusaha dalam bidang penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan oleh para anggotanya. Jenis konsumsi yang dilayani oleh suatu koperasi konsumsi sangat tergantung pada ragam anggota dan daerah kerja tempat koperasi didirikan.
   b. Koperasi Produksi adalah kegiatan utamanya memproses bahan baku menjadi barang jadi/setengah jadi. Tujuannya adalah untuk menyatukan kemampuan dan modal para anggotanya guna meningkatkan barang-barang tertentu melalui proses yang meratakan pengelolaan dan memiliki sendiri.
   c. Koperasi Pemasaran adalah koperasi yang dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya dalam memasarkan barang-barang yang dihasilkannya. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan mata rantai tata niaga, dan mengurangi sekecil mungkin keterlibatan perantara di dalam memasarkan produk-produk yang dihasilkan.
   d. Koperasi Kredit /Simpan Pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam pemupukan simpanan dari para anggotanya untuk dipinjamkan kembali kepada anggotanya yang membutuhkan bantuan modal untuk usahanya. Selain itu, koperasi simpan pinjam juga bertujuan mendidik anggotanya bersifat hemat dan gemar menabung serta menghindarkan anggotanya dari jeratan para rentenir.

2. Koperasi berdasarkan jenis komoditi

   Berdasarkan jenis komoditinya, maka koperasi dapat dibedakan menjadi:
   a. Koperasi ekstraktif adalah koperasi yang melakukan usaha dengan menggali atau memanfaatkan sumber-sumber alam secara langsung tanpa atau dengan sedikit mengubah bentuk dan sifat sumber alam itu.
   b. Koperasi pertanian dan peternakan Koperasi pertanian adalah koperasi yang melakukan usaha berhubungan dengan komoditi pertanian tertentu. Koperasi ini beranggotakan para petani, buruh tani, atau berhubungan dengan usaha pertanian. Kegiatan koperasi pertanian biasanya meliputi:
      1) Pengusahaan bibit, semprotan dan peralatan pertanian lainnya

bappelitbangda

2) Mengolah hasil pertanian
3) Memasarkan hasil-hasil olahan komoditi pertanian
4) Menyediakan modal bagi para petani
5) Mengembangkan keterampilan koperasi.

Koperasi peternakan adalah koperasi yang usahanya berhubungan dengan peternakan tertentu. Anggota biasanya pemilik peternakan dan pekerja yang berkaitan dengan usaha peternakan.

c. Koperasi industri dan kerajinan adalah koperasi yang melakukan usaha di bidang industri dan kerajinan tertentu. Usahanya meliputi usaha pengadaan, pengolahan bahan baku menjadi barang jadi atau gabungan ketiganya.
d. Koperasi jasa-jasa

Koperasi jasa hampir sama dengan koperasi industri lainnya, yang membedakan ialah bahwa koperasi jasa mengkhususkan usahanya dalam memproduksi dan memasukkan kegiatan-kegiatan tertentu. Sebagaimana koperasi industri, tujuan koperasi jasa adalah untuk menyatukan potensi ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing anggotanya.

3. Koperasi berdasarkan profesi anggotanya

Istilah profesi sebenarnya mempunyai arti sebagai jenis pekerjaan yang dilakukan orang-orang yang mempunyai keahlian atau kecakapan tertentu berdasarkan kode etik. Berdasarkan profesi anggotanya, koperasi dapat dibedakan menjadi:

a. Koperasi Karyawan;
b. Koperasi Pegawai Negeri Sipil;
c. Koperasi Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Polri;
d. Koperasi Mahasiswa;
e. Koperasi Pedagang Pasar;
f. Koperasi Veteran RI; 12
g. Koperasi Nelayan;
h. Koperasi Kerajinan dan sebagainya.

4. Koperasi berdasarkan daerah kerjanya

Daerah kerja adalah luas sempit wilayah yang dijangkau oleh badan usaha koperasi dalam melayani kepentingan para anggotanya atau melayani masyarakat. Berdasarkan daerah kerjanya, koperasi digolongkan sebagai berikut:

a. Koperasi primer adalah koperasi yang beranggotakan orang-orang yang biasanya

bappelitbangda

didirikan pada lingkup wilayah terkecil tertentu.

b. Koperasi pusat adalah koperasi yang beranggotakan koperasi-koperasi primer biasanya didirikan sebagai pemusatan dari berbagai koperasi primer dalam lingkup wilayah tertentu. Koperasi pusat mempunyai tujuan untuk memperkuat kedaulatan ekonomi koperasi-koperasi yang bergabung di dalamnya.
c. Koperasi gabungan tidak beranggotakan orang-orang, melainkan beranggotakan koperasi-koperasi pusat yang berasal dari wilayah tertentu.
d. Koperasi induk adalah koperasi yang beranggotakan yang beranggotakan berbagai koperasi pusat atau koperasi-koperasi gabungan yang berkedudukan di ibukota negara.

2.3.1.5. Sumber Modal Koperasi

Sumber Modal Koperasi Seperti halnya bentuk badan usaha yang lain, untuk menjalankan kegiatan usahanya koperasi memerlukan modal. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, adapun modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman.Modal sendiri meliputi sumber modal sebagai berikut:

a. Simpanan Pokok

   Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota.Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok jumlahnya sama untuk setiap anggota.

b. Simpanan Wajib

   Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, misalnya tiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama untuk setiap bulannya. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.

c. Simpanan khusus/lain-lain misalnya:Simpanan sukarela (simpanan yang dapat diambil kapan saja), Simpanan Qurban, dan Deposito Berjangka.
d. Dana Cadangan

   Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil usaha, yang dimaksudkan untuk pemupukan modal sendiri, pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi, dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

e. Hibah

   Hibah adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang

diterima dari pihak lain yang bersifat hibah/pemberian dan tidak mengikat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, adapun modal pinjaman koperasi berasal dari pihak-pihak sebagai berikut:

a. Anggota dan calon anggota
b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerjasama antarkoperasi
c. Bank dan Lembaga keuangan bukan banklembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perudang-undangan yang berlaku
d. Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
e. Sumber lain yang sah.

2.3.1.6. Pemberdayaan Koperasi

Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya pengurus koperasi dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Berarti mendorong mereka menjadi lebih terlibat dalam keputusan dan aktivasi.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah no 7 tahun 2021 dijelaskan, dalam melakukan pemberdayaan Koperasi melalui menumbuhkan iklim usaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dalam aspek paling sedikit:

a. kelembagaan;
b. produksi;
c. perarasaran;
d. keuangan; dan
e. inovasi dan teknologi

Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meningkatkan paling sedikit: a. kualitats partisipasi anggota Koperasi; b. kapasitas dan kompetensi surmber daya manusia pengurus, pengawas, dan pengelola; c. kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi; dan d. kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi/wira Koperasi melalui Inkubasi.

Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b aling sedikit: a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi; b. memberikan. kemudahan dalam pcngadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, banan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi koperasi; c. mendorong penerapan standardisasi dalam proses produksi dan pcngolahan; dan d. meningkatkan kemampuan rancang

bappelitbangda

bangun dan perekayasaan bagi produk anggota Koperasi.

Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit: a. menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi; b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota; . c. pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar-Koperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain; d. mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan e. melakukan kurasi produk unggulan daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.

Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit: a. meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari: 1. hibah; 2. penyetaraan simpanatl anggota; dan/atau 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Dan b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber-sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tanggal waktu tertentu yang berasal dari: anggota; non-anggota; 3. Koperasi lain; 4. bank dan industri keuangan nonbank; dan/atau 5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit: a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital; b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi; c. mendorong pemanfaatan teknologi dalam bidang desain dan pengendalian mutu; d. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi; e. memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan f. pengembangan wirausaha Koperasi melalui Inkubasi.

2.3.2. Ruang Lingkup UMKM

2.3.2.1 Pengertian, Kriteria, dan Klasifikasi UMKM

Konsep dan definisi mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki beberapa pendekatan, ada pendekatan asset dan omset, ada juga pendekatan tenaga kerja. UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Sektor bisnis UMKM antara lain perdagangan, pengolahan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan jasa.

Konsep Umum, UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi, UMKM

bappelitbangda

dijelaskan sebagai: “perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh ekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.

Menurut Rudjito, Merupakan usaha kecil yang membantu perekonomian Indonesia. Dikatakan membantu perekonomian Indonesia disebabkan karena dengan melalui UMKM akan membentuk lapangan kerja baru serta juga meningkatkan devisa negara dengan melalui pajak badan usaha.

Sedangkan Menurut Inna Primiana, Merupakan suatu aktivitas atau kegiatan ekonomi yang menjadi penggerak pembangunan Indonesia ialaah seperti industri manufaktur, agribisnis, agraris, dan juga sumberdaya manusia. Dalam arti ini mengindikasikan bahwa UMKM ini mengandung arti pemulihan perekonomian Indonesia dengan melalui pengembangan sektor perdagangan untuk program pemberdayaan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan.https:// pendidikan. co.id/ pengertian-umkm.

Pada prinsipnya, pembedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara. Karena itu, memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar Negara.

2.3.2.2. Kriteria UMKM

Pasal 1 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 22021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah menyebutkan UMKM sebagai Berikut :

Usaha Mikro adalah usaha procluktif milik orang perorangan danf atau badan usaha perorang yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatui daiam Peraturan Pemerintah ini.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang ditakukan oleh ori.rg perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usa-ha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam pe;att:ran pemerintah ini.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau rnenjadi bagian baik langsung maupun ticlak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana

d,atr.rr dalam peraturan pemerintah ini.

Menurut Sri Winarni (2006) Pada umumnya, usaha kecil mempunyai ciri antara lain sebagai berikut :

(1) Biasanya berbentuk usaha perorangan dan belum berbadan hukum perusahaan,
(2) Aspek legalitas usaha lemah,
(3) Struktur organisasi bersifat sederhana dengan pembagian kerja yang tidak baku,
(4) Kebanyakan tidak mempunyai laporan keuangan dan tidak melakukan pemisahan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan,
(5) Kualitas manajemen rendah dan jarang yang memiliki rencana usaha,
(6) Sumber utama modal usaha adalah modal pribadi,
(7) Sumber Daya Manusia (SDM) terbatas,
(8) Pemilik memiliki ikatan batin yang kuat dengan perusahaan, sehingga seluruh kewajiban perusahaan juga menjadi kewajiban pemilik.

Agar dapat membedakan UMKM dan Juga Usaha Besar, diperlukan kriteria Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 22021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan, sebagai berikut:

1. Kriteria berdasarkan Modal

   Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp l.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.O00,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan Usaha Menengah merniliki modal usaha lebih dari Rp, 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh rniliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2. Kriteria Berdasarkan Hasil Penjualan Tahunan

   Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Paling banyak Rp.2.00O.000.000,00 (dua miliar rupiah), Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.15.000.000.000,000 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp,50.000.000.000,00 (lima puluh

bappelitbangda

miliar rupiah).

Pasal 36 (1) Untuk kepentingan tertentu, selain kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), kementerian / lembaga dapat menggunakan kriteria omzet, kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, insentif dan disinsentif, kandungan lokal, dan/atau penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.

Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, sejumlah lembaga pemerintah, seperti Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS), selama ini juga menggunakan jumlah kerja sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha anata Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menegah dan Usaha Besar. Misalnya Usaha Mikro menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Usaha Mikro (atau di sektor industri manufaktur umum di sebut industry rumah tangga) adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap hingga 4 orang; Usaha Kecil atau Industri kecil dengan jumlah pekerja 5-19 orang; Usaha Menengah atau Industri menengah dengan jumlah pekerja 20-99 orang; dan Usaha Besar atau Industri besar dengan jumlah pekerja 100 orang atau lebih.

Kriteria UMKM berbeda menurut negara, oleh karena itu memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara. Tidak ada kesepakatan umum dalam membedakan Sebuah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah maupun Usaha Besar. Namun demikian, secara umum, sebuah usaha mikro mengerjakan lima (5) atau kurang pekerja; walaupun banyak usaha dari kategori ini tidak mengerjakan pekerja yang digaji, yang didalam literatur sering disebut *self-employment*, sedangkan UKM bisa berkisar antara kurang dari 100 pekerja. Selain menggunakan jumlah pekerja, banyak negara juga menggunakan nilai aset tetap (tidak termasuk gedung dan tanah) dan omset dalam mendefinisikan UMKM. Bahkan di banyak negara, definisi UMKM berbeda antarsektor, misalnya di Thailand, India, dan China, atau bahkan berbeda antar lembaga atau departemen pemerintahan, misalnya Indonesia dan Pakistan.

UMKM atau *SME (Small Medium Enterprise*) memiliki definisi yang berbeda-beda di setiap negara. Kesamaannya adalah setiap negara menyadari pentingnya keberadaan UMKM untuk menggerakkan roda perekonomian negaranya. Berikut adalah beberapa kriteria dari UMKM atau *SME* menurut beberapa negara di dunia:

World Bank, membagi UMKM ke dalam 3 jenis, yaitu:

- *Medium enterprise*, dengan kriteria:
  a. Jumlah karyawan maksimal 300 orang,

bappelitbangda

b. Pendapatan setahun hingga sejumlah $ 15 juta, dan
c. Jumlah aset hingga sejumlah $15 juta.

- *Small enterprise*, dengan kriteria:
  a. Jumlah karyawan kurang dari 30 orang,
  b. Pendapatan setahun tidak melebihi $ 3 juta, dan
  c. Jumlah aset tidak melebihi $ 3 juta.
- *Micro enterprise*, dengan kriteria:
  a. Jumlah karyawan kurang dari 10 orang,
  b. Pendapatan setahun tidak melebihi $ 100 ribu, dan
  c. Jumlah aset tidak melebihi $ 100 ribu.

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, pembedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata - rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara.

2.3.2.3. Klasifikasi UMKM

Dalam perspektif perkembangannya, UMKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok yaitu :

1. *Livehood Activities*, merupakan UMKM dengan kegiatan usaha dalam rangka mendapatkan kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Di Indonesia jumlah UMKM kategori ini adalah yang terbesar.
2. *Micro Enterprise*, merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
3. *Small Dynamic Enterprises*, UMKM ini yang sering memiliki jiwa *entrepreneurship*. Banyak pengusaha skala menengah dan besar yang tadinya berasal dari kategori ini. Kalau dibina dengan baik maka sebagian dari UMKM kategori ini akan masuk ke kategori empat. Jumlah kelompok UMKM ini jauh lebih kecil dari jumlah UMKM yang masuk kategori satu dan dua. Kelompok UMKM ini sudah bisa menerima pekerjaan sub-kontrak dan ekspor.
4. *Fast Moving Enterpris*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan, Dari kelompok ini kemudian akan muncul usaha skala menengah dan besar (melakukan transformasi menjadi usaha besar), kelompok ini jumlahnya juga lebih

bappelitbangda

sedikit dari UMKM kategori satu dan dua.

Berdasarkan empat kelompok klasifikasi di atas, menunjukan bahwa ke-empat kelompok berkaitan dengan sifat dan jiwa kewirausahaan yang dimiliki oleh pemilik atau pelaku usaha, yang mana semakin berkembang dan meningkat usaha tersebut, semakin besar jiwa kewirausahaanya.

2.3.2.4. Karakteristik UMKM

Karakteristik UMKM merupakan sifat atau kondisi faktual yang melekat pada aktifitas usaha maupun perilaku pengusaha yang bersangkutan dalam menjalankan bisnisnya. UMKM sendiri memiliki karakteristik yang unik dan beda dari yang lain yaitu:

1. Bahan baku mudah diperoleh.
2. Menggunakan teknologi sederhana sehingga mudah dilakukan.
3. Keterampilan dasar umumnya sudah dimiliki secara turun temurun.
4. Bersifat padat karya atau menyerap tenaga kerja yang cukup banyak.
5. Peluang pasar cukup luas, sebagian besar produknya terserap di pasar lokal/domestik dan tidak tertutup sebagian lainnya berpotensi untuk diekspor.
6. Beberapa komoditi tertentu memiliki ciri khas terkait dengan karya seni budaya daerah setempat.
7. Melibatkan masyarakat ekonomi lemah setempat secara ekonomis menguntungkan.

Selain itu karakteristik berikut di bawah ini yang menjadi ciri pembeda antar pelaku usaha sesuai dengan skala usahanya yaitu:

bappelitbangda

Tabel. Karakteristik Umum Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)

Ukuran Usaha	Karakteristik
Usaha Mikro	❑ Jenis barang/komoditi tidak selalu tetap; sewaktu-waktu dapat berganti. ❑ Tempat usahanya tidak selalu menetap; sewaktu-waktu dapat pindah tempat. ❑ Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun. ❑ Tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha. ❑ Umumnya Sumber Daya Manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausah yang memadai; ❑ Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah. ❑ Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian sudah akses ke lembaga keuangan non bank. ❑ Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. ❑ Contoh: Usaha tani, Peternak, Industri pandai besi, Warung makan, Usaha usaha jasa (perbengkelan, salon kecantikan), Usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang di pasar. ❑ Usaha mikro mempunyai karakter positif yang tidak selalu di miliki oleh usaha kecil dan menengah. Antara lainnya : 1. Perputaran usaha (turn over) cukup tinggi, kemampuannya menyerap dana yang mahal dan dalam situasi krisis ekonomi kegiatan usaha masih tetap berjalan bahkan terus berkembang; 2. Tidak sensitive terhadap suku bunga; 3. Tetap berkembang walau dalam situasi krisis ekonomi dan moneter. 4. Pada umumnya berkarakter jujur, ulet, lugu dan dapat menerima bimbingan asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat.
Ukuran Usaha	Karakteristik
Usaha Kecil	❑ Jenisbarang/komoditiyangdiusahakanumumnyasudahtetap tidak gampang berubah. ❑ Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah. ❑ Padaumumnyasudah melakukanadministrasikeuangan walau masih sederhana. ❑ Keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga. ❑ Sudah membuat neraca usaha. ❑ Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. ❑ Sumberdayamanusia(pengusaha)memilikipengalamandalam berwira usaha. ❑ Sebagian sudah akses ke perbankan dalam keperluan modal. ❑ Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti *business planning.* ❑ Contoh: Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja, Pedagang dipasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya., Pengrajin industri makanan dan minuman, industri meubelair, ayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi dan industry kerajinantangan, Peternakan ayam, itik dan perikanan;,

bappelitbangda

Ukuran Usaha	Karakteristik
	Koperasi berskala kecil.
Usaha Menengah	❑ Memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi.Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan untuk *auditing* dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan. ❑ Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan. ❑ Sudahmemilikipersyaratanlegalitasantaralainizin ❑ tetangga.Sudah memiliki akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan. ❑ Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik. ❑ Contoh: Usaha pertanian, perternakan, perkebunan, kehutanan skala menengah; Usaha perdagangan (grosir) termasuk expor dan impor; Usaha jasa EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut), garment dan jasa transportasi taxi dan bus antar proponsi; Usaha industri makanan dan minuman, elektronik dan logam; Usaha pertambangan batu gunung untuk kontruksi dan marmer buatan.
Usaha Besar	❑ Usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Bank Indonesia, LPPI – 2015.

Menurut Tulus Tambunan (2009), UMKM tidak saja berbeda dengan Usaha Besar, tetapi di dalam kelompok UMKM itu sendiri terdapat perbedaan karakteristik dalam sejumlah aspek yang dapat mudah dilihat sehari – hari di negara sedang berkembang (NSB), termasuk di Indonesia. Sebagai berikut :

bappelitbangda

Tabel 2. Karakteristik – Karakteristik Utama UMKM Di Negara Sedang Berkembang (NSB).

NO	Aspek	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah
1	Formalitas	Beroperasi di sektor informal; usaha tidak terdaftar; tidak/ jarang bayar pajak	Beberapa beroperasi disektor formal; beberapa tidak terdaftar; sedikit yang baya pajak	Semua di sektor formal; terdaftar dan bayar pajak
2	Organisasi & Manajemen	Dijalankan oleh pemilik; tidak menerapkan pembagian tenaga kerja internal; manajemen & struktur organisasi formal, system pembukuan formal	Dijalankan oleh pemilik; tidak ada pembagian tenaga kerja internal; manajemen & struktur organisasi formal, system pembukuan formal	Banyak menjalankan manajer professional dan menerapkan pembagian tenaga kerja internal; manajemen & struktur organisasi formal, system pembukuan formal
3	Sifat dari Kesempatan Kerja	Kebanyakan menggunakan anggota- anggota keluarga tidak dibayar	Beberapa memakai tenaga kerja yang digaji	Semua memakai tenaga kerja yang digaji, semua memiliki system perekrutan formal
4	Pola / Sifat dari Proses Produksi	Derajat mekanisasi sangat / umumnya manual; tingkat teknologi sangat rendah	Beberapa memakai mesin – mesin terbaru	Banyak yang punya derajat mekanisasi yang tinggi/ punya akses terhadap teknonologi tinggi
5	Orientasi Pasar	Umumnya menjual kepasar lokal untuk kelompok berpendapat rendah	Banyak yang menjual kepasar domestok dan ekspor, dan melayani kelas menengah ke atas	Semua menjual ke pasar domestik dan banyak yang ekspor, dan melayani kelas menengah ke atas.
6	Profil ekonomi & social dari Pemilik Usaha	Pendidikan rendah dan dari rumah tangga (RT) miskin, motivasi utama : survival	Banyak berpendidikan baik & dari rumah tangga (RT) nonmiskin, banyak yang bermotivasi bisnis/ mencari profit	Sebagian berpendidikan baik dan dari rumah tangga (RT) makmur; motivasi utama profit
7	Sumber – sumber dari bahan dan modal	Kebanyakan menggunakan bahan baku lokal dan uang sendiri	Beberapa memakai bahan baku impor dan punya akses ke kredit formal	Banyak yang memakai bahan baku impor dan punya akses ke kredit formal

bappelitbangda

8	Hubungan – hubungan Ekternal	Kebanyakan tidak punya akses ke program – program pemerintah dan tidak punya hubungan – hubungan bisnis dengan UB	Banyak yang punya akses ke program – program pemerintah dan punya hubungan – hubungan bisnis dengan UB (termasuk PMA)	Sebagian besar punya akses ke program – program pemerintah dan banyak yang punya hubungan – hubungan bisnis dengan UB (termasuk PMA)
9	Wanita Pengusaha	Rasio dari wanita terhadap pria sebagai pengusaha sangat tinggi	Rasio dari wanita terhadap pria sebagai pengusaha cukup tinggi	Rasio dari wanita terhadap pria sebagai pengusaha sangat rendah

Sumber : Tulus Tambunan, 2009

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa UMKM merupakan usaha produktif di semua sektor ekonomi yang berdiri sendiri, yang turut menopang perekonomian suatu negara yang perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak atau cabang dari perusahaan lain, dengan kriteria dapat dilihat dari jumlah asset, omset dan jumlah tenaga kerja, yang dalam perkembagnganya memiliki klasifikasi serta memiliki karakteristik yang berbeda untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dari berbagai aspek.

2.3.2.5. Kelebihan, Kekurangan dan Keunggulan UMKM

Tambunan,2002:166, Beberapa kelebihan dan Kelemahan yang dimiliki UMKM adalah sebagai berikut:

1. Kelebihan UMKM :
   a. Adaya tahan Motivasi pengusaha kecil sangat kuat dalam mempertahankan kelangsungan usahanya karena usaha tersebut merupakan satu-satunyasumber penghasilan keluarga. Oleh karena itu pengusaha kecil sangat adaptif dalam menghadapi perubahan situasi dalam lingkungan usaha.
   b. Padat karya Pada umumnya UMKM yang ada di Indonesia merupakan usahayang bersifat padat karya.Dalam proses produksinya, usaha kecil lebih memanfaatkan kemampuan tenaga kerja yang dimiliki daripadapenggunaan mesin-mesin sebagai alat produksi.
   c. keahlian khususUMKM di Indonesia banyak membuat produk sederhana yang membutuhkan keahlian khusus namun tidak terlalu

bappelitbangda

membutuhkanpendidikan formal. Keahlian khusus tersebut biasanya dimiliki secaraturun-temurun. Selan itu, produk yang dihasilkan UMKM di Indonesiamempunyai kandungan teknologi yang sederhana dan murah.

d. jenis produk-produk yang dihasilkan UMKM di Indonesia pada umumnya bernuansakultur, yang pada dasarnya merupakan keahlian tersendiri dari masyarakatdi masing-masing daerah. Contohnya seperti kerajinan tangan dari bambuatau rotan, dan ukir-ukiran kayu.
e. keterkaitan dengan sektor pertanian UMKM di Indonesia pada umumnya masih bersifat *agricultural based* karena banyak komoditas pertanian yang dapat diolah dalam skala keciltanpa harus mengakibatkan biaya produksi yang tinggi.
f. Permodalan pada umumnya, pengusaha kecil menggantungkan diri pada uang(tabungan) sendiri atau dana pinjaman dari sumber-sumber informal untukkebutuhan modal kerja

Kelemahan-kelemahan UMKM tercermin pada kendala-kendala yang dihadapi oleh usaha tersebut. Kendala yang umumnya dialami oleh UMKM adalah adanya keterbatasan modal, kesulitan dalam pemasaran dan penyediaanbahan baku, pengetahuan yang minim tentang dunia bisnis,keterbatasanpenguasaan teknologi, kualitas SDM (pendidikan formal) yang rendah, manajemen keuangan yang belum baik, tidak adanya pembagian tugas yang jelas,serta sering mengandalkan anggota keluarga sebagai pekerja tidak dibayar.

Beberapa keunggulan UMKM terhadap usaha besar antara lain adalah sebagai berikut.

1. Inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk.
2. Hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil.
3. Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapannya terhadap tenaga kerja.
4. Fleksibelitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibanding dengan perusahaan besar yang pada umumnya birokrasi.
5. Terdapatnya dinamisme manajerial dan peran kewirausahaan.

bappelitbangda

BAB III
METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN

3.1. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian Model Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Koperasi dan UMKM adalah di Kabupaten Bandung Barat meliputi:

1. Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian Model Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Koperasi dan UMKM harus memiliki dasar teori yang cukup dan disosialisasikan kepada Pemberi Pekerjaan.
2. Menggali sumber-sumber informasi dari kepustakaan yang relevan.
3. Mengumpulkan data primer dan sekunder yang terkait dengan penyusunan kajian Model Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
4. Merumuskan konsep dan menyusun metodologi survey mengenai penyusunan kajian Model Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
5. Melakukan presentasi dan diskusi dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bandung Barat terkait dan pihak Pemberi Kerja (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat) dalam setiap tahapan pelaporan hasil pekerjaan serta dapat menghadirkan nara sumber yang relevan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan hasil pekerjaan.

3.2. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian Model Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Bandung Barat adalah:

1. Laporan seluruh rangkaian kegiatan dalam bentuk hardcopy dan softcopy.
2. Rekomendasi rumusan Model Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Bandung Barat.

3.3. PELAPORAN

Penyampaian laporan kepada pihak pemberi pekerjaan, terdiri dari:

1. Laporan Pendahuluan

bappelitbangda

Merupakan laporan pertama yang harus diserahkan sebelum melakukan survey lapangan. Laporan ini berisi penjabaran dari Kerangka Acuan Kerja (KAK), yang meliputi:

a. Penjabaran latar belakang dan tujuan kajian
b. Landasan konseptual yang digunakan
c. Sasaran kajian
d. Dasar hukum yang menjadi rujukan
e. Landasan konseptual yang relevan
f. Ruang lingkup pekerjaan
g. Hasil yang diharapkan
h. Rencana kerja dan jadwal pelaksanaan
i. Metode pelaksanaan pekerjaan
j. Organisasi pelaksanaan pekerjaan

Laporan Pendahuluan harus disampaikan paling lambat pada bulan pertama setelah penandatanganan kontrak.

2. Laporan Antara

Laporan ini berisi antara lain:

a. Hasil pengumpulan dan pengolahan data dari hasil survey langsung di lapangan maupun data lainnya.
b. Hasil pemetaan kemiskinan, koperasi dan UMKM.
c. Deskripsi dan Rancangan Model Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Laporan Antara harus diserahkan paling lambat pada bulan kedua setelah penandatanganan kontrak.

3. Laporan Akhir

Laporan ini merupakan perbaikan dan penyempurnaan setelah serangkaian kegiatan presentasi, diskusi, dan pembahasan dan sebagai perumusan seluruh hasil kajian. Laporan Akhir harus diserahkan paling lambat pada bulan ketiga setelah penandatanganan kontrak.

3.4. JADWAL PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan pekerjaan ini selama 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari

bappelitbangda

kalender, dari bulan April sampai dengan Juni 2021. Adapun jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

Tabel 3.1. Jadwal Pelaksanaan

No.	Kegiatan	Bln I	Bln II	Bln III
1.	**Persiapan**			
a.	Koordinasi dan konsultasi			
b.	Rapat konsolidasi tim kajian			
c.	Presentasi dan pembahasan			
d.	Persiapan survey lokasi kajian			
e.	Laporan pendahuluan			
2.	**Pelaksanaan**			
a.	Koordinasi dan konsultasi			
b.	Survey lokasi kajian: pengumpulan data			
c.	Presentasi dan pembahasan			
d.	Penyusunan laporan tengah (antara)			
e.	Penyerahan laporan tengah (antara)			
3.	**Terminasi**			
a.	Koordinasi dan konsultasi			
b.	Pengolahan dan analisis data			
c.	Penyusunan draf laporan akhir			
d.	Penyerahan laporan akhir			

3.5. METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN

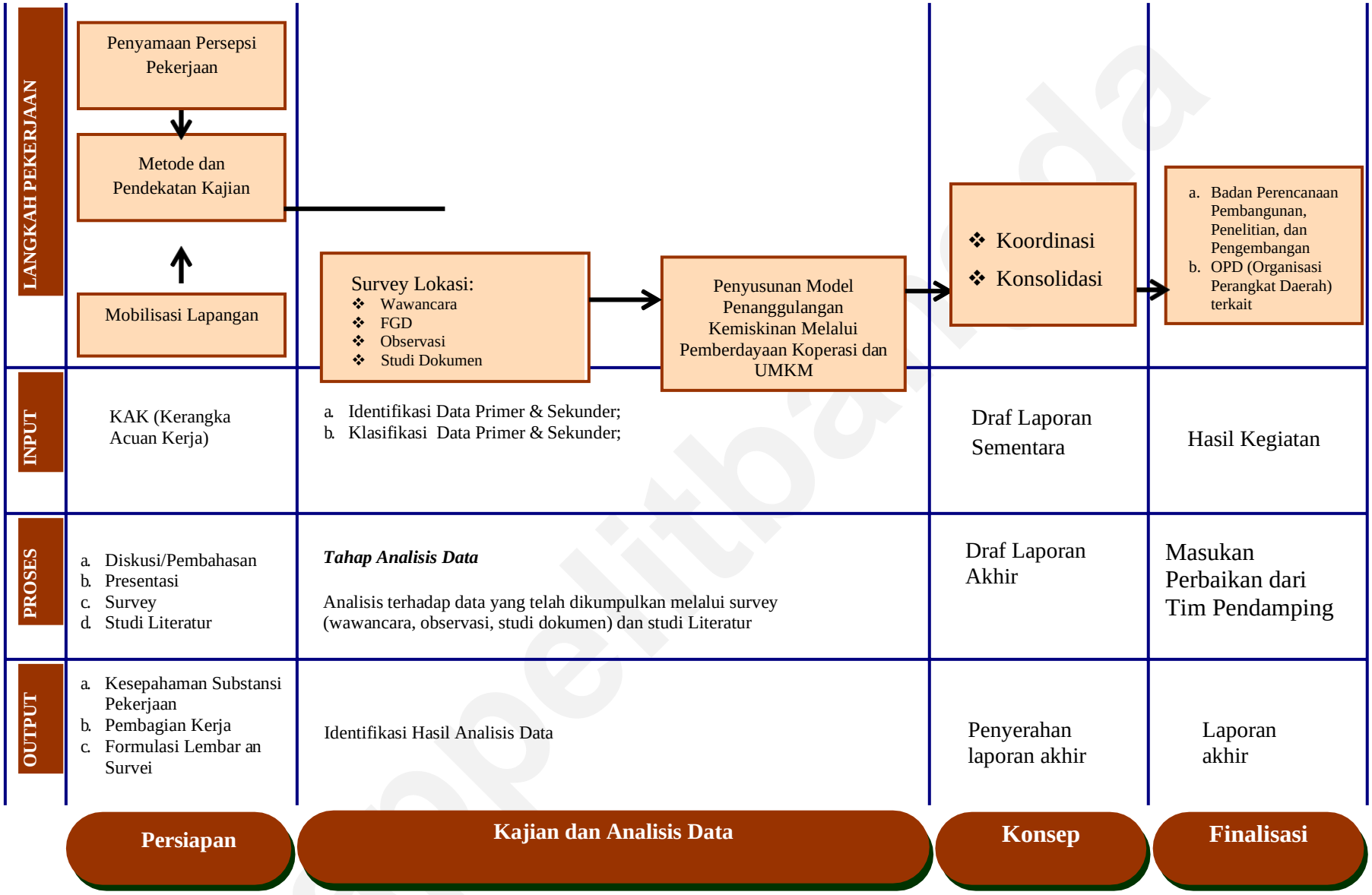
Metode yang dipergunakan dalam kajian ini adalah **Metode Exploratif Survey.** Kegiatan ini menggunakan 3 (tiga) teknik pendekatan, yaitu (1) Studi pustaka (*Desk Study*), (2) Survey (wawancara, observasi, studi dokumen), dan (3) FGD (*Focus Group Discussion*). Pelaksanaan kajian ini menggunakan beberapa tahap, mulai dari tahap penyusunan desain studi, penyusunan pedoman wawancara, pengumpulan data lapangan, analisis dan intrepretasi data.

Jenis data yang dikumpulkan untuk dianalisis terdiri atas data primer dan data sekunder. Sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan informan yang menggunakan pedoman wawancara, observasi lapangan, dan FGD (*Focus Group Discussion*). Sumber data sekunder diperoleh dari hasil studi pustaka dan studi dokumen.

Data primer dikumpulkan dengan dua cara yaitu melalui survey, yaitu melalui wawancara dengan menggunakan pedoman wawncara, dan pengamatan langsung (observasi lapangan). Sementara, data sekunder akan dikumpulkan melalui studi pustaka dan review dokumen.

bappeltbandung

Keseluruhan tahapan kegiatan ini dapat digambarkan yaitu sebagai berikut:



Gambar 3.1
Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan

BAB IV
ORGANISASI
PELAKSANAAN PEKERJAAN

4.1. PEMBERI TUGAS

Pemberi tugas pekerjaan ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Bandung Barat.

4.2. SUMBER PENDANAAN

Sumber dana untuk membiayai pekerjaan ini dialokasikan dalam DPA Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021.

4.3. LOKASI PEKERJAAN

Lokasi pekerjaan untuk penyusunan kajian Model Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Koperasi dan UMKM adalah di wilayah kerja Kabupaten Bandung Barat. Untuk kepentingan kajian ini, maka dibutuhkan keterlibatan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Kabupaten Bandung Barat yang terkait dalam pengumpulan data, yaitu: (1) Dinas Sosial; (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; (3) Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistika; (4) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, (5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; (6) Perindustrian dan Perdagangan; (7) Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah; (8) Bagian Perkonomian dan Sekretariat Daerah; (9) Sekretaris Bappelitbangda; (10) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bappelitbangda; (11) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappelitbangda; (12) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Bappelitbangda; (13) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappelitbangda; (14) Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappelitbangda; (15) Fungsional Perencana pada Bappelitbangda; (16) Analis Kebijakan Ahli Madya pada Bappelitbangda; (17) Dekopinda; dan (18) Perwakilan UMKM.

4.4. TENAGA AHLI DAN TENAGA PENDUKUNG YANG DIPERLUKAN

1. Tenaga Ahli

   Tenaga ahli yang dibutuhkan untuk penyusunan Kajian Model Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Bandung

bappelitbangda

Barat adalah yang memiliki kualifikasi dan pengalaman sebagai berikut:

No.	Kualifikasi	Pengalaman Profesional	Jumlah orang
1	Team Leader/Ahli Ilmu Sosial	Minimal S2 (Magister) bidang Ilmu Sosial, berpengalaman profesional minimal 5 (lima) tahun sebagai tenaga ahli di bidang ilmu sosial, pemberdayaan masyarakat, pengembangan, dan penanggulangan kemiskinan.	1 org
2	Tenaga Ahli Kebijakan Bisnis	Minimal S2 (Magister) bidang ilmu kebijakan bisnis, berpengalaman profesional minimal 5 (lima) tahun sebagai tenaga ahli di bidang kebijakan bisnis/administrasi bisnis, pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM, kewirausahaan, dan *business plan*.	1 org
3	Tenaga Ahli Kebijakan Publik	Minimal S2 (Magister) bidang ilmu kebijakan publik, berpengalaman profesional minimal 5 (lima) tahun sebagai tenaga ahli di bidang kebijakan publik/administrasi publik, manajemen dan pelayanan publik.	1 org

2. Tenaga Pendukung

Tenaga pendukung yang dibutuhkan untuk penyusunan Kajian Model Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:

No.	Klasifikasi	Kualifikasi/Pengalaman Profesional	Jumlah orang
1	Pencacah Lapangan	S1 (Sarjana) bidang Ilmu Sosial/Kesejahteraan Sosial ,Bidang Ilmu Ekonomi dan bidang Ilmu Pendidikan berpengalaman profesional sebagai surveyor minimal 3 (tiga) tahun.	6 org
2	Pengolah Data	S1 (Sarjana) bidang Ilmu Ekonomi berpengalaman sebagai tenaga administrasi minimal 3 (tiga) tahun.	1 org

bappelitbangda

BAB V
DESKRIPSI HASIL KAJIAN DAN MODEL

5.1. GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT

5.1.1. Geografi

Kabupaten Bandung Barat adalah kabupaten baru Provinsi Jawa Barat, Indonesia yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bandung. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang di sebelah barat dan utara, Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi di sebelah timur, serta Kabupaten Cianjur di sebelah barat dan timur. Secara astronomis, Kabupaten Bandung Barat terletak antara 60,373' sampai dengan 70,131' Lintang Selatan dan 1070 ,110' sampai dengan 10701440' 06" Bujur Timur.

Kabupaten Bandung Barat terdiri dari 16 Kecamatan, yaitu: - Kecamatan Rongga - Kecamatan Gununghalu - Kecamatan Sindangkerta - Kecamatan Cililin - Kecamatan Cihampelas - Kecamatan Cipongkor - Kecamatan Batujajar - Kecamatan Saguling - Kecamatan Cipatat - Kecamatan Padalarang - Kecamatan Ngamprah - Kecamatan Parongpong - Kecamatan Lembang - Kecamatan Cisarua - Kecamatan Cikalongwetan - Kecamatan Cipeundeuy Luas Kabupaten Bandung Barat secara keseluruhan adalah 1 305,77 km2. Kecamatan terluas di Kabupaten Bandung Barat adalah Kecamatan Gununghalu dan kecamatan yang memiliki luas terkecil adalah Kecamatan Batujajar.

Kabupaten bandung Barat terdiri dari 165 Desa. Desa terbanyak terdapat di Kecamatan Lembang yaitu 16 Desa. 2. Tidak terdapat perubahan jumlah desa dari tahun 2015 – 2020 di kabupaten Bandung Barat 3. Terdapat penurunan jumlah pegawai negeri sipil dibandingkan dengan tahun 2019.

5.1.2. Keuangan Pemerintah

Di halaman berikut tergambar Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Menurut Jenis Pendapatan (Ribu Rupiah), 2017–2020. Dan Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Menurut Jenis Belanja (Ribu Rupiah), 2017–2020.

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Menurut Jenis Pendapatan (Ribu Rupiah), 2017–2018.

Jenis Pendapatan/*Kind of Revenues*	2017	2018
(1)	(2)	(3)
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)/*RegionalRevenue*	609,916,387,808.09	422,341,026,545.00

bappelitbangda

1.1 Pajak Daerah/*Regional Tax*	336,515,620,557.00	306,237,634,441.00
1.2 Retribusi Daerah/*Regional Retribution*	19,516,985,608.00	20,367,747,909.00
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan/*Regional-Owned Company REVenue and Separated Management of Regional Wealth*	-	-
1.4 Lain-lain PAD yang Sah/*Other Regional REVenue*	253,883,781,643.09	95,735,644,195.00
2. Dana Perimbangan/*Balance Funds*	1,587,392,734,673.00	1,525,369,448,662.00
2.1 Bagi Hasil Pajak/*Tax Sharing REVenue*	91,674,037,697.00	81,417,057,356.00
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam/*Non-Tax Sharing REVenue/Natural Resources*		
2.3 Dana Alokasi Umum/*General Allocation Fund*	1,088,131,605,000.00	1,091,118,868,000.00
2.4 Dana Alokasi Khusus/*Special Allocation Fund*	407,587,091,976.00	352,833,523,306.00
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah/*Other REVenue*	525,403,822,085.00	654,246,085,813.00
3.1 Pendapatan Hibah/*Grant*	19,417,997,000.00	162,089,458,165.00
3.2 Dana Darurat/*Emergency Fund*	-	-
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya/*Tax Sharing REVenue from PROVINCial and Other Regional GOVernments*	223,938,485,921.00	240,298,088,056.00
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah/*Regional Adjustment and Autonomy Fund*	195,537,587,000.00	198,291,361,000.00
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya/*Financial Assistance from PROVINCial or Other Regional GOVernments*	86,509,752,164.00	53,567,178,592.00
3.6 Lainnya/*Others*		
Jumlah/*Total*	2,722,712,944,566.09	2,601,956,561,020.00

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Menurut Jenis Pendapatan (Ribu Rupiah), 2019–2020

Jenis Pendapatan/*Kind of REVenues*	2019	2020
(1)	(2)	(3)
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)/*Regional REVenue*	528,087,033,271.00	464,808,559,257.00
1.1 Pajak Daerah/*Regional Tax*	379,096,936,256.00	330,898,929,358.00
1.2 Retribusi Daerah/*Regional Retribution*	38,560,684,794.00	27,507,890,500.00
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan/*Regional-Owned Company REVenue and Separated Management of Regional Wealth*	470,526,236.00	494,842,021.00
1.4 Lain-lain PAD yang Sah/*Other Regional REVenue*	109,958,885,985.00	105,906,897,378.00

bappelitbangda

2. Dana Perimbangan/*Balance Funds*	1,639,819,402,415.00	1,500,049,569,433.00
2.1 Bagi Hasil Pajak/*Tax Sharing REVenue*	85,160,692,004.00	85,333,960,809.00
2.2BagiHasilBukanPajak/SumberDayaAlam/*Non-Tax Sharing REVenue/Natural Resources*		
2.3 Dana Alokasi Umum/*General Allocation Fund*	1,126,707,364,000.00	1,022,493,222,000.00
2.4 Dana Alokasi Khusus/*Special Allocation Fund*	427,951,346,411.00	392,222,386,624.00
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah/*OtherREVenue*	734,934,857,532.00	369,953,663,942.00
3.1 Pendapatan Hibah/*Grant*	168,495,680,000.00	-
3.2 Dana Darurat/*Emergency Fund*	-	-
3.3Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya/*Tax Sharing REVenue from PROVINCial and Other Regional GOVernments*	243,264,633,170.00	213,388,584,827.00
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah/*Regional Adjustment and Autonomy Fund*	241,510,582,000.00	9,072,192,000.00
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya/*Financial Assistance from PROVINCial or Other Regional GOVernments*	81,663,962,362.00	147,492,887,115.00
3.6 Lainnya/*Others*		
Jumlah/*Total*	**2,902,841,293,218.00**	**2,334,811,792,632.00**

Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Menurut Jenis Belanja (Ribu Rupiah), 2017–2018

Jenis Pendapatan *Kind of REVenues*	**2017**	**2018**
(1)	**(2)**	**(3)**
1. BelanjaTidakLangsung/*IndirectExpenditures*	**1,423,572,955,742.00**	**1,577,094,301,521.00**
1.1 Belanja Pegawai/*Personnel Expenditures*	**936,157,956,112.00**	**1,000,650,665,065.00**
1.2 Belanja Bunga/*Interest Expenditures*	-	-
1.3 Belanja Subsidi/*Subsidies Expenditures*	-	-
1.4 Belanja Hibah/*Grant Expenditures*	**97,177,132,000.00**	**130,871,587,477.00**
1.5BelanjaBantuanSosial/*SocialAidExpenditures*	**13,028,000,000.00**	**12,576,000,000.00**
1.6 Belanja Bagi Hasil/*Sharing Fund Expenditure*	**31,515,145,265.00**	**36,852,601,759.00**
1.7 Belanja Bantuan Keuangan/*Financial Aids Expenditures*	**343,370,354,965.00**	**395,135,093,651.00**
1.8 Belanja Tidak Terduga/*Unpredicted Expenditures*	**2,324,367,400.00**	**1,008,353,569.00**
2. Belanja Langsung/*Direct Expenditures*	**552,878,296,393.00**	**401,356,120,881.00**
2.1 Belanja Pegawai/*Personnel Expenditures*	**152,785,253,534.00**	**136,815,801,381.00**

bappelitbangda

2.2 Belanja Barang dan Jasa/*Goods and Services Expenditures*	605467854380,27	665445784654,82
2.3 Belanja Modal/*Capital Expenditure*	400,093,042,859.00	264,540,319,500.00
Jumlah/*Total*	1,976,451,252,135.00	1,978,450,422,402.00

Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Menurut Jenis Belanja (Ribu Rupiah), 2019–2020

Jenis Pendapatan *Kind of REVenues*	2019	2020
(1)	(2)	(3)
1. BelanjaTidakLangsung/*IndirectExpenditures*	1,700,864,579,549.00	1,349,180,511,734.00
1.1 Belanja Pegawai/*Personnel Expenditures*	1,135,974,290,946.00	1,053,832,197,047.00
1.2 Belanja Bunga/*Interest Expenditures*	-	2,855,004,000.00
1.3 Belanja Subsidi/*Subsidies Expenditures*	-	-
1.4 Belanja Hibah/*Grant Expenditures*	74,852,604,645.00	51,612,800,000.00
1.5BelanjaBantuanSosial/*SocialAidExpenditures*	12,322,500,000.00	1,365,000,000.00
1.6 Belanja Bagi Hasil/*Sharing Fund Expenditure*	37,774,335,344.00	38,518,706,534.00
1.7 Belanja Bantuan Keuangan/*Financial Aids Expenditures*	438,463,687,104.00	126,812,839,614.00
1.8 Belanja Tidak Terduga/*Unpredicted Expenditures*	1,477,161,510.00	74,183,964,539.00
2. Belanja Langsung/*Direct Expenditures*	201,553,845,878.00	461,971,879,807.00
2.1 Belanja Pegawai/*Personnel Expenditures*	201,553,845,878.00	43,276,196,150.00
2.2 Belanja Barang dan Jasa/*Goods and SerVICes Expenditures*	700573066240,3	621830652112,93
2.3 Belanja Modal/*Capital Expenditure*	338001326883,63	418,695,683,657.00
Jumlah/*Total*	1,902,418,425,427.00	1,811,152,391,541.00

Sumber : BPS Kab. Bandung Barat, 2021

5.1.3. Penduduk dan Ketenagakerjaan

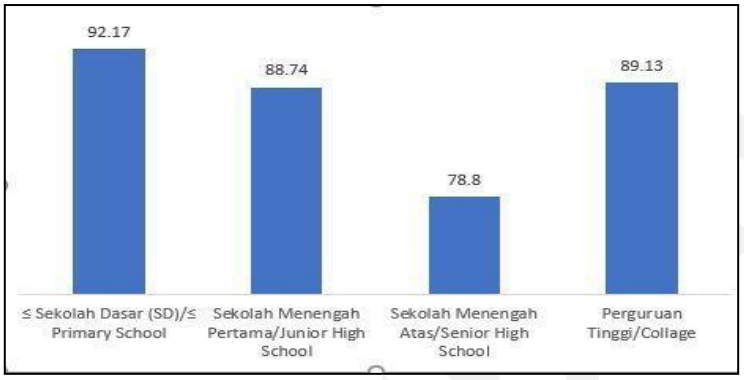
Penduduk Kabupaten Bandung Barat adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Kabupaten Bandung Barat selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per kilometer persegi. Dan Rasio jenis kelamin adalah perbandingan banyaknya penduduk laki-laki dengan banyaknya penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan.

bappelitbangda

Pengangguran terbanyak ada di kelompok penduduk lulusan SMA. persetase terbesar angkatan penduduk bekerja terhadap angkatan kerja adalah penduduk dengan backround pendidikan SD ke bawah. jumlah penduduk di Kabupaten Bandung Barat adalah sebesar 1.788.336 dengan sex ratio sebesar 104,3 artinya lebih banyak laki-laki dibandingkan dengan perempuan.

Dibawah ini tergambar Persentase Penduduk Bekerja Terhadap Angkatan Kerja, dan Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun, Menurut Kecamatan, 2020, serta Rasio Jenis Kelamin Penduduk per Tahun di Kabupaten Bandung Barat.

Persentase Penduduk Bekerja Terhadap Angkatan Kerja di Kabupaten Bandung Barat, 2020



Sumber : BPS Kab. Bandung Barat, 2021

Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun, Menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, 2020

Laju Pertumbuhan Penduduk		
Kecamatan	Penduduk	Tahun 2019–2020
(1)	(2)	(3)
Rongga	60 666	0,15
Gununghalu	79 175	0,14
Sindangkerta	73 458	0,11
Cililin	95 470	0,06
Cihampelas	132 659	0,07
Cipongkor	99 991	0,11
Batujajar	107 835	0,07
Saguling	33 820	0,08
Cipatat	140 301	0,04
Padalarang	181 359	0,03
Ngamprah	177 690	0,05
Parongpong	113 005	0,08
Lembang	197 640	0,07
Cisarua	79 154	0,06

Laju Pertumbuhan Penduduk		
Kecamatan	Penduduk	Tahun 2019–2020
Cikalong Wetan	128 106	0,09
Cipeundeuy	88 007	0,07
Bandung Barat	1788336	0,07
Hasil Registrasi/*Registration Result*	1712348	...
Hasil Proyeksi [1]/*Projection Result* [1]	1 714982	...

Sumber : BPS Kab. Bandung Barat, 2021

Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk per Tahun Menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, 2020

Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km^2
(1)	(2)	(3)
Rongga	3,39	536,3
Gununghalu	4,43	492,9
Sindangkerta	4,11	609,8
Cililin	5,34	1 227,3
Cihampelas	7,42	2 823,1
Cipongkor	5,59	1 250,5
Batujajar	6,03	3 365,6
Saguling	1,89	657,2
Cipatat	7,85	1 113,1
Padalarang	10,14	3 528,4
Ngamprah	9,94	4 934,5
Parongpong	6,32	2 502,9
Lembang	11,05	2 068,2
Cisarua	4,43	1 436,3
Cikalong Wetan	7,16	1 134,4
Cipeundeuy	4,92	870,6
Bandung Barat	100	1369,6
Hasil Registrasi/*Registration Result*	100	1311
Hasil Proyeksi [1]/*Projection Result* [1]	100	1313,4

Sumber : BPS Kab. Bandung Barat, 2021

bappeltibanda

Rasio Jenis Kelamin Penduduk per Tahun Menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, 2020

Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)
Rongga	106,2
Gununghalu	105,8
Sindangkerta	103,1
Cililin	105,6
Cihampelas	105,5
Cipongkor	105,0
Batujajar	103,2
Saguling	104,2
Cipatat	104,3
Padalarang	103,9
Ngamprah	103,5
Parongpong	103,4
Lembang	104,3
Cisarua	103,9
Cikalong Wetan	104,4
Cipeundeuy	104,4
Bandung Barat	104,3
Hasil Registrasi/*Registration Result*	104
Hasil Proyeksi [1]/*Projection Result* [1]	102.65

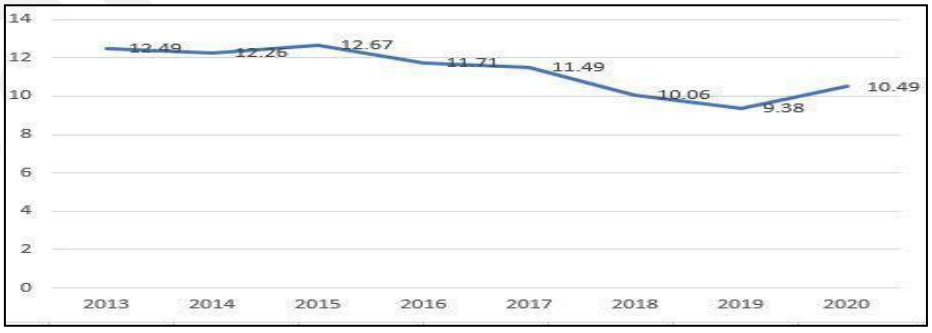
Catatan [1] Data dari Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035 (Pertengahan tahun/Juni)

Sumber : BPS KAB. Bandung Barat

5.1.4. Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

Terjadi peningkatan persentase penduduk miskin di Kabupaten Bandung Barat dibandingkan dengan tahun 2019 seperti tergambar dibawah ini.

Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Bandung Barat, 2013–2020

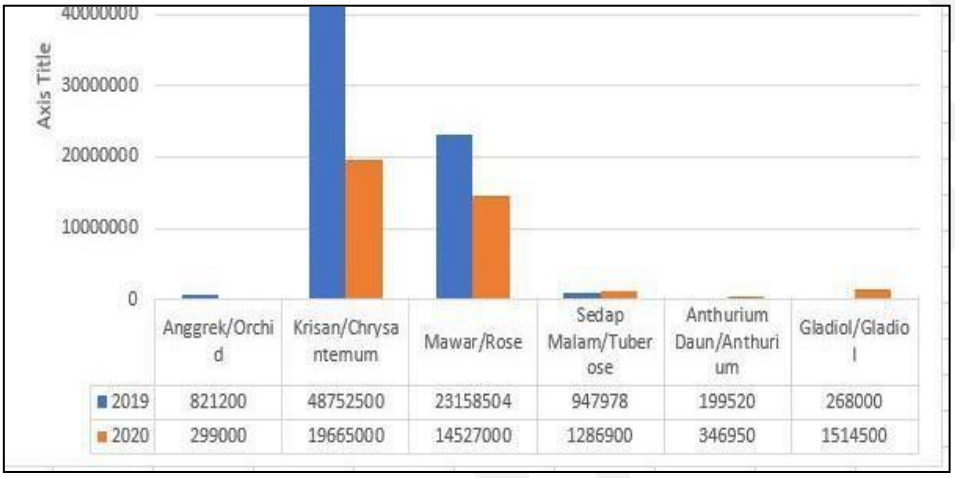


Sumber : BPS Kab. Bandung Barat, 2021

5.1.5. Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan

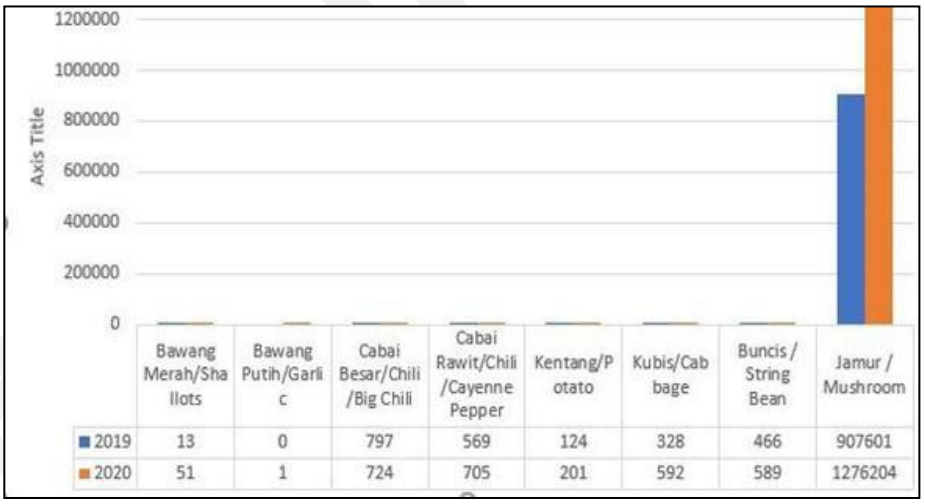
Produksi tanaman hiasanthurium yang sangat digemari di 2020 meningkat hampir 1.5 kali lipat, Komoditas terbesar perkebunan di Kabupaten Bandung Barat adalah kopi. Gambar berikut dibawah menunjukan Produksi Tanaman Hias Menurut Jenis Tanaman, dan Luas Panen Tanaman Sayuran Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Bandung Barat (ha), 2017–2020.

Produksi Tanaman Hias Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Bandung Barat (tangkai), 2017–2020



	Anggrek/Orchid	Krisan/Chrysantemum	Mawar/Rose	Sedap Malam/Tuberose	Anthurium Daun/Anthurium	Gladiol/Gladiol
2019	821200	48752500	23158504	947978	199520	268000
2020	299000	19665000	14527000	1286900	346950	1514500

Luas Panen Tanaman Sayuran Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Bandung Barat (ha), 2017–2020



	Bawang Merah/Shallots	Bawang Putih/Garlic	Cabai Besar/Chili/Big Chili	Cabai Rawit/Chili/Cayenne Pepper	Kentang/Potato	Kubis/Cabbage	Buncis/String Bean	Jamur/Mushroom
2019	13	0	797	569	124	328	466	907601
2020	51	1	724	705	201	592	589	1276204

Sumber : BPS Kab. Bandung Barat, 2021

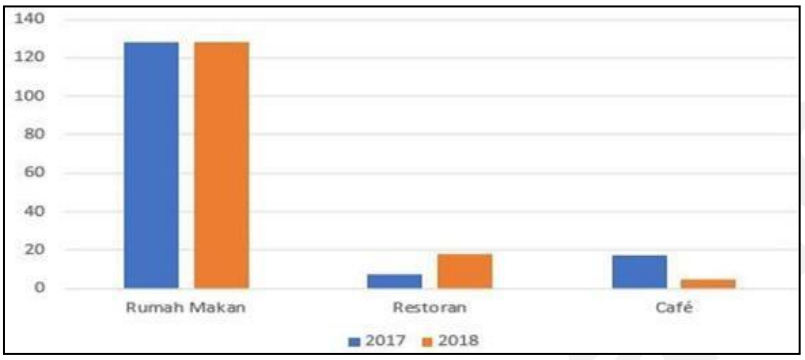
5.1.6. Pariwisata

Restoran/ rumah makan adalah usaha yang mencakup jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual dan menyajikan makanan dan

minuman untuk umum di tempat usahanya, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan telah mendapatkan surat keputusan sebagai restoran / rumah makan dari instansi yang membinanya. Terdapat peningkatan jumlah Restorandi Kabupaten Bandung Barat.

Di bawah ini menunjukan data Jumlah Rumah Makan, Restoran dan Cafe di Kabupaten Bandung Barat, 2017–2018.

Jumlah Rumah Makan,Restoran dan Cafe
di Kabupaten Bandung Barat, 2017–2018

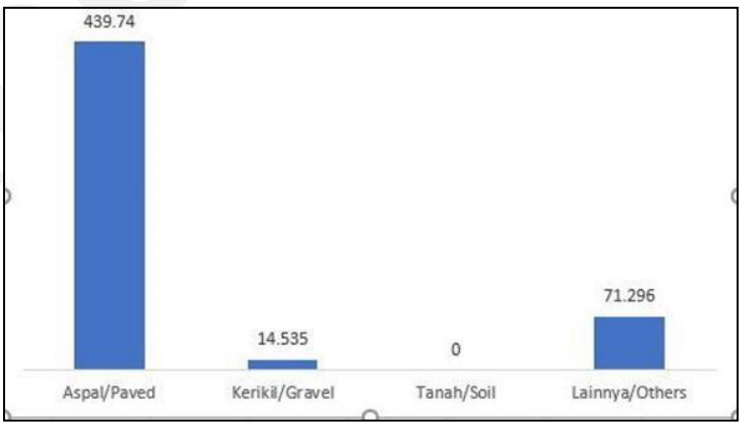


Sumber : BPS Kab. Bandung Barat, 2021

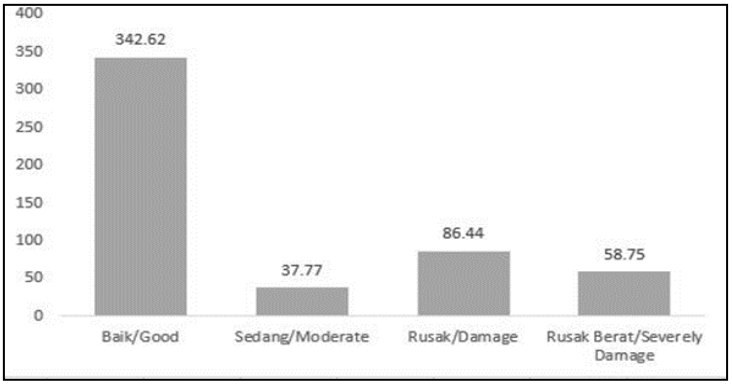
5.1.7. Transportasi dan Komunikasi

Sebagian besar panjang jalan di Kabupaten Bandung Barat adalah aspal dengan kondisi baik. Berikut menunjukan Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan dan Kondisi Jalan di Kabupaten Bandung Barat (km), tahun 2020.

Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan
di Kabupaten Bandung Barat (km), 2020



Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Bandung Barat (km), 2020



Sumber : BPS Kab. Bandung Barat, 2021

5.1.8. Pengeluaran Penduduk

1. Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Penghitungan paritas daya beli mengacu pada Kota Jakarta Selatan, sementaratahun rujukan adalah 2012.
2. Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumaht angga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan.
3. Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan

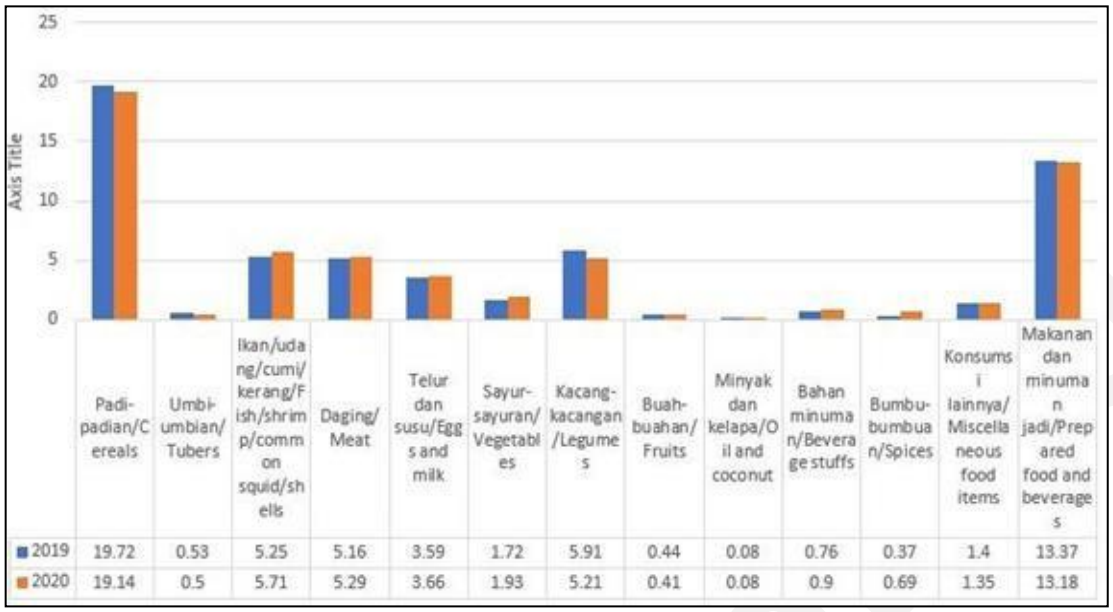
Pengeluaran per kapita tahun 2020 Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp1.007.906 Artinya, secara rata-rata pengeluaran penduduk Kabupaten Bandung Barat selama sebulan adalah Rp1.007.906. Terjadi penurunan pengeluaran per kapita sebulan penduduk kabupaten Bandung Barat dibandingkan tahun 2019.

Berikut menunjukan Rata-Rata Konsumsi Protein Perkapita Sehari Menurut Komoditi Makanan Dan Distribusi tahun, 2019 dan 2020, Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (rupiah), serta tahun 2019 dan 2020, serta persentase penduduk

bappelitbangda

Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Kabupaten Bandung Barat, tahun 2020.

Rata-Rata Konsumsi Protein Sehari Menurut Komoditas Makanan dan Distribusi Pengeluaran di Kabupaten Bandung Barat, 2019 dan 2020



Sumber : BPS Kab. Bandung Barat, 2021

Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (rupiah) di Kabupaten Bandung Barat, 2019 dan 2020

Kelompok Komoditas	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Makanan/Food		
Padi-padian/*Cereals*	67 940	65 736
Umbi-umbian/*Tubers*	6 296	6 249
Ikan/udang/cumi/kerang/*Fish/shrimp/common squid/shells*	28 574	30 007
Daging/*Meat*	30 572	30 733
Telur dan susu/*Eggs and milk*	30 731	29 571
Sayur-sayuran/*Vegetables*	28 285	33 830
Kacang-kacangan/*Legumes*	11 929	10 586
Buah-buahan/*Fruits*	26 272	23 182
Minyak dan kelapa/*Oil and coconut*	9 729	10 308
Bahan minuman/*Beveragestuffs*	19 029	21 658
Bumbu-bumbuan/*Spices*	9 800	10 536
Konsumsi lainnya/*Miscellaneous food items*	11 079	10 224
Makanan dan minuman jadi/*Prepared food and beverages*	169 380	164 606
Rokok/*Cigarettes*	93 556	92 023

Kelompok Komoditas	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Jumlah makanan/*Total food*	543 170	539 251
Bukan makanan/*Non-food*		
Perumahandanfasilitasrumahtangga/*Housingandhousehold*	264 349	250 453
Facilities		
Aneka komoditas dan jasa/*Goods and services*	105 030	90 509
Pakaian,alaskaki,dantutupkepala/*Clothing,footwear,and*	28 703	30 491
Headgear		
Komoditas tahan lama/*Durable goods*	29 809	54 746
Pajak, pungutan, dan asuransi/*Taxes and insurance*	21 749	21 659
Keperluan pesta dan upacara/kenduri/*Parties and ceremonies*	22 493	20 797
Jumlah bukan makanan/*Total non-food*	472 133	468 656
Jumlah/*Total*	1015303	1 007 906

Sumber : BPS Kab. Bandung Barat, 2021

Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Kabupaten Bandung Barat, 2020

Golongan Pengeluaran (Rp)	Persentase Penduduk
(1)	(2)
< 150 000	0
150 000–199 999	0
Golongan Pengeluaran (Rp)	Persentase Penduduk
200 000–299 999	0,70
300 000–499 999	20,23
500 000–749 999	31,96
750 000–999 999	16,38
1 000 000–1 499 999	16,47
> 1 500 000	14,26
Jumlah/Total	100,00

Sumber : BPS Kab. Bandung Barat, 2021

5.1.9. Sistem Neraca Regional

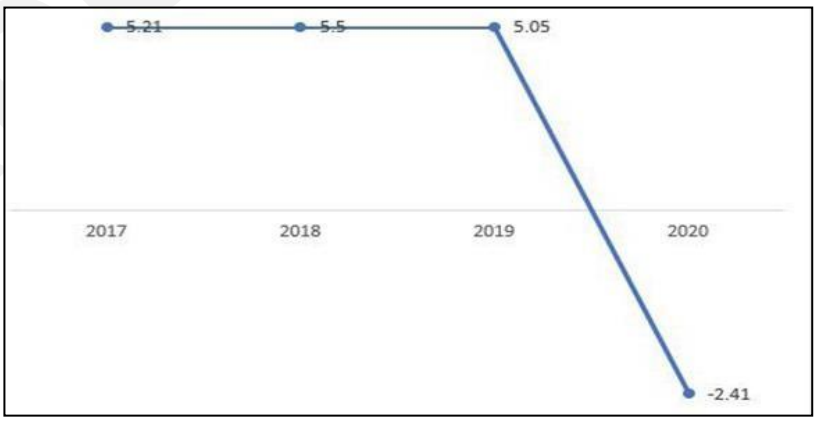
1. Wilayah Domestik dan Regional : Pengertian domestik/regional disini dapat merupakan Propinsi atau Daerah Kabupaten/Kota. Transaksi Ekonomi yang akan dihitung adalah transaksi yang terjadi di wilayah domestik suatu daerah tanpa memperhatikan apakah transaksi dilakukan oleh masyarakat (residen) dari daerah

tersebut atau masyarakat lain (non-residen)

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Pasar : Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto di sini mencakup komponen- komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menjumlahkan nlai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar.
3. Produk Domestik Regional Neto (PDRN)Atas Dasar Harga Pasar : Perbedaan antara konsep neto di sini dan konsep bruto di atas, ialah karena pada konsep bruto di atas; penyusutan masih termasuk di dalamnya, sedangkan pada konsep neto ini komponen penyusutan telah dikeluarkan. Jadi Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar dikurangi penyusutan akan diperoleh Produk Domestik Regional Neto atas dasar harga pasar. Penyusutan yang dimaksud di sini ialah nilai susutnya (ausnya) barang-barang modal yang terjadi selama barang- barang modal tersebut ikut serta dalam proses produksi. Jika nilai susutnya barang-barang modal dari seluruh sektor ekonomi dijumlahkan, maka hasilnya merupakan penyusutan yang dimaksud di atas.

Berikut menunjukan data perkembangan, perubahan Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Bandung Barat, dari tahun 2016–2020.

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bandung Barat (persen), 2017–2019



Sumber : BPS Kab. Bandung Barat, 2021

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bandung Barat (miliar rupiah), 2016–2020

Lapangan Usaha/*Industry*		2016	2017	2018	2019	2020
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/*Agriculture, Forestry, and Fishing*	5 187.60	5 442.75	5 895.30	6 325.51	6 174,47
B	Pertambangan dan Penggalian/*Mining and Quarrying*	450.51	459.93	473.24	476.90	476,31
C	Industri Pengolahan/ *Manufacturing*	14 563.50	15 860.74	17 505.32	18 853.41	18 753,08
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ *Electricity and Gas*	271.41	318.86	354.04	390.49	375,83
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/*Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities*	13.86	14.98	16.78	17.77	19,68
F	Konstruksi/*Construction*	2 847.88	3 138.91	3 305.39	3 613.70	3 421,28
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/*Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*	5 220.81	5 620.67	6 010.72	6 404.98	5 990,22
H	Transportasi dan Pergudangan/ *Transportation and Storage*	1 994.26	2 161.82	2 325.18	2 503.97	2 436,30
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/*Accommodation and Food Service Activities*	1 769.27	1 980.16	2 217.51	2 436.39	2 401,85
J	Informasi dan Komunikasi/ *Information and Communication*	641.27	712.19	746.82	786.48	999,36
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ *Financial and Insurance Activities*	312.74	346.87	381.60	414 19	418,93
L	Real Estat/*Real Estate Activities*	632.12	691.45	773.51	853.13	855,11
M,N	Jasa Perusahaan/*Business Activities*	158.58	174.93	194.90	212.59	192,79

banditapanga

O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/*Public Administration and Defence; Compulsory Social Security*	1 143.75	1 203.95	1 279.81	1 365.49	1 312,15
P	Jasa Pendidikan/*Education*	1 269.21	1 435.51	1 616.54	1 742.81	1 891,90
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/*Human Health and Social Work Activities*	183.03	210.30	234.66	259.84	258,02
R,S,T,U	Jasa Lainnya/*Other Services Activities*	383.39	430.30	476.30	522.36	501,60
	Produk Domestik Regional Bruto/*Gross Regional Domestic Product*	37 043.25	40 204.39	43 807.70	47 180.08	46 478,90

Sumber : BPS Kab. Bandung Barat, 2021

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bandung Barat (miliar rupiah), 2016–2020

Lapangan Usaha/*Industry*		2016	2017	2018	2019	2020
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/*Agriculture, Forestry, and Fishing*	3 543.50	3 592.88	3 688.41	3 790.59	3 711,11
B	Pertambangan dan Penggalian/*Mining and Quarrying*	320.57	326.15	333.99	329.6	322,49
C	Industri Pengolahan/ *Manufacturing*	10 681.83	11 275.48	12 071.60	12 770.35	12 517,13
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ *Electricity and Gas*	215.99	221.96	229.84	237.12	229,82
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/*Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities*	10.06	10.65	11.17	11.50	12,68
F	Konstruksi/*Construction*	1 963.51	2 103.22	2 187.51	2 349.04	2 214,82
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/*Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*	3 885.03	4 070.72	4 220.20	4 382.10	4 024,97

bapelitbangda

H	Transportasi dan Pergudangan/ *Transportation and Storage*	1 392.05	1 464.49	1 537.22	1 605.32	1 544,01
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/*Accommodation and Food Service Activities*	1 330.75	1 437.15	1 547.79	1 645.76	1 568,89
J	Informasi dan Komunikasi/ *Information and Communication*	609.39	676.38	737.76	799.67	1 015,82
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ *Financial and Insurance Activities*	228.16	239.19	250.86	259.48	263,15
L	Real Estat/*Real Estate Activities*	483.83	515.93	566.48	615.10	616,03
M,N	Jasa Perusahaan/*Business Activities*	122.25	132.32	143.30	154.15	135,50
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/*Public Administration and Defence; Compulsory Social Security*	747.97	755.05	765.21	740.30	706,20
P	Jasa Pendidikan/*Education*	972.75	1 055.16	1 112.36	1 189.95	1 241,42
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/*Human Health and Social Work Activities*	135.93	148.99	160.82	172.96	172,47
R,S,T,U	Jasa Lainnya/*Other Services Activities*	282.22	304.20	324.29	345.20	343,91
	Produk Domestik Regional Bruto/*Gross Regional Domestic Product*	26 925.87	28 330.02	29 888.88	31 398.35	30 640,41

Sumber : BPS Kab. Bandung Barat, 2021

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bandung Barat, 2016–2020

Lapangan Usaha/*Industry*		2016	2017	2018	2019	2020
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/*Agriculture, Forestry, and Fishing*	14,00	13,54	13,46	13,41	13,28

bappelitbangda

B	Pertambangan dan Penggalian/*Mining and Quarrying*	1,22	1,14	1,08	1,01	1,02
C	Industri Pengolahan/ *Manufacturing*	39,31	39,68	39,96	39,96	40,35
D	Pengadaan Listrik dan Gas/*Electricity and Gas*	0,73	0,79	0,81	0,83	0,81
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/*Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities*	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
F	Konstruksi/*Construction*	7,69	7,57	7,55	7,66	7,36
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/*Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*	14,09	13,98	13,72	13,58	12,89
H	Transportasi dan Pergudangan/ *Transportation and Storage*	5,38	5,38	5,31	5,31	5,24
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/*Accommodation and Food Service Activities*	4,78	4,93	5,06	5,16	5,17
J	Informasi dan Komunikasi/ *Information and Communication*	1,73	1,77	1,70	1,67	2,15
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ *Financial and Insurance Activities*	0,84	0,86	0,87	0,88	0,90
L	Real Estat/*Real Estate Activities*	1,71	1,72	1,77	1,81	1,84
M,N	Jasa Perusahaan/*Business Activities*	0,43	0,44	0,44	0,45	0,41
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/*Public Administration and Defence; Compulsory Social Security*	3,09	2,99	2,92	2,89	2,82
P	Jasa Pendidikan/*Education*	3,43	3,57	3,69	3,69	4,07

bampelitbangda

Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/*Human Health and Social Work Activities*	0,49	0,52	0,54	0,55	0,56
R,S,T,U	Jasa Lainnya/*Other Services Activities*	1,04	1,07	1,09	1,11	1,08
	Produk Domestik Regional Bruto/*Gross Regional Domestic Product*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kab. Bandung Barat, 2021

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bandung Barat (persen), 2017–2020

Lapangan Usaha/*Industry*		2016	2017	2018	2019	2020
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/*Agriculture, Forestry, and Fishing*		1,39	2,66	2,77	-2,10
B	Pertambangan dan Penggalian/ *Mining and Quarrying*		1,74	2,40	-1,29	-2,18
C	Industri Pengolahan/*Manufacturing*		5,99	6,62	5,79	-1,98
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ *Electricity and Gas*		2,77	3,55	3,17	-3,08
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ *Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities*		5,81	4,90	2,94	10,21
F	Konstruksi/*Construction*		4,76	6,35	7,38	-5,71
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ *Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*		4,78	3,67	3,84	-8,15
H	Transportasi dan Pergudangan/ *Transportation and Storage*		5,20	4,97	4,43	-3,82
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/*Accommodation and Food Service Activities*		8,00	7,70	6,33	-4,67
J	Informasi dan Komunikasi/ *Information and Communication*		10,99	9,08	8,39	27,03
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ *Financial and Insurance*		4,83	4,88	3,44	1,41

bapeditbanda

	Activities					
L	Real Estat/*Real Estate Activities*		6,63	9,80	8,58	0,15
M,N	Jasa Perusahaan/*Business Activities*		8,24	8,29	7,58	-12,11
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/*Public Administration and Defence; Compulsory Social Security*		0,95	1,35	-3,26	-4,61
P	Jasa Pendidikan/*Education*		8,47	5,42	6,98	4,33
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/*Human Health and Social Work Activities*		9,61	7,94	7,55	-0,28
R,S,T,U	Jasa Lainnya/*Other Services Activities*		7,79	6,60	6,45	-0,38
	Produk Domestik Regional Bruto/*Gross Regional Domestic Product*		5,21	5,50	5,05	-2,41

Sumber : BPS Kab. Bandung Barat, 2021

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Bandung Barat (miliar rupiah), 2016–2019

Jenis Pengeluaran *Type of Expenditure*	2016	2017	2018*	2019**	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga *Household Consumption Expenditure*	24 393,79	26 310,32	28 655,22	31 000,87	...
Pengeluaran Konsumsi LNPRT *NPISH Consumption Expenditure*	322,97	352,37	426,67	455 ,23	...
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah *Government Consumption Expenditure*	2 644,46	2 708,60	2 782,85	2 920,72	...
Pembentukan Modal Tetap Bruto *Gross Fixed Capital Formation*	7 743,17	8 455,98	9 234,35	9 923,79	...
Perubahan Inventori *Changes in Inventories*	1 652,51	1 758,51	1 813,79	1 847,02	...
Ekspor Barang dan Jasa/*Exports of Goods and Services*	...	...	...	...	...
Dikurangi: Impor Barang dan Jasa *Less: Import of Goods and Services*	286,36	618,62	894,83	1 032 ,44	...
Diskrepansi Statistik [1] *Statistical Discrepancies* [1]	...	...	...	...	...
Produk Domestik Regional Bruto/*Gross Regional Domestic Product*	37 043 ,26	40 204 ,40	43 807 ,71	47 180,08	...

Sumber : BPS Kab. Bandung Barat, 2021

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Bandung Barat(miliar rupiah), 2016–2019

Jenis Pengeluaran *Type of Expenditure*	2016	2017	2018*	2019**	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga *Household Consumption Expenditure*	17 243 ,45	17 990 ,17	18 973 ,06	19 946 ,78	...
Pengeluaran Konsumsi LNPRT *NPISH Consumption Expenditure*	254 ,84	266 ,76	305 ,37	315 ,27	...
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah *GoVernment Consumption Expenditure*	1 711 ,81	1 694 ,38	1 713 ,83	1 799 ,16	...
Pembentukan Modal Tetap Bruto *Gross Fixed Capital Formation*	5 754 ,66	6 155 ,70	6 588 ,32	6 966 ,95	...
Perubahan Inventori *Changes in InVentories*	1 028 ,20	1 030 ,01	1 046 ,63	1 048 ,94	...
Ekspor Barang dan Jasa/*Exports of Goods and SerVICes*	...	...	...	...	...
Dikurangi:ImporBarangdanJasa *Less: Import of Goods and SerVICes*	932 ,90	1 193 ,02	1 261 ,68	1 321 ,25	...
Diskrepansi Statistik [1] *Statistical Discrepancies* [1]	...	...	...	...	...
Produk Domestik Regional Bruto/*Gross Regional Domestic Product*	26 925 ,88	28 330 ,02	29 888 ,89	31 398 ,35	...

Sumber : BPS Kab. Bandung Barat, 2021

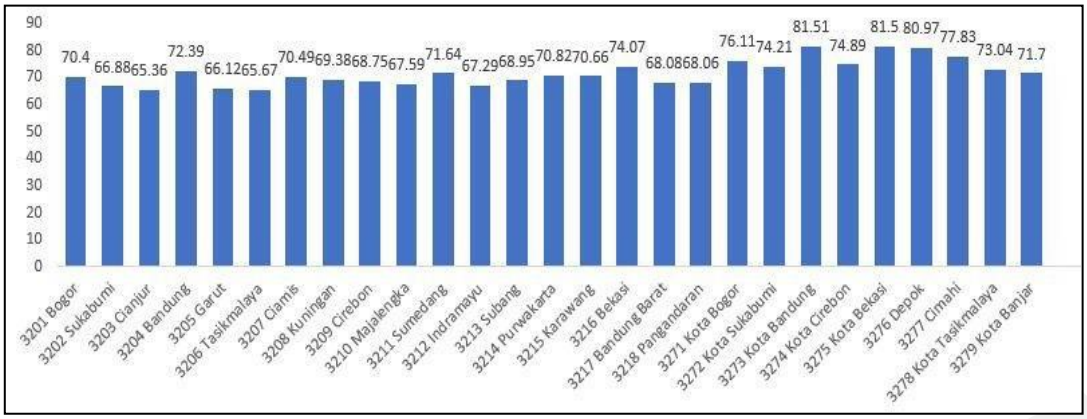
5.1.10. Perbandingan Antar Kabupaten/Kota

1. Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; penegtahuan, dan kehidupan yang layak
2. Angka IPM memberikan gambaran komprehensip mengenai tingkat pencapaian pembagunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik.

Angka IPM Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 adalah 68,08.

bappelitbangda

Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, 2020



Sumber: BPS Kabupaten Bandung Barat , 2020

Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat , 2016–2020

Kabupaten/Kota *Regency/ Municipality*	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3201 Bogor	5 587 390	5 715 009	5 840 907	5 965 410	5 427 068
3202 Sukabumi	2 444 616	2 453 498	2 460 693	2 466 272	2 725 450
3203 Cianjur	2 250 977	2 256 589	2 260 620	2 263 072	2 477 560
3204 Bandung	3 596 623	3 657 601	3 717 291	3 775 279	3 623 790
3205 Garut	2 569 505	2 588 839	2 606 399	2 622 425	2 585 607
3206 Tasikmalaya	1 742 276	1 747 318	1 751 295	1 754 128	1 865 203
3207 Ciamis	1 175 389	1 181 981	1 188 629	1 195 176	1 229 069
3208 Kuningan	1 061 886	1 068 201	1 074 497	1 080 804	1 167 686
3209 Cirebon	2 142 999	2 159 577	2 176 213	2 192 903	2 270 621
3210 Majalengka	1 188 004	1 193 725	1 199 300	1 205 034	1 305 476
3211 Sumedang	1 142 097	1 146 435	1 149 906	1 152 400	1 152 507
3212 Indramayu	1 700 815	1 709 994	1 719 187	1 728 469	1 834 434
3213 Subang	1 546 000	1 562 509	1 579 018	1 595 825	1 595 320
3214 Purwakarta	932 701	943 337	953 414	962 893	997 869
3215 Karawang	2 295 778	2 316 489	2 336 009	2 353 915	2 439 085
3216 Bekasi	3 371 691	3 500 023	3 630 907	3 763 886	3 113 017
3217 Bandung Barat	1 648 387	1 666 510	1 683 711	1 699 896	1 788 336
3218 Pangandaran	392 817	395 098	397 187	399 284	423 667
3271 Kota Bogor	1 064 687	1 081 009	1 096 828	1 112 081	1 043 070
3272 Kota Sukabumi	321 097	323 788	326 282	328 680	346 325
3273 Kota Bandung	2 490 622	2 497 938	2 503 708	2 507 888	2 444 160
3274 Kota Cirebon	310 486	313 325	316 277	319 312	333 303
3275 Kota Bekasi	2 787 205	2 859 630	2 931 897	3 003 923	2 543 676
3276 Depok	2 179 813	2 254 513	2 330 333	2 406 826	2 056 335
3277 Cimahi	594 021	601 099	607 811	614 304	568 400
3278 Kota Tasikmalaya	659 606	661 404	662 723	663 517	716 155
3279 Kota Banjar	181 901	182 388	182 819	183 110	200 973
Jawa Barat	**48 037 827**	**47 379 389**	**48 683 861**	**49 316 712**	**48 274 162**

bappeda.bandungbaratkab.bps.go.id

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (persen), 2016–2020

Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3201 Bogor	5,84	5,92	6,19	5,85	- 1,77
3202 Sukabumi	5,85	5,75	5,81	5,81	- 1,08
3203 Cianjur	6,43	5,77	6,24	5,67	- 0,78
3204 Bandung	6,34	6,15	6,26	6,13	- 1,87
3205 Garut	5,90	4,91	4,96	5,02	- 1,26
3206 Tasikmalaya	5,91	5,95	5,70	5,43	- 0,98
3207 Ciamis	5,99	5,21	5,31	5,38	- 0,14
3208 Kuningan	6,09	6,36	6,43	6,59	0,09
3209 Cirebon	5,63	5,06	5,02	4,68	- 1,08
3210 Majalengka	6,03	6,81	6,48	7,71	0,86
3211 Sumedang	5,70	6,23	5,79	6,33	- 1,12
3212 Indramayu	0,08	1,43	1,34	3,20	- 1,58
3213 Subang	5,40	5,10	4,41	4,41	- 1,27
3214 Purwakarta	5,99	5,15	4,98	4,38	- 2,05
3215 Karawang	6,55	5,13	6,04	4,08	- 3,59
3216 Bekasi	4,84	5,68	6,02	3,94	- 3,30
3217 Bandung Barat	5,65	5,21	5,50	5,05	- 2,41
3218 Pangandaran	5,29	5,10	5,32	5,94	- 0,05
3271 Kota Bogor	6,73	6,12	6,14	6,05	- 0,53
3272 Kota Sukabumi	5,64	5,43	5,52	5,49	- 1,48
3273 Kota Bandung	7,79	7,21	7,08	6,79	- 2,28
3274 Kota Cirebon	6,09	5,80	6,20	6,29	- 0,99
3275 Kota Bekasi	6,09	5,73	5,86	5,41	- 2,55
3276 Depok	7,28	6,75	6,97	6,74	- 1,92
3277 Cimahi	5,63	5,43	6,46	7,85	- 2,26
3278 Kota Tasikmalaya	6,91	6,07	5,93	5,97	- 2,01
3279 Kota Banjar	5,66	5,30	5,05	5,03	1,04
Jawa Barat	**5,66**	**5,33**	**5,65**	**5,07**	**-2,44**

Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (ribu), 2016–2020

Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3201 Bogor	490.8	487.28	415.02	395.03	465.67
3202 Sukabumi	198.66	197.12	166.33	153.3	175.1
3203 Cianjur	261.39	257.41	221.58	207.07	234.47
3204 Bandung	272.65	268.02	246.13	223.21	263.6
3205 Garut	298.52	291.24	241.31	235.19	262.78
3206 Tasikmalaya	195.61	189.35	172.41	159.93	181.52
3207 Ciamis	98.77	96.76	85.72	79.41	91.39
3208 Kuningan	144.07	141.55	131.16	123.16	139.2
3209 Cirebon	288.49	279.55	232.37	217.64	247.94
3210 Majalengka	152.5	150.26	129.29	121.06	138.21
3211 Sumedang	120.6	120.63	112.14	104.18	118.38
3212 Indramayu	237	233.38	204.18	191.86	220.31
3213 Subang	170.37	167.79	136.61	129.18	149.81
3214 Purwakarta	83.55	85.25	75.94	71.86	80.17
3215 Karawang	230.6	236.84	187.96	173.66	195.41
3216 Bekasi	164.41	163.95	157.21	149.43	186.3
3217 Bandung Barat	192.48	190.89	169	159.03	179.46
3218 Pangandaran	40.14	39.46	32.19	30.73	36.05
3271 Kota Bogor	77.28	76.53	64.85	63.97	75.04
3272 Kota Sukabumi	27.51	27.41	23.2	21.87	25.42
3273 Kota Bandung	107.58	103.98	89.38	84.67	100.02
3274 Kota Cirebon	30.15	30.19	28.03	26.8	30.61
3275 Kota Bekasi	140.03	136.01	119.82	113.65	134.01
3276 Depok	50.56	52.34	49.39	49.35	60.43
3277 Cimahi	35.07	34.53	29.94	26.91	31.64
3278 Kota Tasikmalaya	102.79	97.85	84.22	76.98	86.13
3279 Kota Banjar	12.74	12.87	10.41	10.07	11.16
Jawa Barat	**4224.32**	**4168.44**	**3615.79**	**3399.16**	**3920.23**

Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, 2016–2020

Kabupaten/Kota *Regency/Municipality*	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3201 Bogor	68,32	69,13	69,69	70.65	70.40
3202 Sukabumi	65,13	65,49	66,05	66.87	66.88
3203 Cianjur	62,92	63,70	64,62	65.38	65.36
3204 Bandung	70,69	71,02	71,75	72.41	72.39
3205 Garut	63,64	64,52	65,42	66.22	66.12
3206 Tasikmalaya	63,57	64,14	65,00	65.64	65.67
3207 Ciamis	68,45	68,87	69,63	70.39	70.49
3208 Kuningan	67,51	67,78	68,55	69.12	69.38
3209 Cirebon	66,70	67,39	68,05	68.69	68.75
3210 Majalengka	65,25	65,92	66,72	67.52	67.59
3211 Sumedang	69,45	70,07	70,99	71.46	71.64
3212 Indramayu	64,78	65,58	66,36	66.97	67.29
3213 Subang	67,14	67,73	68,31	68.69	68.95
3214 Purwakarta	68,56	69,28	69,98	70.67	70.82
3215 Karawang	68,19	69,17	69,89	70.86	70.66
3216 Bekasi	71,83	72,63	73,49	73.99	74.07
3217 Bandung Barat	65,81	66,63	67,46	68.27	68.08
3218 Pangandaran	65,79	66,60	67,44	68.21	68.06
3271 Kota Bogor	74,50	75,16	75,66	76.23	76.11
3272 Kota Sukabumi	72,33	73,03	73,55	74.31	74.21
3273 Kota Bandung	80,13	80,31	81,06	81.62	81.51
3274 Kota Cirebon	73,70	74,00	74,35	74.92	74.89
3275 Kota Bekasi	79,95	80,30	81,04	81.59	81.50
3276 Depok	79,60	79,83	80,29	80.82	80.97
3277 Cimahi	76,69	76,95	77,56	78.11	77.83
3278 Kota Tasikmalaya	70,58	71,51	72,03	72.84	73.04
3279 Kota Banjar	70,09	70,79	71,25	71.75	71.70
Jawa Barat	**70.05**	**70.69**	**71.30**	**72.03**	**72.09**

Sumber: BPS Kabupaten Bandung Barat, 2020

bappelitbangda
https://bandungbarat.kabbps.go.id

5.2. GAMBARAN DTKS DAN PROKUS KABUPATEN BANDUNG BARAT

5.2.1. Gambaran Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat

Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, dan Persentase Penduduk Miskin, 2012-2019

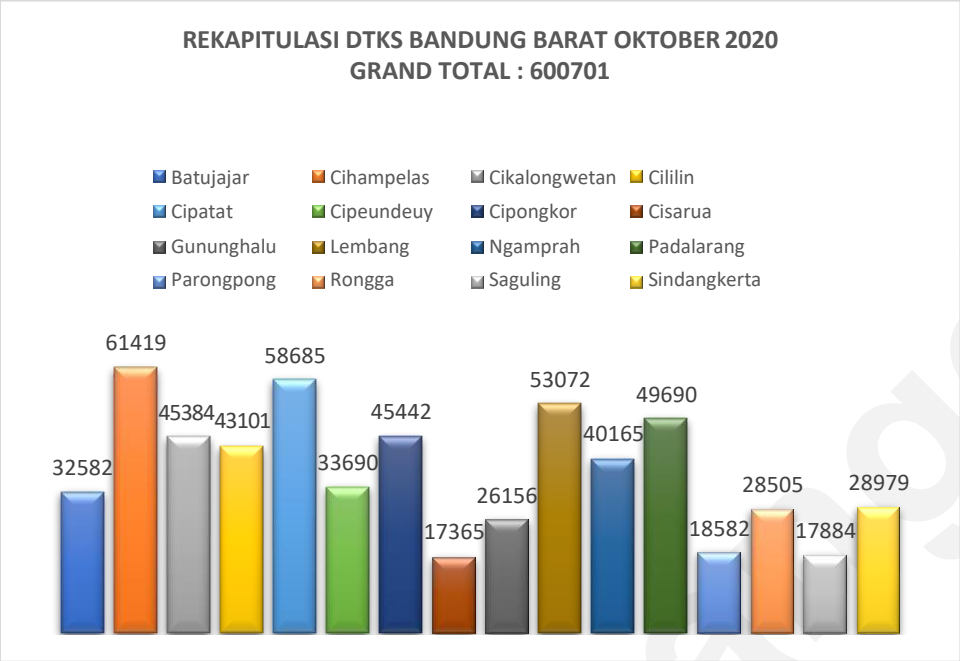
Tahun *Year*	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) *Poverty Line (rupiah/capita/month)*	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) *Number of Poor People (thousand)*	Persentase Penduduk Miskin *Percentage of Poor People*
(1)	(2)	(3)	(4)
2012	...	...	...
2013	...	...	...
2014	...	...	...
2015	275 237	205.69	12.67
2016	...	...	11.71
2017	...	...	11.49
2018	...	...	10.06
2019	341 307	159.03	9.38

Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan, 2012-20219

Tahun *Year*	Indeks Kedalaman Kemiskinan *Poverty Gap Index*	Indeks Keparahan Kemiskinan *Poverty Severity Index*
(1)	(2)	(3)
2012	...	...
2013	...	...
2014	...	...
2015	2.15	0.59
2016	1.92	0.51
2017	2.32	0.71
2018	1.45	0.35
2019	1.54	0.33

5.2.2. Gambaran DTKS Kabupaten Bandung Barat

REKAPITULASI DTKS BANDUNG BARAT OKTOBER 2020



KECAMATAN	DESA	JUMLAH DTKS
BATUJAJAR	Batujajar Barat	4974
	Batujajar Timur	2668
	Cangkorah	4327
	Galanggang	4063
	Giriasih	4730
	Girimukti	794
	Pangauban	6059
	Selacau	4959
BATUJAJAR		32582
CIHAMPELAS	Cihampelas	10026
	Cipatik	5595
	Citapen	5590
	Mekarjaya	7853
	Mekarmukti	6821
	Pataruman	6163
	Singajaya	4022
	Situwangi	6240
	Tanjungjaya	4297
	Tanjungwangi	4812
CIHAMPELAS		61419
	Cikalong	3653
	Cipada	4218
	Ciptagumati	3234
	Cisomangbarat	4984

bappedabangda

KECAMATAN	DESA	JUMLAH DTKS
CIKALONGWETAN	Ganjarsari	3093
	Kanangasari	1610
	Mandalamukti	4810
	Mandalasari	3364
	Mekarjaya	4345
	Puteran	1861
	Rende	3979
	Tenjolaut	2765
	Wangunjaya	3468
CIKALONGWETAN		45384
CILILIN	Batulayang	3619
	Bongas	3941
	Budiharja	2675
	Cililin	5239
	Karanganyar	3698
	Karangtanjung	4118
	Karyamukti	1710
	Kidangpananjung	2407
	Mukapayung	6455
	Nanggerang	2630
	Rancapanggung	6609
CILILIN		43101
CIPATAT	Cipatat	4371
	Ciptaharja	4608
	Cirawamekar	2782
	Citatah	7534
	Gunungmasigit	6860
	Kertamukti	4560
	Mandalasari	5566
	Mandalawangi	4647
	Nyalindung	3406
	Rajamandalakulon	6834
	Sarimukti	2463
	Sumurbandung	5054
CIPATAT		58685
CIPEUNDEUY	Bojongmekar	2260
	Ciharashas	3639
	Cipeundeuy	1892
	Ciroyom	2962
	Jatimekar	2861
	Margalaksana	3670
	Margaluyu	1945
	Nanggeleng	3737
	Nyenang	2496
	Sirnagalih	2236
	Sirnaraja	3032
	Sukahaji	2960
CIPEUNDEUY		33690
	Baranangsiang	3761
	Cibenda	3039
	Cicangkanghilir	2480

bappeda bandung

KECAMATAN	DESA	JUMLAH DTKS
CIPONGKOR	Cijambu	2905
	Cijenuk	3307
	Cintaasih	3545
	Citalem	5103
	Girimukti	3342
	Karangsari	1942
	Mekarsari	2749
	Neglasari	2743
	Sarinagen	4089
	Sirnagalih	3746
	Sukamulya	2691
CIPONGKOR		45442
CISARUA	Cipada	1622
	Jambudipa	2826
	Kertawangi	2961
	Padaasih	3886
	Pasirhalang	1557
	Pasirlangu	1362
	Sadangmekar	1289
	Tugumukti	1862
CISARUA		17365
GUNUNGHALU	Bunijaya	2829
	Celak	3903
	Cilangari	3987
	Gununghalu	2455
	Sindangjaya	1585
	Sirnajaya	3033
	Sukasari	3162
	Tamanjaya	2714
	Wargasaluyu	2488
GUNUNGHALU		26156
LEMBANG	Cibodas	3667
	Cibogo	3491
	Cikahuripan	3553
	Cikidang	1765
	Cikole	4619
	Gudangkahuripan	3605
	Jayagiri	5542
	Kayuambon	1522
	Langensari	4673
	Lembang	4664
	Mekarwangi	1320
	Pagerwangi	2825
	Sukajaya	3887
	Suntenjaya	3202
	Wangunharja	2271
	Wangunsari	2466
LEMBANG		53072
	Bojongkoneng	4880
	Cilame	5888
	Cimanggu	1387

bappeltbangda

KECAMATAN	DESA	JUMLAH DTKS
NGAMPRAH	Cimareme	3028
	Gadobangkong	2803
	Margajaya	3198
	Mekarsari	5636
	Ngamprah	1310
	Pakuhaji	3324
	Sukatani	1371
	Tanimulya	7340
NGAMPRAH		40165
PADALARANG	Cempakamekar	5244
	Ciburuy	5481
	Cimerang	3440
	Cipeundeuy	3389
	Jayamekar	7225
	Kertajaya	5392
	Kertamulya	5378
	Laksanamekar	5174
	Padalarang	6754
	Tagogapu	2213
PADALARANG		49690
PARONGPONG	Cigugurgirang	2916
	Cihanjuang	4576
	Cihanjuang Rahayu	1825
	Cihideung	1176
	Ciwaruga	3128
	Karyawangi	1648
	Sariwangi	3313
PARONGPONG		18582
RONGGA	Bojong	3394
	Bojongsalam	2173
	Cibedug	4838
	Cibitung	4871
	Cicadas	2348
	Cinengah	3437
	Sukamanah	3799
	Sukaresmi	3645
RONGGA		28505
SAGULING	Bojonghaleuang	2193
	Cikande	2867
	Cipangeran	1769
	Girimukti	3446
	Jati	3179
	Saguling	4430
SAGULING		17884
SINDANGKERTA	Buninagara	1634
	Cicangkanggirang	3318
	Cikadu	3123
	Cintakarya	2228
	Mekarwangi	1916
	Pasirpogor	3901
	Puncaksari	2614

bappeda.bandung

KECAMATAN	DESA	JUMLAH DTKS
	Rancasenggang	1767
	Sindangkerta	3604
	Wangunsari	1725
	Weninggalih	3149
SINDANGKERTA		28979
GRAND TOTAL		600701

5.2.3. Gambaran ProKus Kabupaten Bandung Barat

Data ProKus Kabupaten Bandung Barat 2020

Rekapitulasi Hasil Mentoring (1)

Banyak	Kluster				Kelompok Usaha		Dampak Mentoring		% Peningkatan omset	Akses Bank		Kewirausahaan Sosial	
	Kuliner	Agrobisnis	Retail	Fesyen	Start up	Scale up	Ya	Tidak		Ya	Tidak	Ya	Tidak
286	70	83	97	36	92	192	259	24	13484	48	237	120	165
%	24,48	29,021	33,9	12,6	32,2	67,1	90,6	8,39	94,39	17	82,9	42	57,7

Rekapitulasi Hasil Mentoring (2)

Banyak	Kluster				Dampak Mentoring		Akses Bank		Kewirausahaan Sosial	
286	Kuliner	Agrobisnis	Retail	Fesyen	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Jumlah	70	83	97	36	259	24	48	237	120	165
%	24,48	29,021	33,9	12,6	91	8,39	17	82,9	42	57,7

Sumber: Data Dinas Sosial KBB, 2021

5.3. PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

5.3.1. Pemberdayaan Koperasi di Kabupaten Bandung Barat

5.3.1.1. Gambaran Koperasi di Kabupaten Bandung Barat

Koperasi merupakan organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.

Tujuan utama dari koperasi di Kabupaten Bandung Barat ditujukan untuk kesejahteraan

bappelitbangda

anggota dan masyarakat sekitar sedangkan fungsinya meningkatakn perekonomian anggota dan masyarakat sekitar sehingga kualitas dan taraf hidup anggota koperasi semakin maju.

Sumber Modal Koperasi untuk menjalankan kegiatan usahanya terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman, Modal sendiri pada koperasi di Kabupaten Bandung Barat meliputi sumber modal sebagai berikut: a) Simpanan Pokok, b). Simpanan Wajib, c) Simpanan khusus/lain-lain misalnya:Simpanan sukarela, d) Dana Cadangan dan e) Hibah.

Berdasarkan jenis kelompok koperasi di Kabupaten Bandung Barat, Meliputi koperasi : KUD (Koperasi Unit Desa, KPRI /fungsional (Koperasi Pegawai Republik Indonesia), KOPKAR (Koperasi Karyawan), KOPPAS (Koperasi Pasar) dan KOPJAS (Koperasi Jasa).

Koperasi di Kabupaten Bandung Barat

No	Kecamatan	Konsumen	Produsen	Simpan Pinjam	Jasa	Pemasaran
1	Batujajar	30	1	2	1	0
2	Cihampelas	28	0	4	3	0
3	Cipatat	39	0	3	1	0
4	Cikawet	19	0	6	1	0
5	Cililin	45	1	8	4	0
6	Cipeundeuy	23	0	5	4	0
7	Cipongkor	28	3	4	2	0
8	Cisarua	25	2	3	0	0
9	Gununghalu	31	0	2	1	0
10	Lembang	53	1	11	4	0
11	Ngamprah	78	0	20	6	0
12	Padalarang	84	0	9	2	0
13	Parongpong	27	1	5	5	0
14	Rongga	13	0	0	0	0
15	Saguling	9	0	0	0	0
16	Sindangkerta	32	0	2	1	0

Koperasi aktif terbanyak ada di Kecamatan Ngamprah.Terjadi penurunan jumlah koperasi aktif sibandingkan tahun 2019.Jenis koperasi terbanyak adalah KPRI atau Fungsional yaitu koeprasi untuk ASN, TNI dan POLRI. Berikut menunjukan data Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi, Koperasi Aktif, Anggota dan Koperasi Unggulan di Kabupaten Bandung Barat.

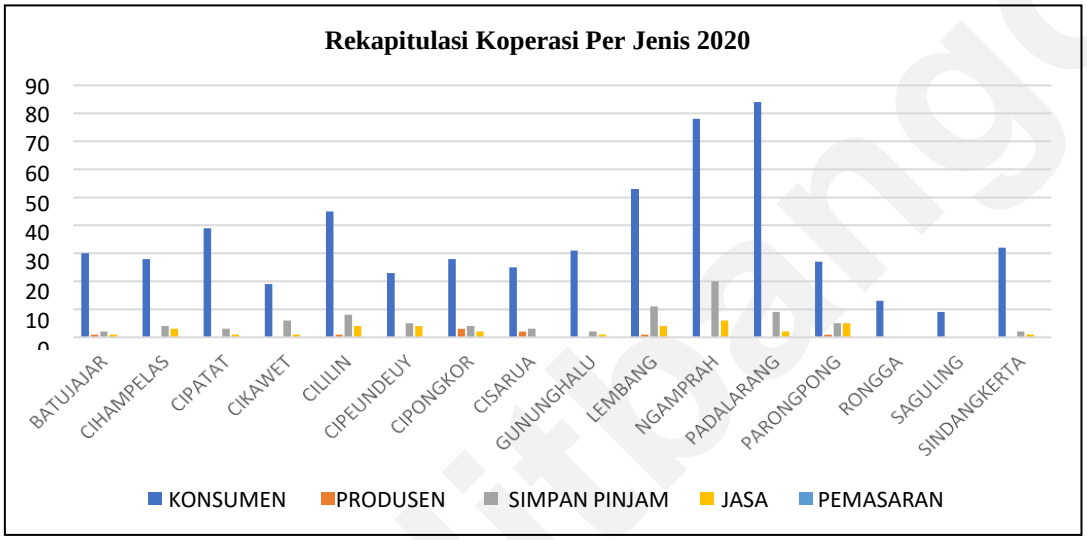
bappelitbangda

Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, 2020

Kecamatan *Subdistrict*	Jenis Koperasi/ Kind of Cooperative									
	KUD		KPRI/fungsional		KOPKAR	KOPPAS		KOPJAS		Jumlah *Total*
(1)		(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	(7)
Rongga	0		2	0		0		0		2

Sumber : BPS Kab. Bandung Barat. 2021

Data Koperasi Per-Jenis Di Kabupaten Bandung Barat



Koperasi Pondok Pesantren di Kabupaten Bandung Barat

No.	Nama Koperasi	Alamat	Kecamatan
1	Koperasi Konsumen Pondok Pesantren Mina Laka Utama	Kp. Dawuan RT 004 / 005 Ds.Cijenuk Kec. Cipongkor	Cipongkor
2	Koperasi Darun Nasya Lembang	Jl. Pasir handap RT 001/014 Ds. Pagerwangi Kec. Lembang	Lembang
3	Koperasi Konsumen Pondok Pesantren Darul Inayah	Jl. Kampung Cipeusing RT 004/004 Ds. Kertawangi Cisarua	Cisarua
4	Koperasi Konsumen Pondok Pesantren Al-Hidayah Mandiri Gunung Halu	Jl. Pamokolan RT 003/001 Bunijaya Gununghalu	Gununghalu
5	Koperasi Konsumen Pondok Pesantren Darussyifa Bandung Barat	Kp. Cikahuripan RT 004/004 Ds. Cijenuk Kec. Cipongkor	Cipongkor
6	Koperasi Pondok Pesantren Al-Mashdiqiyah Cibalok	Kp. Cibalok RT 001/004 Ds. Citalem Kec. Cipongkor	Cipongkor
7	Koperasi Konsumen Pondok Pesantren Al-Istiqomah Nurul Ikhsan	Kp. Cipari RT 003/006 Ds. Mukapayung Kec. Cililin	Cililin
8	Koperasi Produsen Pondok Pesantren Al-Zuaeni Sarongge	Jl. PLTA Saguling KM 02 RT 001/003 Ds. Mekarsari Cipongkor	Cipongkor
9	Koperasi Produsen Pondok Riyadul Mutaalimin Perelas	Kp. Perelas RT 002/ 010 Ds. Budiharja Kec. Cililin	Cililin
10	Koperasi Konsumen Pondok Pesantren Santri Miftahul Falah Sejahtera Cihampelas	Kp. Selakopi RT 006/008 Ds. Cihampelas Kec. Cihampelas	Cihampelas

bppelitbangda

Koperasi Unggulan Skala Besar di Kabupaten Bandung Barat Tahun

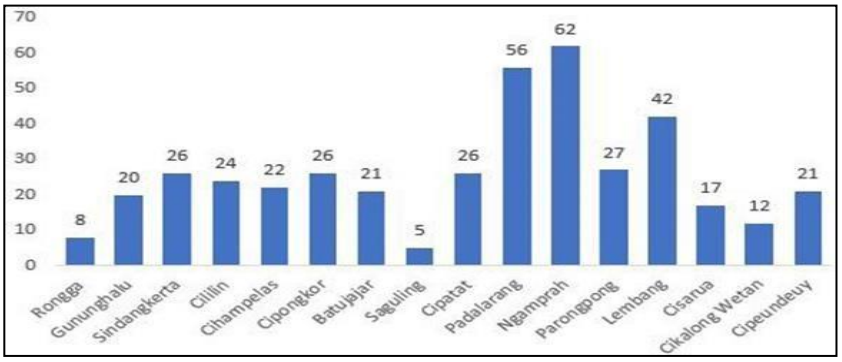
No	Nama Koperasi	Alamat	Kecamatan
1	Koperasi Karyawan Sarana Makin Makmur	Jl. Raya Cimareme No.273 RT 001 RW 001	Ngamprah
2	Koperasi Karyawan Primantara	Jl. Raya Caringin No.353 RT. 01 Rw.10	Padalarang
3	Koperasi Pegawai Republik Indonesia Keluarga Guru Padalarang	Jl. Letkol. Ga. Manullang 70 A RT.01 Rw.04	Padalarang
4	Koperasi Pengusaha Kecil Pedagang Sayur Mayur Mekar Mulya	Jl. Marga Mulya No.8-A RT. 03 RW. 07	Sindangkerta
5	Primer Koperasi Kartika Tribuana IV	Jl. Raya Batujajar No. 108	Batujajar
6	Koperasi Warga Politeknik Bandung	Jl. Geger Kalong Hilir	Parongpong
7	Koperasi Karyawan PLTA Saguling	Komplek PLN Cioray Tromol Pos 7	Cipatat
8	Koperasi Unit Desa Sarwa Mukti	Jl. Kolonel Masturi RT: 03 RW: 08	Cisarua
9	Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara KPSBU Lembang	Komplek Pasar Baru Lembang KKB	Lembang
10	Koperasi Pegawai Republik Indonesia Simpathi Lembang	Jl. Kehutanan No. 1, LEMBANG	Lembang
11	Koperasi Karyawan PT. PLN Sektor Cirata Koserta	Jl. Komp. Base Camp Utama Plta Cirata	Cipeundeuy

Koperasi Aktif Menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, 2017–2020

Kecamatan	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rongga	5	7	7	8
Gununghalu	14	26	27	20
Sindangkerta	28	30	30	26
Cililin	27	31	31	24
Cihampelas	16	22	24	22
Cipongkor	21	26	26	26
Batujajar	23	24	23	21
Saguling	7	4	5	5
Cipatat	18	26	26	26
Padalarang	54	77	80	56
Ngamprah	46	96	98	62
Parongpong	27	30	30	27
Lembang	50	58	60	42
Cisarua	18	19	19	17
Cikalong Wetan	14	16	16	12
Cipeundeuy	19	25	25	21
Bandung Barat	387	517	527	415

Sumber : BPS Kab. Bandung Barat. 2021

Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, 2020



JUMLAH KOPERASI DAN JUMLAH ANGGOTA KOPERASI 2020						
NAMA KECAMATAN	KOPERASI			JUMLAH ANGGOTA		
	JML	AKTIF	TDK	L	P	JML
LEMBANG	69	53	16	3.888	2.913	6.801
PADALARANG	95	65	30	4.844	4.573	9.417
NGAMPRAH	104	62	42	4.844	4.573	9.417
CISARUA	30	17	13	1.171	485	1.656
CIPATAT	43	26	17	308	269	577
PARONGPONG	38	27	11	1.526	3.381	4.907
CIPEUNDEUY	32	19	13	1.467	1.487	2.954
CIKALONGWETAN	26	12	14	1.038	811	1.849
BATUJAJAR	34	19	15	952	909	1.861
CIHAMPELAS	35	22	13	1.408	1.611	3.019
RONGGA	13	8	5	174	169	343
CILILIN	58	24	34	506	601	1.107
SINDANGKERTA	35	27	8	688	923	1.611
CIPONGKOR	37	25	12	382	536	918
GUNUNGHALU	34	20	14	1.379	1.026	2.405
SAGULING	9	5	4	705	433	1.138
JUMLAH	**692**	**431**	**261**	**25.280**	**24.700**	**49.980**

JUMLAH KOPERASI DAN JUMLAH ANGGOTA KOPERASI 2020

KOPERASI		JUMLAH ANGGOTA	
JML	: 692	L	: 25.280
AKTIF	: 431	P	: 24.700
TDK	: 261	JML	: 49.980

Sumber : Kabupaten Bandung Barat, 2021

Berdasarkan Data Skunder liputan wawncara, 31 Agustus 2020. Menurut Kabid Koperasi “Taruna Teguh, Menunjukan : jumlah koperasi di KBB 662 Koperasi, yang aktif

bappeltibanda

430 Koperasi, yang sudah menjalani RAT (Rapat Anggota Tahunan) sejumlah 164 Koperasi dan 228 Koperasi di KBB dalam pengawasan Kementrian KUKM. Disamping itu, kaitanya dampak COVID bagi kelembagaan koperasi relative tidak ada, dampaknya ke anggota koperasi.

5.3.1.2. Gambaran Pemberdayaan Koperasi di Kabupaten Bandung Barat

Pemberdayaan koperasi merupakan upaya yang membangun daya pengurus koperasi dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya, dalam melakukan pemberdayaan Koperasi melalui menumbuhkan iklim usaha, dan aspek – aspek sebagai berikut : a). Kelembagaan, b) produksi, c) pemasaran. d) keuangan; dan e). inovasi dan teknologi. Dalam perencanaan pemberdayaan berdasarkan atas permasalahan – permasalahan dalam aspek – aspek koperasi.

Berdasarkan hasil pengolahan data skunder menunjukan permasalahan – permasalahan yang teridentifikasi dihadapi koperasi di kabupaten bandung barat sebagai berikut :

1. Koperasi kurang diminati masyarakat karena faktor imej dan ketidakpercayaan masyarakat
2. Masyarakat belum memanfaatkan keberadaan Koperasi, sebagian masih tertarik bank Emok (Rentenir)
3. Pemahaman generasi muda terhadap koperasi masih rendah
4. Jumlah koperasi di KBB yang aktif sekitar 400. Dari jumlah koperasi kurang lebih sebanyak 600, (Ujar Taruna).
5. Kualitas kelembagaan koperasi masih kurang, sehingga terlihat pola pengusahaannya sulit berkembang;
6. Manajemen usaha koperasi belum optimal, sehingga mengakibatkan banyaknya jumlah koperasi yang tidak aktif;
7. Sumber daya manusianya kurang profesional dan kompeten
8. Budaya kerja keras dan disiplin yang rendah
9. jaringan pemasaran, Penggunaan tekhnologi dan informasi yang minim;
10. Kesulitan modal/Akases permodalan bagi koperasi masih rendah.
11. Pesaing baik dari sesama badan usaha koperasi maupun dari badan usaha lainnya.

Berikut menunjukan pemberdayaan Koperasi di Kabupaten Bandung Barat, sebagai berikut :

1. Bimbingan Teknis Perpajakan Koperasi kepada 30 penggiat koperasi yang aktif beroperasi yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Dinas KUKM) Kabupaten Bandung Barat (Selasa, 30/7).

bappelitbangda

2. Seskoau menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) Primkopau Seskoau Tahun Buku 202 yang dihadiri seluruh anggota koperasi Seskoau di Grha Widya Dirgantara, Seskoau, Lembang. Kamis (11/2/2021).
3. Program Advokasi bagi Koperasi.

5.3.2. Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bandung Barat

5.3.2.1. Gambaran UMKM di Kabupaten Bandung Barat

UMKM Merupakan suatu aktivitas atau kegiatan ekonomi yang menjadi penggerak pembangunan seperti industri manufaktur, agribisnis, agraris, dan juga sumberdaya manusia. Dalam arti ini mengindikasikan bahwa UMKM ini mengandung arti pemulihan perekonomian dengan melalui pengembangan berbagai sektor melalui pemberdayaan yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan,

Pada saat ini potensi usaha di Kabupaten Bandung Barat sangat beragam. Hampir semua produk yang dibutuhkan baik primer maupun sekunder terdapat dengan lengkap. Dengan skala usaha mikro, kecil dan menengah tersebar di wilayah Kecamatan Kabupaten Bandung Barat, seperti. Kuliner, fashion, handy craft, jasa, warungan, dan lainnya, seperti tergambar dalam tabel dibawah ini.

Rekap Data Persektor Usaha (UMKM) Di Kabupaten Bandung Tahun 2020

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Pelaku	Sektor Usaha					
			KULINER	FASHION	HANDY CRAFT	JASA	WARUNGAN	LAINNYA
1	Batujajar	724	220	58	36	47	315	48
2	Cihampelas	719	215	20	277	11	121	75
3	Cikalongwetan	353	132	12	37	19	107	46
4	Cililin	314	182	24	27	6	40	35
5	Cipatat	924	240	13	45	69	450	107
6	Cipeundeuy	1396	82	7	119	13	299	876
7	Cipongkor	478	210	21	117	22	15	93
8	Cisarua	879	229	9	48	109	364	120
9	Gununghalu	319	57	14	17	23	152	56
10	Lembang	1766	514	71	107	144	736	194
11	Ngamprah	1890	835	289	132	134	331	169
12	Padalarang	1609	715	65	216	89	457	67

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Pelaku	Sektor Usaha					
			KULINER	FASHION	HANDY CRAFT	JASA	WARUNGAN	LAINNYA
13	Parongpong	234	97	12	8	13	39	65
14	Rongga	197	58	6	18	74	29	12
15	Sindangkerta	304	93	3	20	24	154	10
16	Saguling	127	23	0	9	6	88	1
TOTAL		**12233**	**3902**	**624**	**1233**	**803**	**3697**	**1974**

Berdasarkan Rekap data Usaha skala UMKM di Kabupaten Bandung Barat, Menunjukan usaha terbayak didominasi oleh usaha warungan, disusul usaha kuliner dan ke tiga terbanyak adalah usaha lainya yang meliputi : kulit kayu logam anyaman gerabah / keramik / bata. Kain tenun, boneka. Tas dan lain lain.

Produk Unggulan Kabupaten Bandung Barat

No	Nama KUMKM	Komoditi Produk	No	Nama KUMKM	Komoditi Produk
1	Salsyah (Kerudung Lukis)	Pakaian /Fashion	37	Perajin Golok Kerja	Kerajina Golok
2	Layyina	Asesoris Dan Rajut	38	Uppks Kenanga	Tape Ketan Instan
3	Cangkir/ Teko Bambu	Kerajinan Tangan /Handycraft	39	Wayang Golek	Ukiran Kayu
4	Furniture Bambu	Kerajinan Tangan /Handycraft	40	CV KLG ALAM JAYA	Cobek Batu
5	Aneka Tas	TAS	41	LEGIETA	Wajit/Dodol Kacang (Makanan)
6	Kerajinan Tulang Ikan	Kerajinan Tangan/Handycraft	42	UKIR KAYU GOLOK	Kerajinan Golok
7	Osumi Bordir	Aneka Bordir	43	Kerajinan Eceng Gondok	Handycraft
8	Tumatris	Wayang Kreasi	44	TELOR ASIN	Makanan
9	Uppks Kasih Ibu	Makanan Olahan Singkong	45	SEPATU LUKIS	Sepatu Lukis
10	Edo Collection	Pakaian Payet	46	Ridwan Galery	Lukisan
11	Ook	Kerajinan Batok	47	Tanaya	Keripik Panggang (Makanan)
12	Kartika Wangi	Aneka Olahan Jamur	48	EFRIN KREASI	Kerajinan Bambu

bappelitbangda

No	Nama KUMKM	Komoditi Produk	No	Nama KUMKM	Komoditi Produk
13	Telor Ayam Asin Bakar	Makanan	49	Kerajinan Onik	Kerajinan Patung Porcelain
14	Tania Asesoris	Asesoris	50	Miniatur Gitar & Lukisan Kaca	Pajangan Resin
15	Ma-Mi Barokah	Minuman	51	Aneka Rajutan, Resin Sintetis	Asesoris
16	La-Craft	Glass Art	52	Tas Kulit Buaya	Tas
17	Aneka Peyek & Saroja	Makanan	53	ARIESTA CRAFT	Pot Bunga
18	JATI JAYA FRAME	Bingkai Lukisan	54	Aneka Alat Pijat Badan Reflexiology	Alat Pijat
19	Furniture Bambu	FURNITURE	55	RUMAH BATIK	Pakaian
20	Opak Aci Sampeu	Makanan	56	Lukisan Serbuk Gergaji	Lukisan
21	Anyaman Bambu	Kerajinan Tangan/Handycraft	57	BU ETI YITNO	Keripik Panggang
22	Ukiran Alat Pancing	Peralatan Pancing	58	Iis Aisyah	Kerajinan Daur Ulang
23	SENI GEMBOL	Ukiran Kayu	59	KARYA CIPTA	Miniatur Binatang
24	PERAJIN GENDANG	Alat Musik	60	Cv.Sinergi Wijaya	Rosellaa (Makanan Dan Minuman)
25	WAYANG GOLEK	Ukiran Kayu	61	R&R	Semprong (Makanan)
26	HILMA COLLECTION	Aneka Bordir	62	NABILA	Simping (Makanan)
27	Gadiza Collection	Sandal Kreasi	63	ARBIE	Aromanis (Makanan)
28	Terryza Craft	Kerajinan Limbah Bambu	64	Trinanda Mulya	Stik Dasi (Makanan Ringan)
29	Olahan Makanan Ringan	Makanan Ringan	65	VANIA	Jamur Tiram
30	SOUVENIR ANGKLUNG	Souvenir	66	G3	Kue Pia (Makanan)

bappeltpanga

No	Nama KUMKM	Komoditi Produk	No	Nama KUMKM	Komoditi Produk
31	PAKAIAN PAYET	Pakaian Payet	67	WAHDAH	Kerudung Lukis (Pakaian)
32	KUE PHIA	Makanan	68	OSCAR FOOD	Pepetek (Makanan)
33	Telor Asin Organik	Makanan	69	FUJA SARI	Wajit (Makanan)
34	Rumah Crispy	CRISPY SINGKONG	70	GEMILANG	Lampu Hias Dan Furniture
35	SOCA	Kerajinan Batok Kelapa	71	GULA AREN	Gula Aren
36	AL-MARIAH	Kerajinan Batu Alam			

5.3.2.2. Gambaran Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bandung Barat

Pemberdayaan UMKM merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan serta mengurangi tingkat kemiskinan. Pemberdayaan merupakan proses penciptaan kemandirian UMKM melalui berbagai program dalam mengatasi permasalahan UMKM.

UMKM di Kabupaten Bandung Barat, Memiliki peranan sebagai berikut ;

1. Memberikan Pelayanan Ekonomi Kepada Masyarakat, Proses Pemerataan Dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Serta Mewujudkan Stabilitas KBB.
2. Membantu Pemerintah dalam hal penciptaan Lapangan Kerja.
3. Tulang Punggung Perekonomian daerah dan Merupakan Populasi pelaku Usaha Dominan.
4. Menghasilkan PAD.
5. Menyumbang Ekspor
6. Wadah Untuk Penciptaan Wirausaha Baru;
7. Kemampuan Memanfaatkan bahan Baku Dan Sumber Daya Lokal Yang Mudah Ditemukan Dan Tersedia Di Sekitar Sehingga Menghemat Devisa.
8. Mengurangi Kemiskinan.

Disamping memiliki peranan yang besar, UMKM di Kabupaten Bandung Barat. Memiliki Permasalahan – permasalahan yang teridentifikasi sebagai berikut:

bappelitbangda

1. Permasalahan pasar, pemasaran dan akases pasar / Jaringan Pasar.
2. Permasalahan permodalan masih terbatas; dan akses permodalan.
3. Permasalahan Manajemen usaha dan Kualitas kelembagaan, Kualitas SDM.
4. Terbatasnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor.
5. Permasalahan Bahan Baku.
6. Permasalahan Teknologi Tepat Guna.
7. Permasalahan Teknologi Informasi dan Digital Marketing.
8. Belum Terakomodir UMKM ke Pasar Modern.
9. Terbatasnya Bantuan pelatihan, Bimbingan Teknis dan PENDAMPINGAN Usaha.

Disamping itu permasalahan – permasalahan diatas, permasalahan baru dengan adanya COVID 19, memberikan dampak negative sebagai berikut: Sebanyak 12 ribu Usaha Mikro, omset usaha menurun 80-90 persen Terutama, kata dia, pelaku usaha yang bergerak di bidang kuliner, apalagi dengan tutupnya tempat wisata, karena para pelaku usaha mikro banyak berjualan di sana atau menitipkan produknya di tempat-tempat wisata." (Ujar Wewen)

Berikut menunjukan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bandung sebagai berikut:

1. Fasilitasi Program bantuan Tunai / BanPres, bagi Pengusaha Mikro dan Ultra Mikro di KBB Bisa sebesar Rp2,4 Juta, per pelaku usaha.
2. Pembinaan, kemitraan dan pemasaran bagi para pelaku usaha mikro di KBB sebelum adanya Covid (Januari – Maret 2020).
3. bantuan berupa paket sembako dari Bupati.
4. Bupati Faisilitasi pengadaan 75.000 masker non medis dan APD dimasa COVID yang diserahkan pengerjaanya bagi UKM.
5. Kemitraan UMKM dengan dengan Indomart dan pelaku usaha besar lainnya untuk mendorong pemasaran produk UMKM.
6. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) pelaksanaan program kredit usaha rakyat (KUR) dan penggunaan sistem informasi kredit program (SIKP) terhadap pelaku UMKM bekerjasama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI wilayah Provinsi Jawa Barat.
7. Ekpo / Gelar Prodak Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) tingkat Kabupaten. Yang akan dilaksanakan Minggu (8/09/2019) di Plaza Mekarsari Ngamprah. menampilkan produk unggulanya mulai dari Kuliner, Fashion dan Handy Craf.
8. Kerjasama dengan Wellcode.io, Teknologi, dan Prinsip Gotong Royong mendukung pengembangan teknologi sektor UMKM di Bandung Barat dengan World Class

bappeltbangda

Concept & Mindset.

9. Kerjasama Forum UMKM KBB dan Wakaf Salman ITB, melalui Wakaf Produktif berupa bantuan modal tanpa riba
10. Pemkab KBB, Bantu Usaha Kecil, melalui Promosi Produk UMKM Secara Gratis
11. Kemitraan / Kolaborasi / fasilitasi Komunitas Wayang Cepot dengan IKEA Kota Baru Parahyangan
12. Sosialisasi Pajak bagi 90 Pelaku Bandung Barat.
13. Fasilitasi Kerjasama bank bjb dengan Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (HIPMIKIMDO) Kabupaten Bandung Barat, yang meliputi penghimpunan dana (Funding), aneka layanan transaksi perbankan. penyaluran dana atau pemberian pinjaman (Lending), bagi HIPMIKIMDO Bandung Barat.
14. Fasilitasi Pelatihan Riset Pasar, Digital Marketing dan Sosialisasi Halal untuk ibu-ibu pelaku UMKM dari Laznas Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Jawa Barat

5.4. RPJMD KABUPATEN BANDUNG BARAT

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen Perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan Kabupaten Bandung Barat.

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat 2018-2023 dirumuskan sebagai berikut:

“Bandung Barat yang AKUR (Aspiratif, Kreatif, Unggl, dan Religius) dan berbasis pada pengembangan ekonomi, optimalisasi sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia”.

Sementara Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas melalui jaminan akses dan pemerataan terhadap layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan keagamaan
2. Memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar sebagai penunjang mobilitas masyarakat dan pengembangan ekonomi, sosial, dan budaya
3. Menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis kearifan lokal dan kreativitas
4. Melakukan optimalisasi potensi sumber daya alam dan budaya untuk pengembangan pariwisata ramah lingkungan

5. Menguatkan keunggulan pertanian, peternakan, dan industri yang merata melalui optimalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi
6. Mengurangi kesenjangan masyarakat dengan kebijakan yang *pro-poor, projob, pro-growth,* dan *pro-environment*
7. Mengembangkan sistem pemerintahan yang bersih, aspiratif, inovatif dan melayani berbasis inovasi dan teknologi.

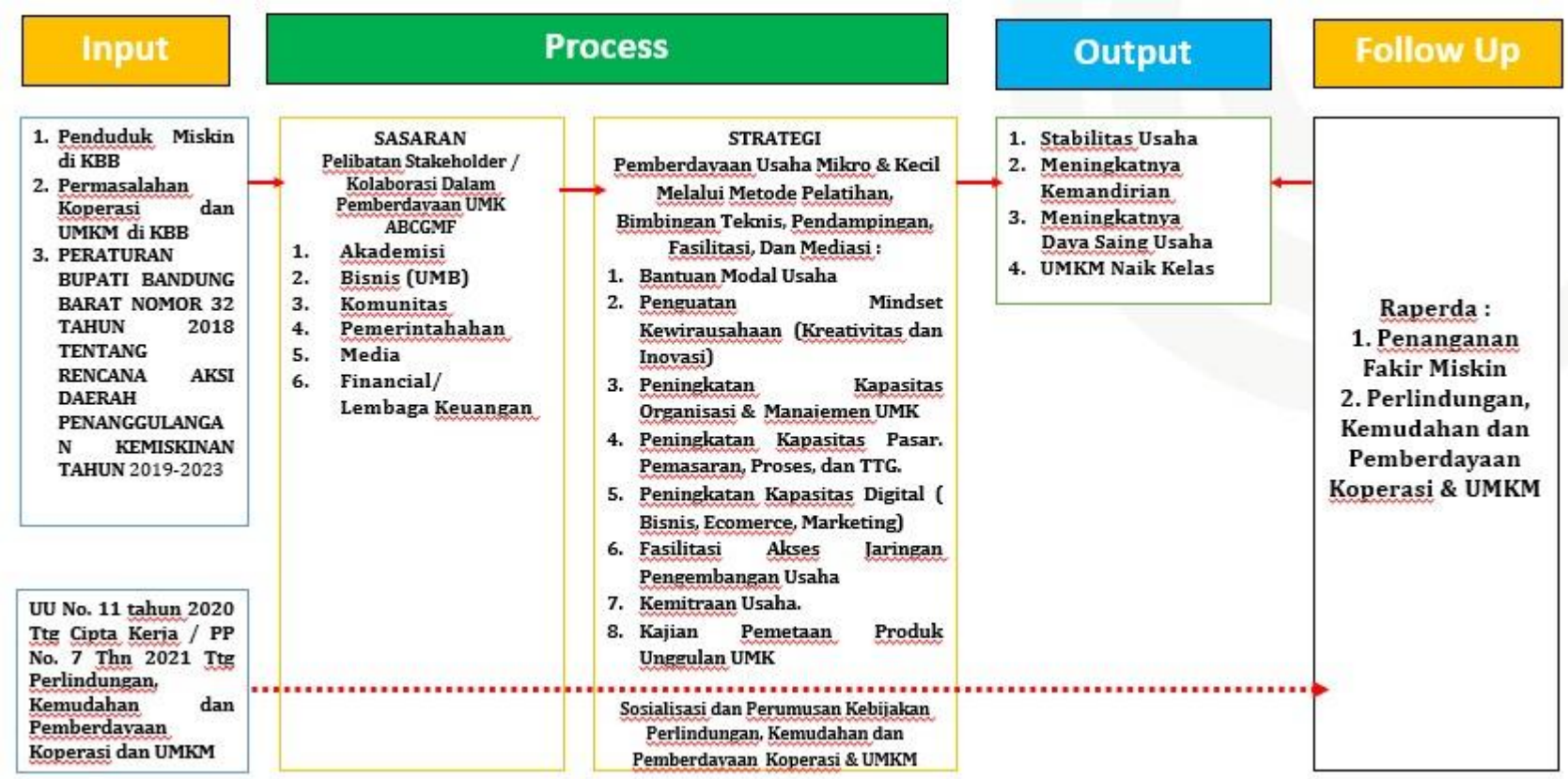
5.5. MODEL PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM DI KABUAPTEN BANDUNG BARAT

5.5.1. MODEL UMUM

Di bawah ini digambarkan model penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan koperasi dan UMKM di Kabupaten Bandung Barat. Model ini terdiri dari 4 (empat) aspek, yaitu: (1) masukan (*input*); proses (*process*), yang terbagi ke dalam sasaran/target dan strategi; luaran (*output*), dan tindak lanjut (*follow-up*).

bappelitbangda

Gambar 5.5.1. Model Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Bandung Barat



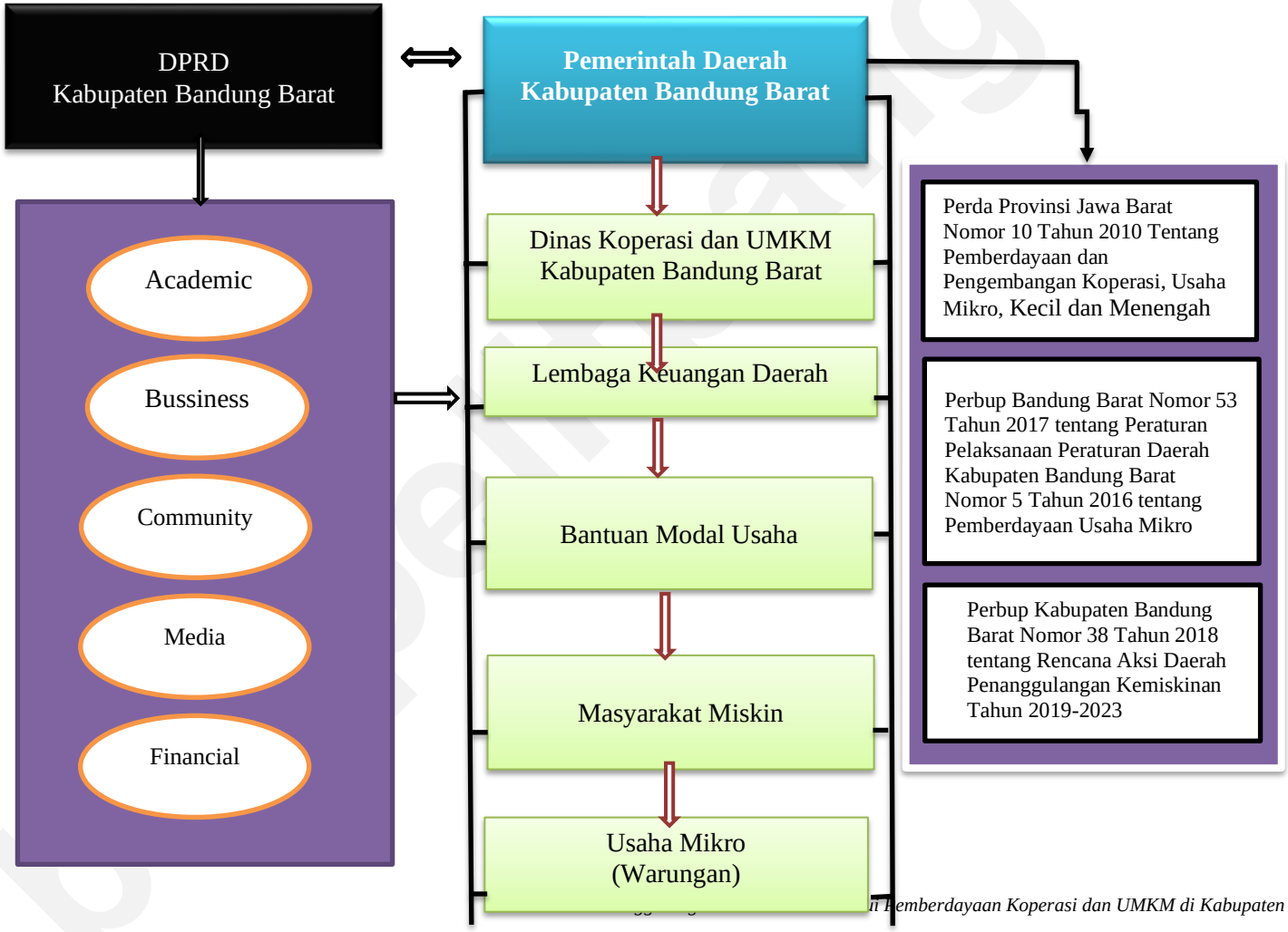
Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa model Model Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Bandung Barat diawali dengan (1) masukan (*input*): penduduk miskin, permasalahan koperasi dan UMKM, dan Peraturan Bupati; (2) proses (*process*), yang terdiri dari sasaran dan strategi. Sasarannya adalah pelibatan dan kolaborasi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK), yaitu (a) akademisi; (b) bisnis; (c) komunitas; (d) pemerintahan; (e) media; (f) finansial (lembaga keuangan) dan strateginya adalah pemberdayaan UMK melalui pelatihan, bimbingan teknis, fasilitasi, dan mediasi, yakni dalam bentuk (a) bantuan modal usaha; (b) penguatan *mindset* kewirausahaan (kreativitas dan inovasi); (c) peningkatan kapasitas organisasi dan manajemen UMK; (d) peningkatan kapasitas pasar, pemasaran, proses, TTG (Teknologi Tepat Guna); (e) peningkatan kapasitas digital (bisnis, *ecommerce*, marketing); (f) fasilitas akses jaringan pengembangan usaha; (g) kemitraan usaha; dan (h) kajian pemetaan produk unggulan UMK. Sedangkan (3) hasil (*ouput*) yang dihasilkan adalah (a) stabilitas usaha, meningkatnya kemandirian, meningkatnya daya saing usaha, dan UMKM naik kelas. Sementara, dari hasil kajian ini diperlukan

adanya tindak lanjut (*follow-up*), yaitu penyusunan Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) Kabupaten Bandung Barat, yaitu (a) Penanganan Fakir Miskin dan (b) Perlindungan, Kemudahan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

5.5.2. MODEL KHUSUS

5.5.2.1 Mode Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Warungan di Kabupaten Bandung Barat

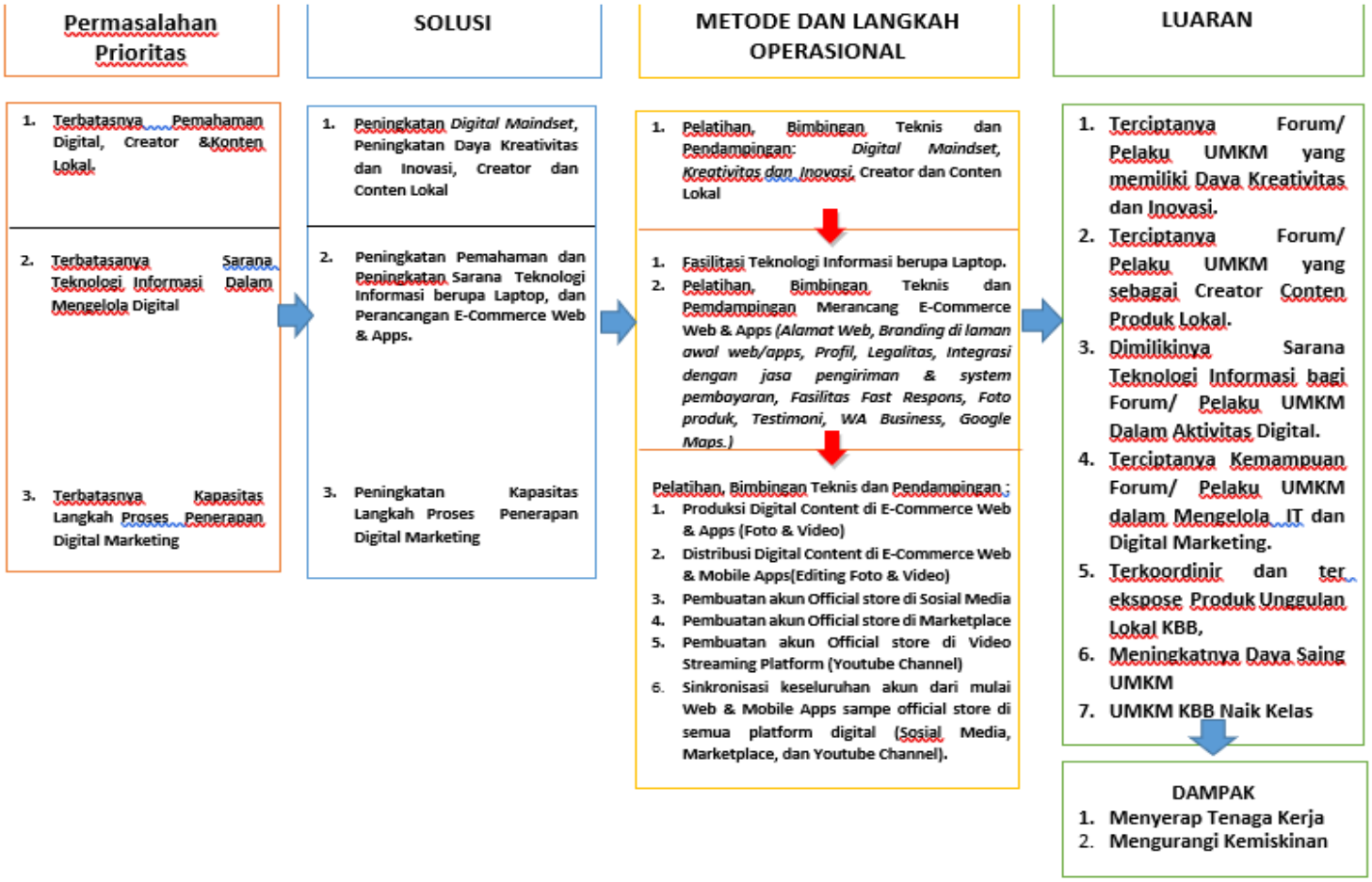
Gambar 5.5.2.1 Mode Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Warungan di Kabupaten Bandung Barat



5.5.2.2 Model Pemberdayaan Forum UMK Melalui Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi dan Digital Marketing Berbasis Creator dan Conten Lokal Kabupaten Bandung Barat

Gambar 5.5.2.2 Model Pemberdayaan Forum UMK Melalui Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi dan Digital Marketing Berbasis Creator dan Conten Lokal Kabupaten Bandung Barat

MODEL KHUSUS



Pada gambar 5.5.2.2. mengenai Pemberdayaan Forum UMK Melalui Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi dan Digital Marketing Berbasis Creator dan Conten Lokal Kabupaten Bandung Barat, dapat dijelaskan bahwa model ini sifatnya lebih operasional. Model ini mencakup 4 aspek penting, yaitu: (1). Permasalahan prioritas; (2) Solusi; (3) Metode dan langkah operasional; dan (4). Luaran. Model ini adalah model pemberdayaan forum UMK melalui peningkatan kapasitas Teknologi Informasi dan Digital Marketing Berbasis Creator dan Content Lokal Kabupaten Bandung Barat. Model ini mengisyaratkan pentingnya peran TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) dan digital marketing. Disamping itu juga, perlunya kreativitas dan inovasi, baik dalam metode dan teknik marketing/pemasaran maupun substansi (*content*).

Untuk itu, perlu rancangan (*design*) untuk menciptakan UMK yang berbasis TIK dan digital marketing. UMK yang belum berbasis TIK dan digital marketing perlu segera mewujudkannya, karena akan tertinggal dengan UMK lainnya yang sudah dulu adaptif terhadap perubahan zaman, yakni UMK yang sudah mengaplikasikan TIK dan digital marketing dalam melakukan aktivitas usahanya.

BAB VI
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. KESIMPULAN

1. Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat perlu mempertimbangkan berbagai dimensi, baik dimensi ekonomi, budaya, maupun struktural.
2. Koperasi dan UMKM memiliki peran dan kontribusi yang besar. Namun, masih dihadapkan pada permasalahan, baik internal maupun eksternal. Di sisi lain, adanya peluang dan potensi untuk berkembang.
3. Model Penanggulangan Kemiskinan melalui pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil hendaknya menjadi pedoman, untuk Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat.

6.2. REKOMENDASI

1. Penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan koperasi dan UMKM telah menjadi komitmen dan *political will* Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan dan mengembangkan usaha di sektor koperasi dan UMKM.
2. Rencana Aksi Daerah (RAD) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tentang Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil diprioritaskan dalam bentuk Bantuan Modal Usaha bidang Kuliner, Warungan, Fashion, Handicraf, Jasa dan lainnya. Dinas Sosial dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Bandung Barat menjadi *leading sector* dalam pelaksanaan RAD ini.
3. Diperlukannya Kajian Pemetaan Produk Unggulan UMKM untuk memberikan informasi yang jelas mengenai Potensi Prioritas Pengembangan UMKM di Kabupaten Bandung Barat. Untuk itu, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah hendaknya melakukan kajian tentang Pemetaan Produk Unggulan UMKM.
4. Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat diperlukan Peraturan Daerah tentang Penanganan Fakir Miskin. Untuk itu, Dinas Sosial bersama DPRD Kabupaten Bandung Barat hendaknya menyusun Naskah Akademik dan Raperda Penanganan Fakir Miskin.
5. Pengembangan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Bandung Barat diperlukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan, Kemudahan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

bappelitbangda

Untuk itu, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah bersama dengan DPRD Kabupaten Bandung Barat hendaknya menyusun Naskah Akademik dan Raperda Perlindungan, Kemudahan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

6. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Bandung Barat perlu Sinergitas dan Kolaborasi dari unsur *Academic, Business, Community, Government, Media, dan Financial* (ABCGMF) melalui Sosialisasi, Fasilitasi, Penerapan TTG, Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan.

bappelitbangda

DAFTAR PUSTAKA

Abdurohim,D. (2021). *Pengembangan UMKM (Kebijakan, Strategi, Digital Marketing dan Model Bisnis UMKM)*. Penerbit : Refika Aditama, Bandung.

Abdurohim, D. (2020). *Strategi Pengembangan Kelembagaan UMKM*. Penerbit : Bintang Pustaka Madani, Yogyakarta.

Brown, D. (1995) "Poverty-Growth Dichotomy". Uner Kirdar dan Leonard Silk (eds.), *People: From Impoverishment to Empowerment.* New York: New York University Press

Chambers, R. (1995). Poverty and Livelihoods: Whose Reality Counts? Uner Kirdar dan Leonard Silk (eds.), *People: From Impoverishment to Empowerment.* New York: New York University Press

Dubois, B & Karla, K. (1992). *Social Work: An Empowering Profession*, Boston: Allyn and Bacon

Friedman, J. (1992). *Empowerment: The Politics of Alternative Development.* Cambridge: Blackwell.

Huraerah, A. (2011). *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*, Edisi Kedua. Bandung: Humaniora

Ife, J. (1995). *Community Development: Creating Community Alternatives,Vision, Analysis and Practice*, Longman, Australia.

Ikatan Akutansi Indonesia (IAI). (2012)

Kartasapoetra, A.G. (2003). Teknologi Benih. Pengolahan Benih dan Tuntunan Praktikum. PT. RadjaGrafindo Persada. Jakarta.154

Mubyarto. (1998). *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Peranan Ilmu-Ilmu Sosial*. Yayasan Argo-Ekonomika. Jakarta.

Muljono, Pudji; Burhanuddin; Bakhtiar, Yannefri. *Upaya Pemberdayaan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan Melalui Model Posdaya (Pos Pemberdayaan Keluarga)* (http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/45113)

Parsons, Ruth J., James D, (1994). Jorgensen, Santos H. Hernandez, *The Integration of Social Work Practice.* Wadsworth, Inc., California

Piper, R. (1997). The Performance Determinants of Small and Medium-Sized Manufacturing Firms. Unpublished Ph.D. Dissertation, University.

Ratnawati, S. (2011). "*Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Perdesaan Melalui Pengembangan Kewirausahaan*", Jurnal Kewirausahaan Volume 5 Nomor 2, Desember 2011

Subandi. (2013). Ekonomi Koperasi Teori dan Praktik. Bandung: Alfabeta

Suharto, Edi. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Cetakan Pertama. Bandung: PT Refika Aditama

Sumardjo. (2007). *Metoda Partisipatif dalam Pengembangan Masyarakat*. Magister Profesional Pengembangan Masyarakat, Sekolah Pascasarjana IPB. Bogor.

Sumardjo. (2009). *Manajemen Konflik, Kolaborasi dan Kemitraan*. Pusat Kajian Resolusi Konflik dan Pemberdayaan (CARE IPB), LPPM IPB. Bogor.

Sumardjo. (2010). *Revitalisasi Peran Penyuluh Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*. Makalah disampaikan Konggres I Penyuluh Sosial pembinaan pejabat fungsional penyuluh sosial, Jakarta 19-20 Mei 2010

Sumodiningrat, G. (1999). *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat.* Bina Rena Pariwara. Jakarta.

Tambunan, T.H. (1994). Perkembangan Industri Skala Kecil di Indonesia. Jakarta : PT. Mutiara Sumber Widya

Tambunan, T. (2001). Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran, Teori dan Temuan Empiris. Jakarta : LP3ES.

Tambunan, T. (2009). UMKN di INDONESIA. Bogor : Ghalia Indonesia.

Tambunan, T. (2010). Center for Industry, SME and Business Competition Studies. Trisakti University, Indonesia.

Winarni, E. (2006). Strategi Pengembangan Usaha Kecil Melalui Peningkatan Aksesibilitas Kredit Perbankan. Diunduh pada tanggal 23 Oktober 2012.

Dokumen:

Badan Pusat Statisik Bandung Barat. 2021. *Kabupaten Bandung Barat dalam Angka*. Katalog: 1102002.3217

Bank Indonesia. (2011). Five Finger Philosophy: Upaya Memberdayakan UMKM, (online),(http://www.bi.go.id/web/id/UMKMBI/Koordinasi/Filosofi+Lima+Jari/,diakses 3 oktober 2011).

bappelitbangda

Berita Online Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung Barat.

BPS per Agustus 2017 www.republika.co.id (18 Aug 2017). Kontribusi UMKM untuk Pertumbuhan Ekonomi Diprediksi Turun. Diakses pada 14-12-2019. https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/08/18/ouvlqv382-kontribusi-umkm-untuk-pertumbuhan-ekonomi-diprediksi-turun

Competitiveness Report 2014–2015. Diakses pada 14-12-2019 dari http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf

BPS Tahun 2019

BPS KBB tahun 2021

Kontribusi UMKM DalamRodaPerekonomian Indonesia28 Dec 2018 10:22https://umkm-id.com/post/kontribusi-umkm-dalam-roda-perekonomian-indonesia

Laporan World Economic Forum (WEF) 2014-2015, weforum.org (2015).

The Global PP No 7 tahun 2021 tentang Perlindungan, Kemudahan dan Pemberdayaan UMKM.

PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04/Per/M.KUKM/VII/2012 TENTANG PEDOMAN UMUM AKUNTANSI KOPERASI

Peran UMKM dalam Perekonomian Indonesia: https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/20/120000469/peran-umkm-dalam-perekonomian-indonesia?page=all

Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020 – 2024

Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jakarta :Sekretariat Negara

Tambunan, T. (2005). Development of Small and Medium Enterprises in Indonesia. Faculty of Economic. Trisakti University Indonesia. Working Paper. http://depot.gdnet.org/newkb/ful ltext/tambunan_sme.pdf

UU no 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.

UU no 20 tahun 2008 Tentang UKM.

UU RI No 25 thn 1995, Tentang Perkoperasian.

Sumber Berita Online:

192.000 Warga Bandung Barat Masuk Kategori Miskin - Pikiran-Rakyat.com

https://priangantimurnews.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-1222716275/kabupaten-bandung-

bappelitbangda

barat-masuk-wilayah-kemiskinan-ekstrem-ini-kata-menteri-desa-pdtt

bappelitbangda